



**POLITEKNIK
PERKAPALAN
NEGERI SURABAYA**

PPNS POLITEKNIK
PERKAPALAN
NEGERI SURABAYA



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	7
1.3 SWOT ANALYSIS	28
BAB II VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS.....	38
2.1 VISI.....	38
2.2 MISI.....	38
2.3 TUJUAN.....	38
2.4 SASARAN STRATEGIS.....	40
2.5 PROGRAM UTAMA	43
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN	52
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN	52
3.2 KEBIJAKAN KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA.....	60
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPNS	66
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	82
4.1 KESEUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	82
BAB V PENUTUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. PPNS dari tahun ke tahun	2
Tabel 1.2. Jurusan dan Program Studi di PPNS.....	3
Tabel 1.3. Data akreditasi Institusi dan Program Studi di PPNS.....	8
Tabel 1.4. Data HAKI – MERK di PPNS.....	12
Tabel 1.5. Data HAKI – PATENT BIASA di PPNS	12
Tabel 1.6. Data HAKI – PATENT SEDERHANA di PPNS.....	12
Tabel 1.7. Data HAKI – CIPTA di PPNS	12
Tabel 1.8. Data HAKI – DESAIN INDUSTRI di PPNS.....	12
Tabel 1.9. Data bangunan gedung yang digunakan PPNS.....	23
Tabel 1.10. Data prasarana terbuka yang digunakan PPNS	23
Tabel 1.11. Data fasilitas lab/bengkel/studio masing masing prodi	24
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan Strategis,dan Program Utama.....	44
Tabel 2.2 Keterkaitan Sasaran Strategis, Program Utama, Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Utama	45
Tabel 4.1 1 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 1.....	83
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 2	85
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 3	85
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 4	87
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 5	88
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 6	89
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 7.....	91
Tabel 4.8 Anggaran Indikatif Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 - 2024.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data perkembangan jumlah skema kompetensi	10
Gambar 1.2. Data prosentase kehadiran dosen	10
Gambar 1.3. Data jumlah Penelitian tahun 2017 - 2019	11
Gambar 1.4. Data Jumlah Pengabdian pada Masyarakat tahun 2017 – 2019	13
Gambar 1.5. Diagram Jumlah Peminat yang daftar di PPNS tahun 2017 – 2019	14
Gambar 1.6. Sebaran Mahasiswa PPNS Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 1.7. Diagram sebaran asal daerah mahasiswa PPNS.....	15
Gambar 1.8. Grafik Prestasi Mahasiswa	15
Gambar 1.9. Grafik IPK Lulusan tahun ajaran 2016/2017 – 2018/2019	16
Gambar 1.10. Grafik Toefl/TOEIC Score Lulusan tahun 2017 – 2019	16
Gambar 1.11. Data Waktu Tunggu Lulusan tahun 2017 – 2019.....	17
Gambar 1.12. Data kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi lulusan.....	17
Gambar 1.13. Distribusi Prosentase dosen berdasarkan jenis kelamin Tahun 2019	18
Gambar 1.14. Distribusi Prosentase Jenjang Pendidikan Dosen PPNS Tahun 2019	19
Gambar 1.15. Distribusi Jabatan Fungsional Dosen PPNS Tahun 2019.....	19
Gambar 1.16. Distribusi jumlah Fungsional Tenaga Kependidikan PPNS Tahun 2019 ..	20
Gambar 1.17. Prosentase jenjang akademik Tenaga Kependidikan PPNS Tahun 2019 ..	20
Gambar 1.18. Struktur Organisasi di PPNS.....	22
Gambar 3.1. 7 Misi dan Arahannya Presiden serta Agenda Pembangunan 2020 - 2024.....	52
Gambar 3.2. Peringkat Daya Saing Indonesia 2018.....	53

KATA PENGANTAR

Hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa kita panjatkan puji, syukur, sembah, sujud. Atas Rahmat dan karunia Nya, kita telah menyelesaikan Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 2020-2024. Ini adalah bentuk upaya kami, untuk mewujudkan cita-cita seluruh para pendiri bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Kami sadar sepenuhnya, bahwa upaya kami ini masih bagaikan sebutir pasir dipadang pasir, dibandingkan dengan pengorbanan jiwa raga Pahlawan Negeri ini, untuk kemajuan bangsa ini. Namun sebutir pasir ini akan berkumpul dengan butiran pasir yang lainnya sehingga menjadi kekuatan yang besar dan menjadi bagian yang terpenting untuk pembangunan negeri ini, hari ini dan dimasa yang akan datang.

Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tahun 2020-2024 ini disusun dengan merujuk pada Rencana Induk Pengembangan (RIP-PPNS) 2015-2019, Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam penyusunan Rencana Strategis PPNS 2020-2024 ini, dilakukan melalui kajian ilmiah yang obyektif, dengan menganalisis potensi, kekuatan, kelemahan/kekurangan, peluang-peluang dimasa yang akan datang, gangguan yang perlu diantisipasi baik yang terduga maupun yang tidak terduga, menyusun hypotesa penyelesaian serta rencana aksi untuk lima tahun ke depan.

Renstra PPNS 2020-2024 ini akan dijadikan rujukan dalam setiap penyusunan Program. kegiatan berikut Indikator Kinerjanya dalam setia tahun anggaran. Renstra PPNS 2020-2024 menjamin arah pengembangan PPNS sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pengembangan PPNS yang tertuang dalam Statuta PPNS. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang tak terduga seperti kondisi darurat kesehatan atau lainnya, maka strategi pengembangan PPNS dilakukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini diharapkan akan menghasilkan lompatan besar untuk pengembangan PPNS menuju Politeknik Unggul Bereputasi Global.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang tak terkira kepada; Senat Akademik PPNS yang telah membahas secara bertahap dan berkesinambungan, jajaran Direksi PPNS yang telah membantu dan mendukung penuh seluruh proses dari draft sampai rumusan final Renstra PPNS 2020-2024. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada seluruh tim perumus, tim penyusun, editor dan semua yang terlibat dalam penyusunan Renstra PPNS 2020-2024 ini. Semoga usaha ini diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

Surabaya, Juli 2020
Direktur,

Ir. Eko Julianto M.Sc., FRINA.
NIP. 196501231991031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sejarah berdirinya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dimulai saat berdirinya Program Non Gelar Pendidikan Ahli Teknologi (PAT) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di bawah naungan Jurusan Teknik Perkapalan pada tahun 1979. Lokasi kampus pada saat itu berada di Kampus ITS jalan Basuki Rachmad Surabaya. Akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri tanggal 14 Agustus 1981 yang diikuti dengan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka pada tahun 1982 terjadi penggabungan PAT-PAT ke dalam sebuah ruang organisasi yaitu Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT), dimana di dalamnya terdapat Jurusan Teknik Perkapalan.

Pada tahun yang sama (1982) pemerintah mendirikan 6 (enam) politeknik baru dengan bantuan dana dari Bank Dunia melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi no No. 03/DJ/Kep/1979. Ke-enam politeknik tersebut adalah Politeknik USU Medan, Politeknik ITB Bandung, Politeknik UNSRI Palembang, Politeknik UI Jakarta, Politeknik UNDIP Semarang, dan Politeknik UNIBRAW Malang. Pendirian ke-enam politeknik tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Oleh sebab itu, melalui **“loan agreement”** dari bank dunia (World Bank) pada tahun 1986, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menawarkan pembukaan politeknik baru di ITS. Rektor ITS pada saat itu (Ir. Harjono Sigit, BS) menerima tawaran tersebut, sehingga pada tahun 1987 berdirilah Politeknik Perkapalan FNGT-ITS yang berada di bawah Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT) ITS dengan direktur saat itu adalah Ir. Soegiono (Prof Ir. Soegiono). Pada tahun itu pula (1987) sampai 1998 selama kurang lebih 11 tahun, Politeknik Perkapalan mendapatkan hibah dari pemerintah Jerman Barat melalui *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit* (GTZ) yang dialokasikan untuk [1] pengembangan sumber daya manusia (SDM), [2] pengembangan peralatan laboratorium dan [3] technical assistance. Pada saat itu Politeknik Perkapalan mempunyai 3 (tiga) jurusan dengan 4 (empat) program studi, yaitu [1] Jurusan Teknik Bangunan Kapal (terdiri dari program studi program studi D3 Teknik Bangunan Kapal dan Program studi D3 Teknik Perancangan dan Konstruksi

Kapal), [2] Jurusan Teknik Permesinan Kapal (program studi D3 Teknik Permesinan Kapal), dan [3] Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal (program studi D3 teknik Kelistrikan Kapal). Pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1991 Politeknik Perkapalan FNGT-ITS berubah menjadi Politeknik Perkapalan Surabaya melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik Dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri. Pada tahun 1995 Politeknik Perkapalan Surabaya diubah menjadi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-703/1/1995, dan tetap di dalam naungan ITS. Kemandirian PPNS sebagai sebuah perguruan tinggi langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (lepas dari ITS) dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 tersebut keluar 2 (dua) peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 42 tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Menghadapi era persaingan global dan untuk meningkatkan *image*, nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dikenalkan dengan sebutan baru ***Shipbuilding Institute of Polytechnic Surabaya (SHIPS)***. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat sekilas sejarah PPNS dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1. PPNS dari tahun ke tahun

TAHUN	KETERANGAN
1979	Program Non Gelar, di Jurusan Teknik Perkapalan ITS
1982	Fakultas Non Gelar Teknik di ITS
1986	Politeknik Perkapalan – ITS berdiri dengan bantuan World Bank
1987	Penerimaan Pertama Mahasiswa Baru (masih tergabung dengan ITS)
1996	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS- ITS)
2012	Penerimaan mahasiswa baru pertama secara mandiri oleh PPNS
2014	PPNS resmi menjadi institusi mandiri
2018	PPNS Terakreditasi A (Akreditasi Perguruan Tinggi)
2019	Pembukaan Prodi Pasca Sarjana MST

Pada perkembangannya, dari semula hanya mempunyai 4 (empat) program studi jenjang Diploma-3 pada saat berdirinya, saat ini PPNS telah mempunyai 15 (lima belas) program studi dengan rincian 4 (empat) program studi jenjang Diploma-3 (*advance diploma*), 11 (sebelas) program studi jenjang Sarjana Terapan (*bachelor*), dan satu program studi Magister Sains Terapan. Pada Tabel 1.2 dapat dilihat rincian jurusan (*department*) dan program studi yang ada di lingkungan PPNS saat ini

Tabel 1.2. Jurusan dan Program Studi di PPNS

No	Jurusan	Program Studi	Jenjang	Berdiri Th
1	Teknik Bangunan Kapal	- Teknik Perencanaan & Konstruksi Kapal	D3	1987
		- Teknik Bangunan Kapal	D3	1987
		- Teknik Pengelasan	Sarjana Terapan	2007
		- Manajemen Bisnis	Sarjana Terapan	2014
		- Teknik Perancangan & Konstruksi Kapal	Sarjana Terapan	2014
2	Teknik Permesinan Kapal	- Teknik Permesinan Kapal	D3	1987
		- Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sarjana Terapan	2003
		- Teknik Perpipaan	Sarjana Terapan	2007
		- Teknik Desain dan Manufaktur	Sarjana Terapan	2007
		- Teknik Pengolahan Limbah	Sarjana Terapan	2014
		- Teknik Permesinan Kapal	Sarjana Terapan	2014
3	Teknik Kelistrikan Kapal	- Teknik Kelistrikan Kapal	D3	1987
		- Teknik Otomasi	Sarjana Terapan	2007
		- Teknik Kelistrikan Kapal	Sarjana Terapan	2014
4	Magister Sains Terapan	- Teknik Keselamatan dan Resiko	Pasca Sarjana Terapan	2019

Dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus meningkat, PPNS mempunyai komitmen besar untuk selalu siap dan terus berbenah. Hal tersebut semata-mata untuk memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa dan negara dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Pengembangan kualitas sumber daya baik sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) maupun fasilitas pembelajaran terus menerus dilakukan. Pengembangan kualitas SDM dilakukan melalui kegiatan *degree* dan *non-degree* baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Peremajaan peralatan laboratorium, penambahan gedung kuliah, penambahan dan pembenahan sarana dan prasarana gedung kuliah juga dilakukan.

Dalam menentukan arah rencana pengembangan yang akan dilakukan, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2015 – 2034, yang akan dijadikan sebagai acuan rencana jangka panjang untuk mencapai Visi dan Misi PPNS. RIP tersebut dibagi menjadi beberapa periode 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA). Periodisasi RENSTRA PPNS beserta tonggak-tonggak capaiannya adalah sebagai berikut:

- 1) RENSTRA 2015 - 2019: PPNS berusaha mewujudkan Pembelajaran Berbasis Manufaktur. Indikator utama dalam periode ini adalah pengembangan dan perwujudan

Kurikulum Teaching Factory dan pengembangan skema uji kompetensi berkualifikasi nasional untuk setiap program studi.

- 2) RENSTRA 2020 - 2024: PPNS berusaha menjadi Pusat Riset Terapan Bidang Teknologi Perkapalan dan Kemaritiman. Indikator utama dalam periode ini adalah munculnya produk-produk unggulan penunjang teknologi perkapalan dan kemaritiman sebagai hasil riset-riset terapan.
- 3) RENSTRA 2025 - 2029: PPNS berusaha melakukan Hilirisasi Produk Inovatif Penunjang Teknologi Perkapalan dan Kemaritiman. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa luaran hasil riset terapan dan produk-produk PPNS dapat membantu menunjang teknologi perkapalan dan kemaritiman nasional.
- 4) RENSTRA 2030 - 2034: PPNS berusaha menjadi kampus Rujukan Nasional Produk Ramah Lingkungan Penunjang Teknologi Perkapalan dan Kemaritiman. Indikator utama periode ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat luas terhadap produk-produk unggulan PPNS yang telah dihilirisasi.

Dalam RENSTRA 2015 – 2019, bentuk sasaran strategis yang telah ditentukan dalam beberapa bidang antara lain :

1) Bidang Pendidikan.

- Memutakhirkan dan mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi lulusan
- Menyusun Perangkat Kurikulum KKNI
- Internasionalisasi Program Studi melalui akreditasi program studi oleh lembaga internasional
- Mengembangkan strategi pembelajaran student center learning
- Meningkatkan kualitas layanan akademik
- Mengembangkan sertifikasi kompetensi bagi lulusan
- Mengembangkan program OJT melalui jejaring dengan industri anggota IAB dan industri lain serta instansi terkait
- Meningkatkan jumlah student body
- Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan beasiswa bagi yang berpotensi dari kalangan masyarakat marjinal

2) Bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.

- Meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian
- Mengembangkan sistem pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

-
- Pengembangan penelitian yang berorientasi pada perbaikan mutu pembelajaran dan peningkatan tata kelola
 - Menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk publik dan layanan jasa/produksi untuk meningkatkan kompetensi dan revenue lembaga
 - Menyelenggarakan pendidikan program magister terapan

3) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

- Mengembangkan mekanisme terstruktur tentang peningkatan soft skill, dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan
- Mengembangkan budaya enterpreunership mahasiswa
- Mengembangkan pusat kewirausahaan untuk mendukung pertumbuhan budaya wirausaha di lingkungan kampus
- Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam kegiatan ilmiah nasional dan internasional
- Mengembangkan sistem pelacakan alumni dan evaluasi kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja untuk mendukung relevansi pendidikan dan perluasan jejaring

4) Bidang Sumberdaya Manusia.

- Mengembangkan kompetensi pedagogik dosen
- Melakukan pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan institusi untuk pengembangan jangka panjang
- Meningkatkan kompetensi bagi dosen
- Meningkatkan motivasi untuk berkarya dari segenap civitas akademik melalui sistem meritokrasi yang transparan dan akuntabel

5) Bidang Organisasi, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu

- Menata ulang struktur organisasi untuk merespon perkembangan kebutuhan pengelolaan pendidikan tinggi
- Mengajukan perubahan Organisasi Tata Kelola (OTK) dan Statuta
- Monitoring berkala pelaksanaan organisasi PPNS
- Melakukan evaluasi dan perbaikan manajemen, fasilitas kerja/pendidikan
- Menerapkan sistem penilaian untuk mengukur kinerja setiap unit kerja
- Terwujud sistem database yang lengkap dan selalu di mutakhirkan
- Organisasi run by system

- Mengembangkan standar/prosedur/instruksi kerja pada semua aktivitas/kegiatan, disosialisasikan, dan dilaksanakan dengan baik
- Intensifikasi sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan perguruan tinggi
- Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara efektif
- Mempersiapkan kemandirian institusi yang rasional

6) Bidang Sarana Prasarana & IT

- Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
- Menciptakan sistem pengelolaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menjamin sustainability institusi
- Memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Menciptakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi pada bidang akademik, keuangan, dan kepegawaian, yang mendukung setiap pengambilan kebijakan
- Membudayakan sistem manajemen berbasis teknologi informasi di semua sektor yang mengelola kegiatan akademik
- Memanfaatkan sistem informasi untuk efisiensi tata kelola organisasi (perencanaan, pemantauan, evaluasi, pemberian penghargaan/hukuman)
- Memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan kekayaan kepustakaan

7) Bidang Kerjasama

- Membentuk pusat kerjasama
- Meningkatkan kerjasama bidang akademik dan non akademik (dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan kualitas SDM dan atmosfer akademik yang berdampak pada kualitas peringkat institusi
- Mengembangkan mekanisme terstruktur untuk menjamin dan meningkatkan mutu, relevansi serta keberlanjutan kegiatan kerjasama
- Meningkatkan intensitas kerjasama sebagai upaya peningkatan revenue lembaga

Dalam merealisasikan rencana strategis diatas telah dilakukan melalui berbagai program aktivitas dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan dari berbagai program aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator ketercapaiannya. Berdasarkan hasil indikator ketercapaian dari implementasi program

aktivitas selama kurun waktu 2015 – 2019 tersebut akan diketahui potensi dan permasalahan yang akan digunakan dalam menentukan Rencana Strategis yang tepat dalam kurun waktu 2020 – 2024.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Selama pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2015 – 2019 sudah pasti ditentukan komitmen dari semua pihak serta dibutuhkannya biaya yang tidak sedikit. Namun sejauh ini PPNS masih bisa dan akan terus berkomitmen supaya mampu mewujudkan dalam program-program selanjutnya. Beberapa model hibah kompetisi telah diterima oleh PPNS. Hal ini menjadi bukti bahwa PPNS serius untuk terus berbenah mengejar komitmen yang telah ditetapkan. Beberapa jenis hibah kompetisi yang telah diperoleh PPNS antara lain Due – like Program, TPSDP (*Technological and Professional Skills Development Sector Project*), Inherent, IMHERE dan saat ini PPNS sedang memperoleh hibah PEDP dan Program Revitalisasi.

Dalam menentukan bentuk rencana strategis dalam periode tahun 2020 – 2024 akan dilakukan pemotretan terhadap kondisi PPNS saat ini, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal. Hasil pemotretan ini diharapkan mampu diketahui potensi dan permasalahan yang ada, yang selanjutnya dengan menggunakan analisa SWOT dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama penentuan bentuk Rencana Strategi yang sesuai.

1.2.1 Kondisi Internal.

Pemotretan terhadap kondisi internal yang dilakukan meliputi berbagai bidang yaitu pendidikan; penelitian dan pengabdian pada masyarakat; mahasiswa dan alumni; SDM (Dosen dan tenaga kependidikan); Organisasi, tata kelola dan sistem penjaminan mutu; Sarana dan prasarana; Sistem informasi.

1.2.1.1 Pendidikan

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) merupakan satu-satunya Politeknik Negeri di Indonesia yang secara total mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang teknologi perkapalan serta industri penunjangnya dan terdapat 15 (lima belas) program studi yang dikelola melalui 3 (tiga) Jurusan. PPNS senantiasa meningkatkan kualitas dari setiap program studi dalam rangka menghadapi persaingan baik skala nasional maupun internasional. Dalam skala nasional telah dibuktikan dengan dicapainya akreditasi A untuk akreditasi institusi PPNS dengan 5 (lima) program studi telah terakreditasi A dan 9

(Sembilan) program studi terakreditasi B. Disamping itu, terdapat 3 (tiga) program studi telah diakreditasi oleh RINA (Royal Institute of Naval Architecture). RINA merupakan badan / asosiasi untuk bidang perkapalan yang terdiri 126 negara di dunia dan berkantor pusat di London Inggris. Bahkan sejak April 2018 PPNS juga telah tercatat sebagai “*Corporate Partner*” dari RINA. Dalam bidang keselamatan, pada tanggal 18 September 2018 PPNS merupakan satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia yang telah meraih penghargaan “*2018 Education Award*” dari WSO (World of Safety Organisation) yang berkantor di Charleston, West Virginia, USA. Berikut adalah data status akreditasi yang telah dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), untuk masing-masing program studi yang ada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Tabel 1.3. Data akreditasi Institusi dan Program Studi di PPNS

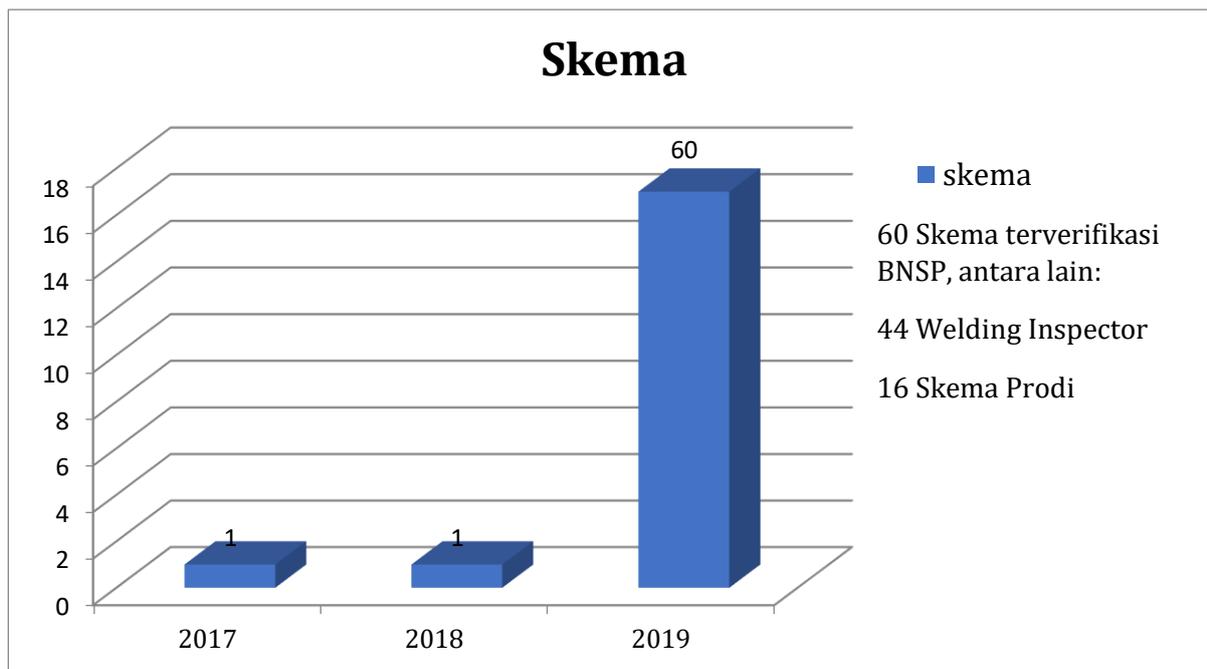
No	Nama Jurusan	Nama Akreditasi	Akreditasi
Akreditasi Institusi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)			A
1	Teknik Bangunan Kapal	1. D4 Teknik Perancangan & Konstruksi Kapal	B
		2. D4 Teknik Pengelasan	A
		3. D4 Manajemen Bisnis	B
		4. D3 Teknik Perancangan & Konstruksi Kapal ^{*)}	A
		5. D3 Teknik Bangunan Kapal ^{*)}	A
2	Teknik Permesinan Kapal	1. D4 Teknik Permesinan Kapal	B
		2. D4 Teknik Keselamatan & Kesehatan Kerja	A
		3. D4 Teknik Desain & Manufaktur	B
		4. D4 Teknik Pengolahan Limbah	B
		5. D4 Teknik Perpipaan	A
		6. D3 Teknik Permesinan Kapal*	B
3	Teknik Kelistrikan Kapal	1. D4 Teknik Kelistrikan Kapal	B
		2. D4 Teknik Otomasi	B
		3. D3 Teknik Kelistrikan Kapal	B
4	Magister Sains Terapan	1. S-2 Teknik Keselamatan dan Resiko	Proses Akreditasi

Keterangan : ^{*)} = juga terakreditasi RINA.

Bentuk kurikulum yang menerapkan (50-60)% praktek dan 1 semester penuh pelaksanaan OJT (*On The Job Training*) atau magang kerja merupakan ciri khas pendidikan di PPNS. Kurikulum PPNS pertama kali direvisi pada tahun 1996. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum *Link and Match* yang mencoba mengakomodasi kebutuhan industri terhadap tenaga kerja siap pakai. Proses revisi / penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan senantiasa dilakukan untuk menyesuaikan serta memenuhi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang ada. Bentuk penyempurnaan kurikulum yang terakhir saat ini adalah adanya program *Teaching Factory* yang dilakukan selama satu semester penuh

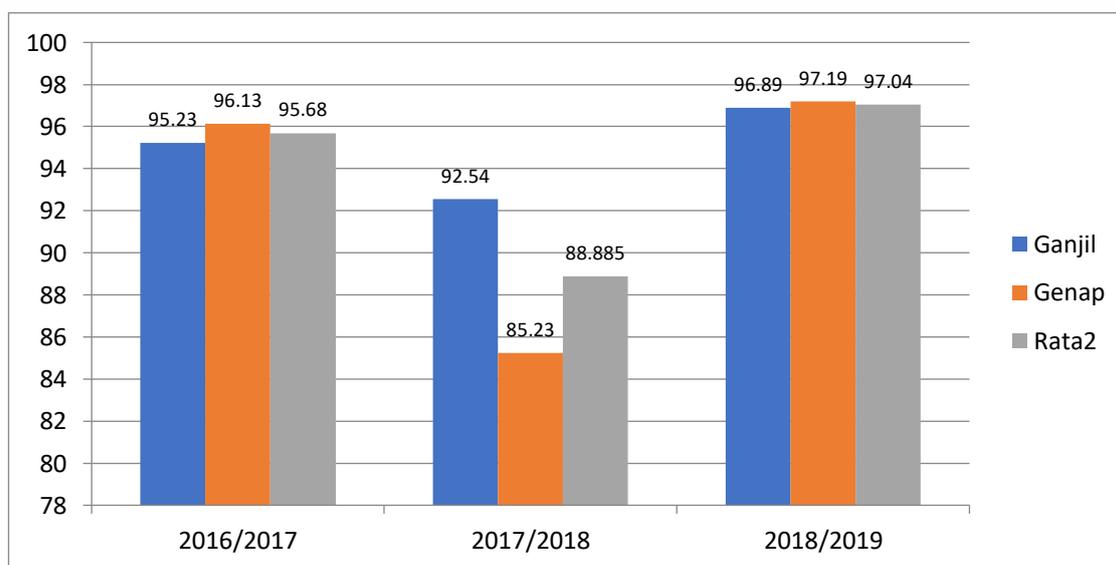
disamping pelaksanaan On the Job Training yang tetap dilaksanakan selama satu semester penuh di industri. Program *Teaching Factory* merupakan bentuk model pembelajaran yang dicanangkan PPNS dengan memfasilitasi mahasiswa belajar seperti di industri dengan mengintegrasikan beberapa laboratorium/bengkel/studio yang ada di PPNS melalui pembuatan suatu produk tertentu dengan standar dan kualitas seperti yang dibutuhkan oleh industri. Meskipun masih belum secara keseluruhan, dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah teori telah dikembangkan dengan sistem pembelajaran Blended Learning, sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen bisa berinteraktif secara on line 24 jam dan mahasiswa bisa mereview materi-materi yang dirasa kurang paham setiap saat.

Sebagai bentuk ciri khas dari lulusan Politeknik, sejak tahun 2007, PPNS telah mengeluarkan kebijakan bahwa sertifikasi kompetensi adalah merupakan salah satu persyaratan dari kelulusan. Disamping ijazah dan transkrip yang diberikan, setiap lulusan juga akan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi utama dari masing-masing program studi yang dikeluarkan oleh PPNS, kecuali program studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah bekerjasama dengan Kemenakertrans. Peningkatan kualitas dan pengakuan kompetensi terhadap lulusan senantiasa dilaksanakan, melalui program Hibah PEDP, sejak tahun 2017 telah terbentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP P1) PPNS dengan satu skema kompetensi yang telah diakui yaitu skema Welding Inspector khususnya untuk program studi Teknik Pengelasan. Dalam perkembangan selanjutnya, saat ini LSP P1 PPNS telah mengembangkan skema kompetensi sebanyak 60 skema yang telah disetujui semuanya oleh BNSP (Badan Nasional Standarisasi Profesi), dan telah memenuhi kebutuhan dari seluruh program studi yang ada di PPNS. Berikut data perkembangan jumlah skema kompetensi yang di LSP P1 PPNS dan telah disetujui oleh BNSP :



Gambar 1.1. Data perkembangan jumlah skema kompetensi

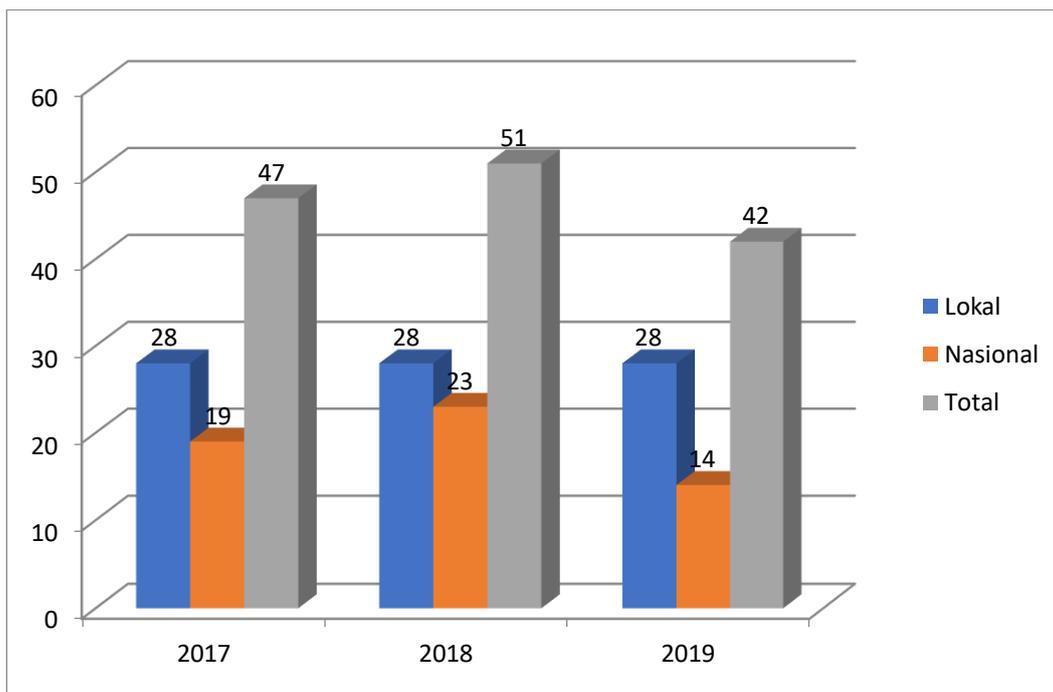
Pada proses pembelajaran, PPNS telah membuat kebijakan terkait persyaratan minimal kehadiran 80% buat tenaga pengajar dan mahasiswa untuk dapat melaksanakan serta mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah. Hal ini dilakukan untuk memnuhi tuntutan skill kompetensi lulusan yang merupakan ciri dari lulusan Politeknik, sehingga dituntut tingkat kehadiran yang tinggi. Untuk proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan, sebelum akhir semester proses perkuliahan mahasiswa wajib melakukan penilaian terhadap setiap tenaga pengajar dan fasilitas yang diperoleh. Berikut adalah data hasil monitoring kehadiran dosen dalam kurun waktu tahun ajaran 2016/2017 – 2018/2019 :



Gambar 1.2. Data prosentase kehadiran dosen

1.2.1.2 Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Motivasi kerja yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas institusi dapat ditunjukkan dengan keikutsertaan dan keberhasilan PPNS dalam memperoleh beberapa hibah kompetisi yang digulirkan oleh Dikti seperti Due-Like, Inheret, TPSDP, I-MHERE, PEDP dan Revitalisasi, diantaranya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sarana laboratorium/bengkel/studio yang menghasilkan dampak positif terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan. Dengan demikian kemampuan bersaing secara nasional dalam bidang penelitian semakin meningkat terbukti jumlah proposal penelitian yang berhasil didanai dalam jumlah dan nilai pendanaannya semakin besar. Disamping itu, secara kuantitatif jumlah anggaran DIPA yang dialokasikan oleh PPNS dalam pelaksanaan setiap tahun semakin meningkat. Adapun data jumlah penelitian yang telah dilakukan dalam tahun terakhir dapat dilihat seperti pada gambar berikut :



Gambar 1.3. Data jumlah Penelitian tahun 2017 - 2019

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian telah berhasil sampai diperoleh HAKI. Jenis-jenis data HAKI yang telah diproses di PPNS ada 5 macam yang meliputi HAKI-Merk, HAKI- Patent Biasa, HAKI – Patent Sederhana, HAKI Cipta dan HAKI Desain Industri. Adapun data HAKI yang telah dihasilkan Dosen PPNS adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Data HAKI – MERK di PPNS

No	Merk	Tahun	Keterangan
1	SHIPS LIFEBOAT + LOGO	2017	(TM) Menunggu Tanggapan Substantif
2	Mesem	2018	(TM) Persetujuan Direktur untuk diberi
3	SAKHA PORTABLE FORKLIFT + LOGO	2018	(TM) Persetujuan Direktur untuk diberi
4	PETRUK HEALTH FOOTWARE + LOGO	2018	(TM) Persetujuan Direktur untuk diberi
5	Pazma Chair	2018	(TM) Persetujuan Direktur untuk diberi
6	SHIPS Hull LOG	2018	(TM) Menunggu Tanggapan Substantif
7	Almon SMART	2018	(TM) Menunggu Tanggapan Substantif
8	MAShim MAXimo Performance	2018	(TM) Pelayanan Teknis
9	Wakemeup	2019	(TM) Pelayanan Teknis
10	MoyaQU	2019	(TM) Pelayanan Teknis

Tabel 1.5. Data HAKI – PATENT BIASA di PPNS

No	PATENT	Tahun	Keterangan
1	Kapal keruk Katamaran dengan bucket elevator bersirip	2017	(PA) Diberi 15 May 2017
2	Mesin Pembuat Balok Es Mandiri untuk nelayan Tradisonal	2018	(TM) Pelayanan Teknis
3	Hul Log Alat Ukur Pelacakan Kordinat lambung Kapal	2018	TM) Pelayanan Teknis
4	Smart Nurse Caller	2018	TM) Pelayanan Teknis

Tabel 1.6. Data HAKI – PATENT SEDERHANA di PPNS

No	PATENT	Tahun	Keterangan
1	Ship RUV	2019	Pemeriksaan Teknis
2	Formula semen	2019	Draft
3	Lambung Kapal	2019	Draft

Tabel 1.7. Data HAKI – CIPTA di PPNS

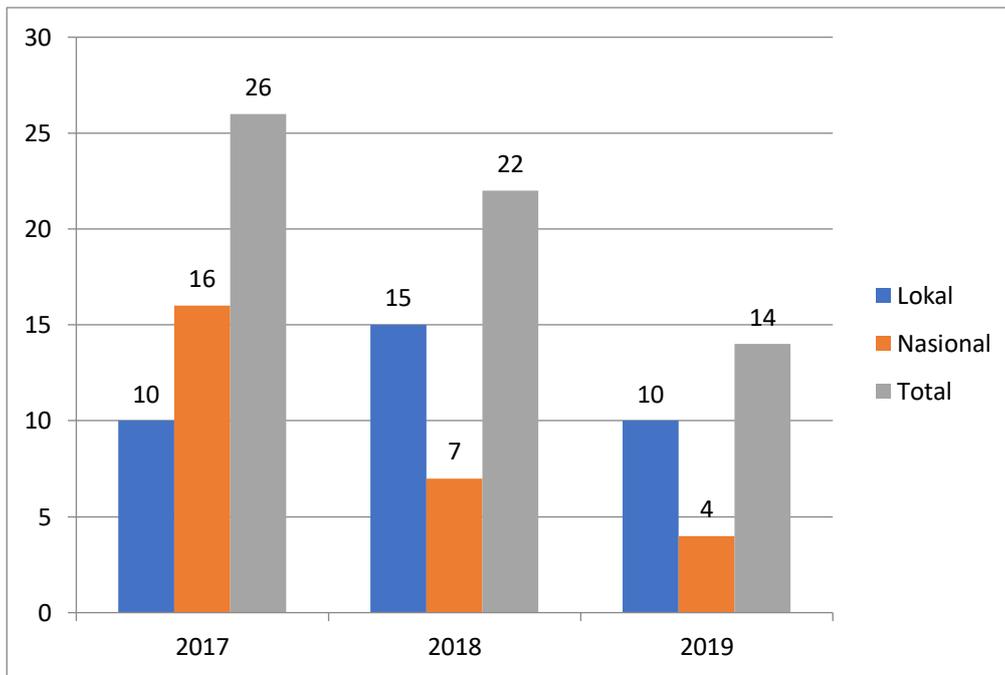
No	PATENT	Tahun	Keterangan
1	Buku KAPAL AUTOPILOT BERBASIS DATA PERSEBARAN	2019	(PA) Diberi 27 April 2019

Tabel 1.8. Data HAKI – DESAIN INDUSTRI di PPNS

No	PATENT	Tahun	Keterangan
1	Robot bawah laut ships	2019	Pemeriksaan Teknis

Di samping bidang penelitian, bidang pengabdian pada masyarakat di Politeknik Pekapalan Negeri Surabaya juga semakin meningkat dari sisi jumlah dan kualitasnya. Tingkat kompetitif bidang pengabdian pada masyarakat dalam skala nasional semakin meningkat terbukti jumlah dan nilai pendanaannya yang cukup besar. Disamping itu alokasi anggaran DIPA untuk bidang pengabdian yang dialokasikan oleh PPNS juga semakin meningkat.

Bentuk pengabdian pada masyarakat diantaranya termasuk kegiatan program konsultasi, jasa produksi serta pelatihan dan sertifikasi. Dengan berdirinya LSP P1 PPNS saat ini telah menghasilkan 60 skema kompetensi yang telah disetujui oleh BNSP. Adapun data jumlah pengabdian yang telah dilakukan oleh PPNS dari tahun 2017 – 2019 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

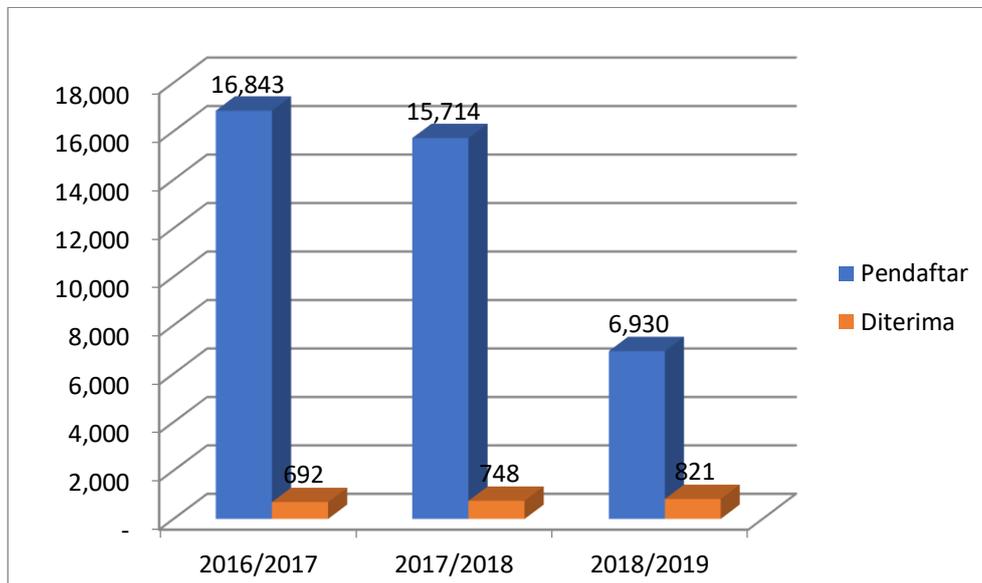


Gambar 1.4. Data Jumlah Pengabdian pada Masyarakat tahun 2017 – 2019

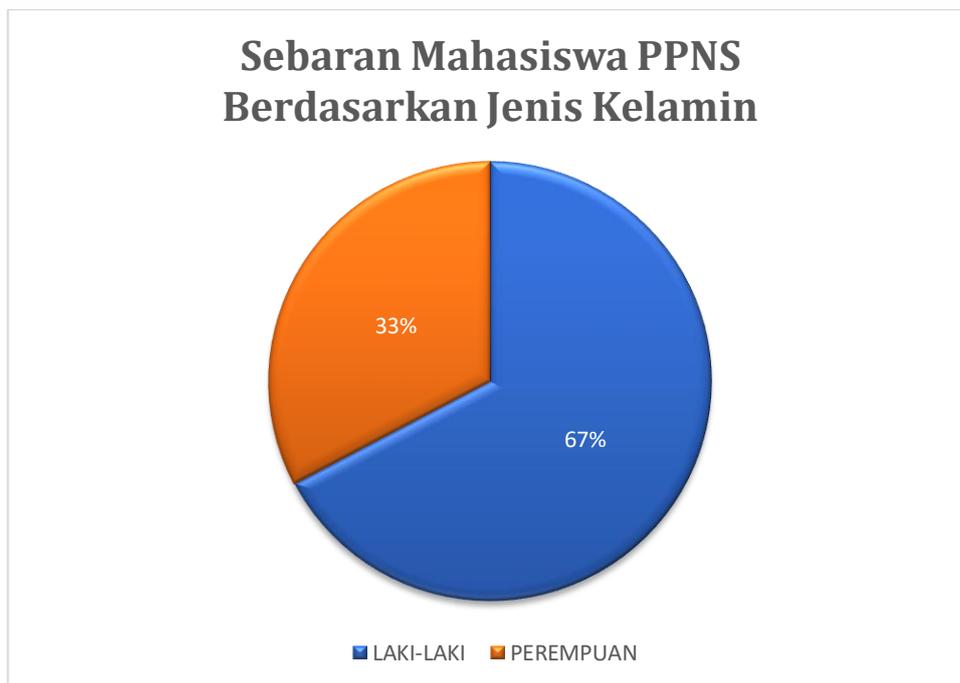
1.2.1.3 Mahasiswa dan Alumni

Jumlah peminat yang mendaftar di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya setiap tahun relatif tinggi dengan tingkat sebaran asal daerah pendaftar yang juga semakin meluas. Dengan semakin meningkatnya jumlah pendaftar mempunyai dampak semakin ketat tingkat persaingan untuk bisa diterima sebagai mahasiswa PPNS, sehingga kualitas mahasiswa yang diterima tentunya juga semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data IPK Lulusan, Toefl/ TOEIC Score serta prestasi yang dicapai mahasiswa dalam skala nasional maupun internasional semakin meningkat. Selama ini program promosi/pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri telah dilakukan ke berbagai daerah, tidak hanya di sekitar Surabaya tetapi hampir menyeluruh di propinsi Indonesia. Dengan melibatkan mahasiswa dalam program promosi ke tempat asal mereka mempunyai dampak adanya keberlanjutan dan perkembangan jumlah peminat dan asal daerahnya semakin meluas. Disamping itu, PPNS juga semakin memperhatikan keberadaan organisasi-organisasi mahasiswa serta berbagai unit-unit kegiatan yang diharapkan mampu mewadahi

dan mengembangkan minat dan kompetensi mahasiswa. Berikut adalah data yang mendukung tentang kemahasiswaan mulai dari data peminat/pendaftar sampai berbagai prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa.

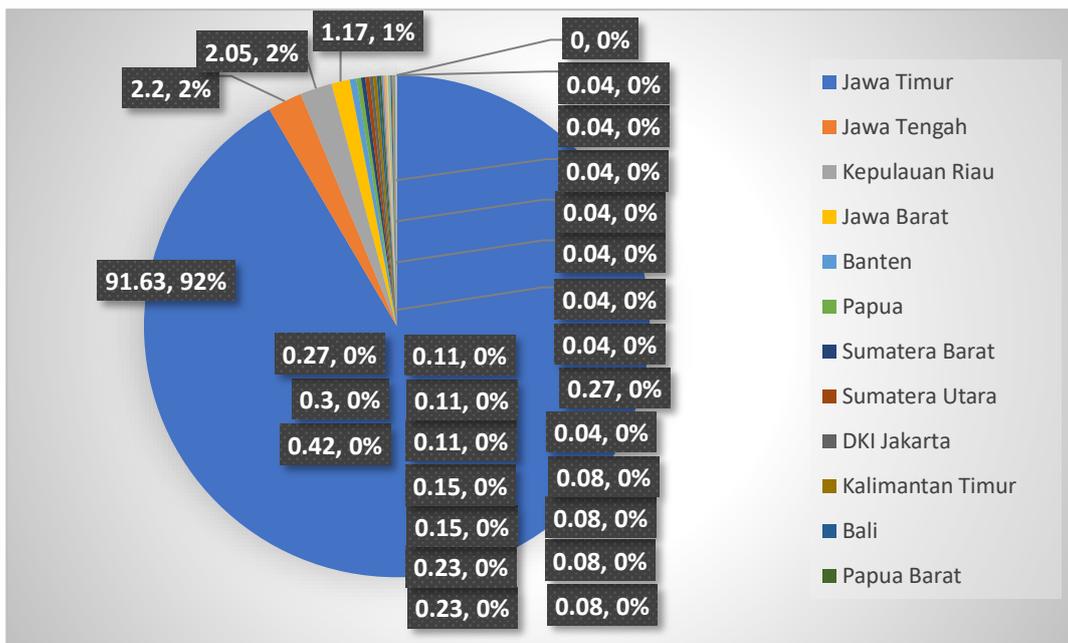


Gambar 1.5. Diagram Jumlah Peminat yang daftar di PPNS tahun 2017 – 2019



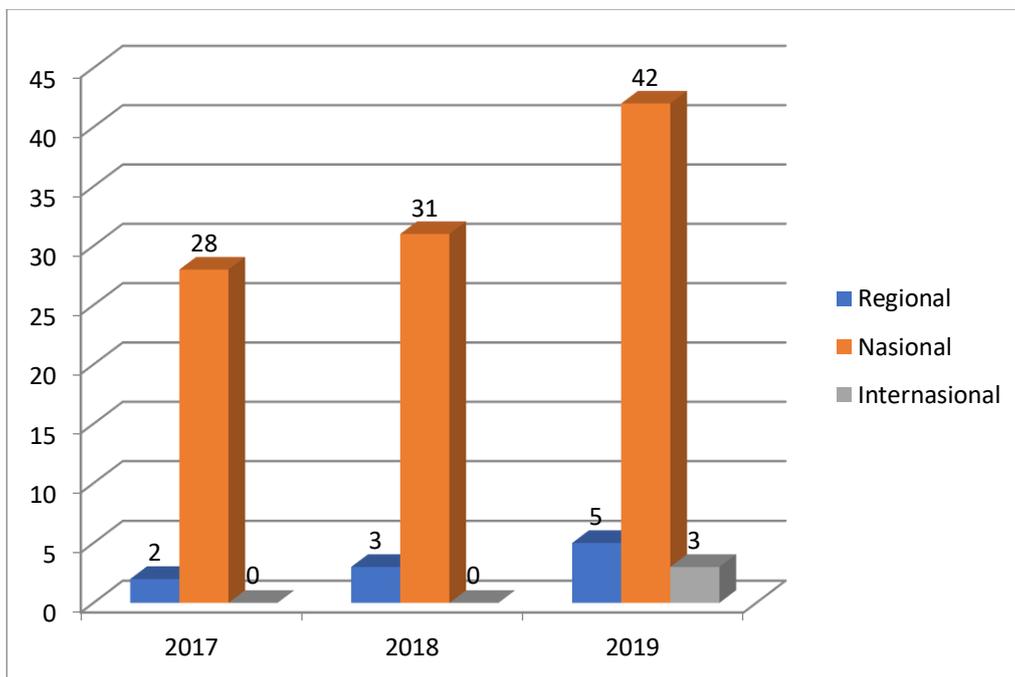
Gambar 1.6. Sebaran Mahasiswa PPNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Data mahasiswa berdasarkan sebaran asal daerah masing-masing mahasiswa PPNS



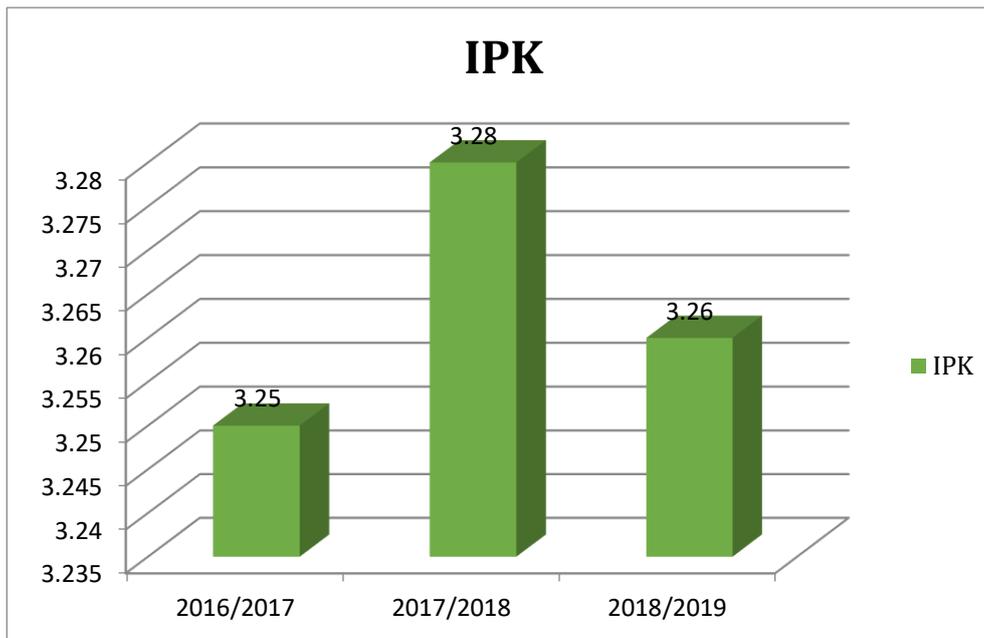
Gambar 1.7. Diagram sebaran asal daerah mahasiswa PPNS

Berikut data prestasi mahasiswa selama tiga tahun terakhir baik untuk tingkat lokal, nasional dan internasional.



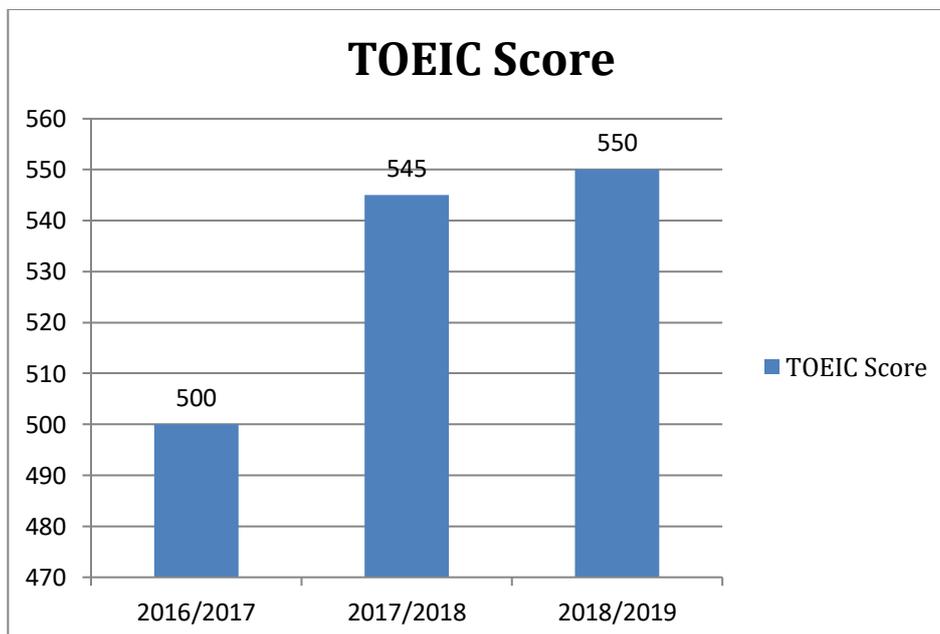
Gambar 1.8. Grafik Prestasi Mahasiswa

Berikut data mahasiswa berdasarkan IPK Lulusan masing-masing prodi untuk tiga tahun terakhir.



Gambar 1.9. Grafik IPK Lulusan tahun ajaran 2016/2017 – 2018/2019

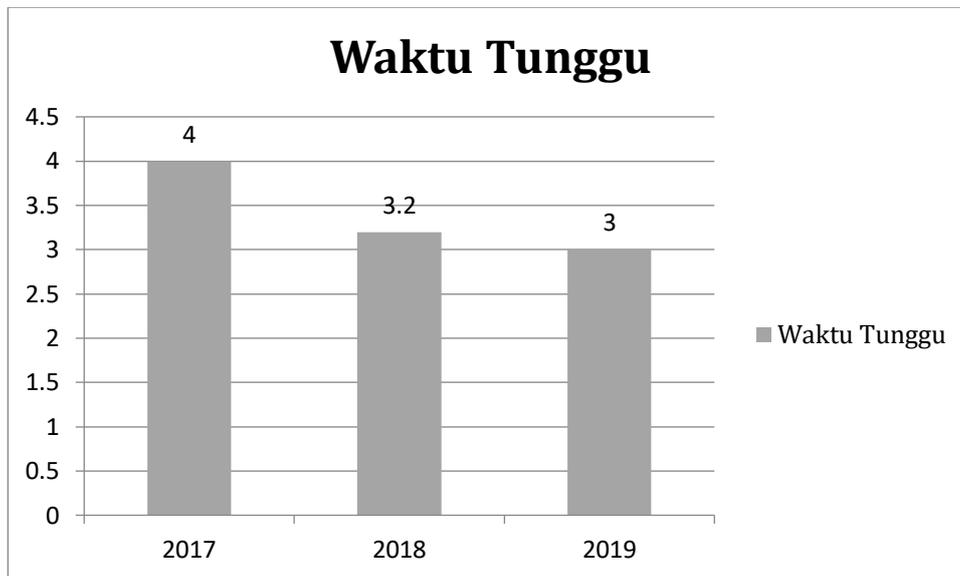
Berikut data mahasiswa berdasarkan rata-rata Toefl / Toeic Score masing-masing prodi untuk tiga tahun terakhir.



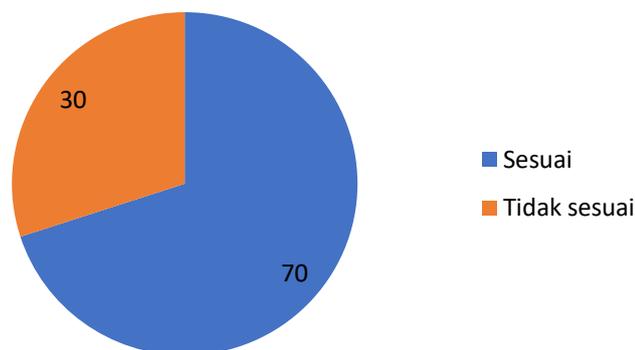
Gambar 1.10. Grafik Toefl/TOEIC Score Lulusan tahun 2017 – 2019

Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam bidang pendidikan tidak lain bertujuan untuk menghasilkan kemampuan dan daya saing dari lulusan yang tinggi. Tingkat keberhasilan lulusan dapat dilihat berdasarkan indikator ketercapaian untuk waktu tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama kali serta kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi

lulusan. Berikut adalah data yang menunjukkan waktu tunggu lulusan tiga tahun terakhir serta prosentase kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi lulusan.



Gambar 1.11. Data Waktu Tunggu Lulusan tahun 2017 – 2019



Gambar 1.12. Data kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi lulusan

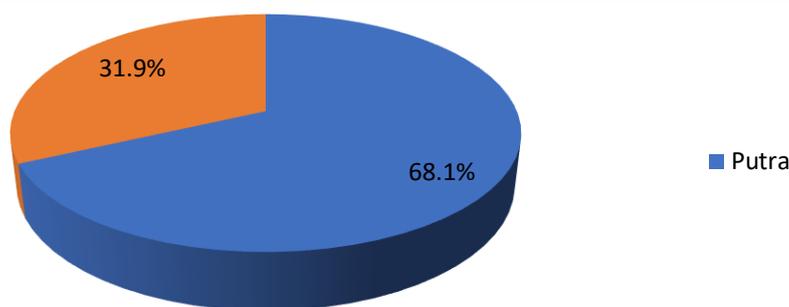
1.2.1.4 SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

SDM berperan besar dalam keberhasilan produksi yang dijalankan sebuah institusi. Sebagai perguruan tinggi, PPNS menempatkan proses belajar di kampus menjadi salah satu tolak ukur ketekunan mahasiswa berproses diri, sehingga data kehadiran (absen) sangat berarti bagi mahasiswa, dosen, maupun institusi sebagai jaminan ketekunan. Parameter lain yang dapat dipergunakan pada periode produksi ini adalah keaktifan mahasiswa (bertanya, mengerjakan quiz, diskusi), hingga ujian (UTS dan UAS). Dari sisi lain, semua parameter tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis kualitas SDM (dosen

khususnya) berkaitan masyarakat (mahasiswa dan orangtuanya). Dalam memberikan pelayanan yang prima dengan tugas produksi; yang memberikan jaminan mutu terhadap layanan proses bagi, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah memiliki Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sangat memadai. Dalam proses pembelajaran, disamping dosen tetap juga melibatkan beberapa dosen dari industri.

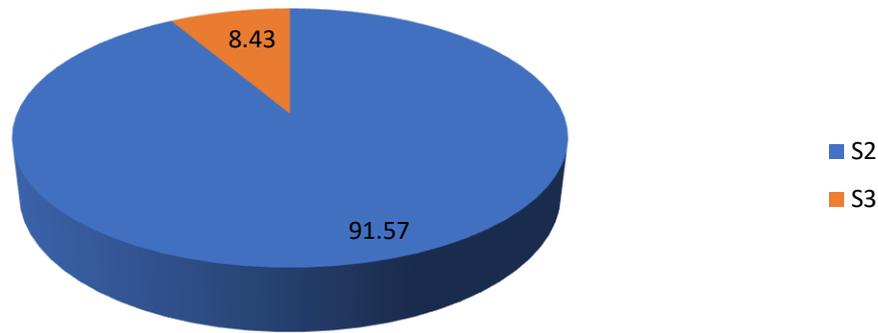
Secara komprehensif, jaminan kualitas SDM juga dapat dicermati dari keberhasilan mahasiswa lulus (sebagai A.Md.T. atau S.Tr.T., untuk prodi D4 MB gelar S.Tr.M.) dan lolos berkompetisi dan/atau memulai karir yang sesuai (proposional). Tidak dipungkiri, pemetaan (benchmark) alumni merupakan bahan yang cukup representatif untuk menganalisa kualitas SDM yang dimiliki PPNS. Sangat jelas, pengembangan manajemen PPNS pada aspek SDM ini menuntut kepedulian yang serius; mengingat SDM sebagai aset, pelaku dalam pendidikan yang menjadi bisnis utama, pengembang dalam kaitannya dengan keberlanjutan lembaga, serta pengelola institusi. Saat ini di PPNS, dosen sebagai kekuatan utama memiliki pola populasi yang kurang menguntungkan (berbentuk guci belum piramida); sehingga perlu dibangun strategi agar tidak terjadi kekosongan dalam sistem manajemen yang dibangun. Secara kepangkatan, SDM PPNS masih gemuk Asisten Ahli. Sebagai konsekuensi, PPNS harus lebih berani lagi memberikan stimulasi pengembangan SDM, dosen khususnya.

Adapun distribusi dosen PPNS berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

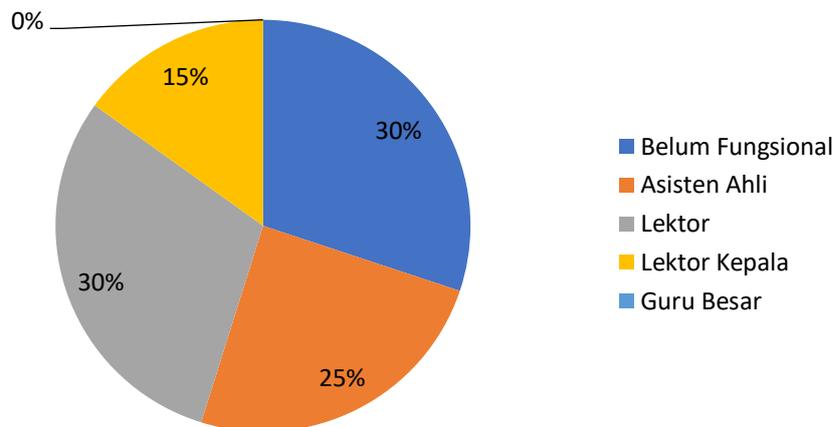


Gambar 1.13. Distribusi Prosentase dosen berdasarkan jenis kelamin Tahun 2019

Berikut data distribusi Dosen berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan fungsional yang dimiliki untuk masing-masing prodi.

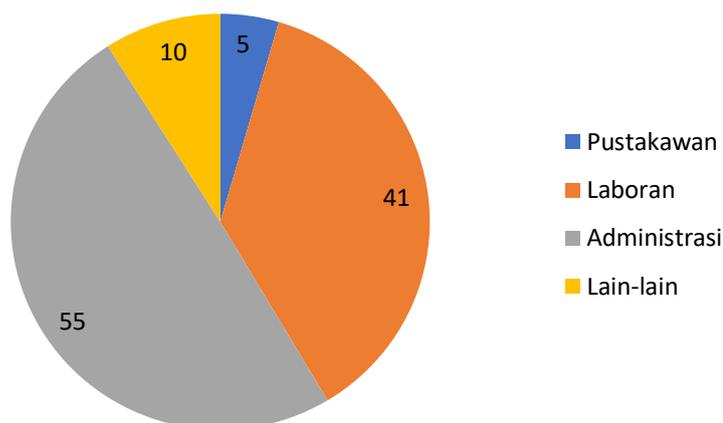


Gambar 1.14. Distribusi Prosentase Jenjang Pendidikan Dosen PPNS Tahun 2019

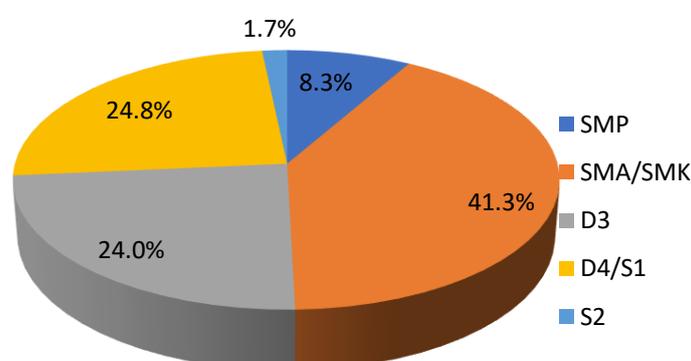


Gambar 1.15. Distribusi Jabatan Fungsional Dosen PPNS Tahun 2019

Karyawan merupakan aset SDM yang tidak kalah penting peran-sertanya dalam menghasilkan lulusan berkualitas. Kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, misal sistem administrasi jurusan dan laboratorium di dalamnya ada tuntutan kompetensi pemakaian komputer; filling system; database; internet dan intranet, website system, notulensi; pelaporan dan sebagainya. SDM pustakawan, teknisi, laboran memiliki indikator kompetensi yang spesifik relevan dengan bidang dan tugas yang ditekuni. Semua indikator ini perlu diterapkan untuk analisis kualitas dan penjaminan mutu SDM PPNS. Berikut data distribusi Tenaga Kependidikan berdasarkan fungsional/tugas dan jenjang pendidikan tenaga kependidikan di PPNS.



Gambar 1.16. Distribusi jumlah Fungsional Tenaga Kependidikan PPNS Tahun 2019



Gambar 1.17. Prosentase jenjang akademik Tenaga Kependidikan PPNS Tahun 2019

1.2.1.5 Organisasi, Tata Kelola dan Sistem Penjaminan Mutu

Hingga akhir tahun 2019, PPNS menerapkan pola manajemen sesuai dengan PP 60/1999. Direksi, merupakan jajaran manajemen eksekutif terdiri dari seorang pejabat Direktur yang dilengkapi dengan 3 orang Wakil Direktur yang terdiri dari: Bidang Akademik, Umum & keuangan dan Kemahasiswaan. Dalam pengelolaan administrasi dalam proses pendidikan, PPNS memiliki 3 Ketua Jurusan yang masing-masing dibantu oleh seorang sekretaris jurusan. Secara teknis, setiap jurusan mengelola beberapa program pendidikan bidang tertentu yang dibantu oleh: koordinator program studi yang mengelola program studi; beberapa kepala laboratorium/bengkel/studio yang mengelola kegiatan laboratorium/bengkel/studio, serta beberapa ketua kelompok bidang keahlian tertentu yang terdiri dari beberapa dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Laboratorium dan

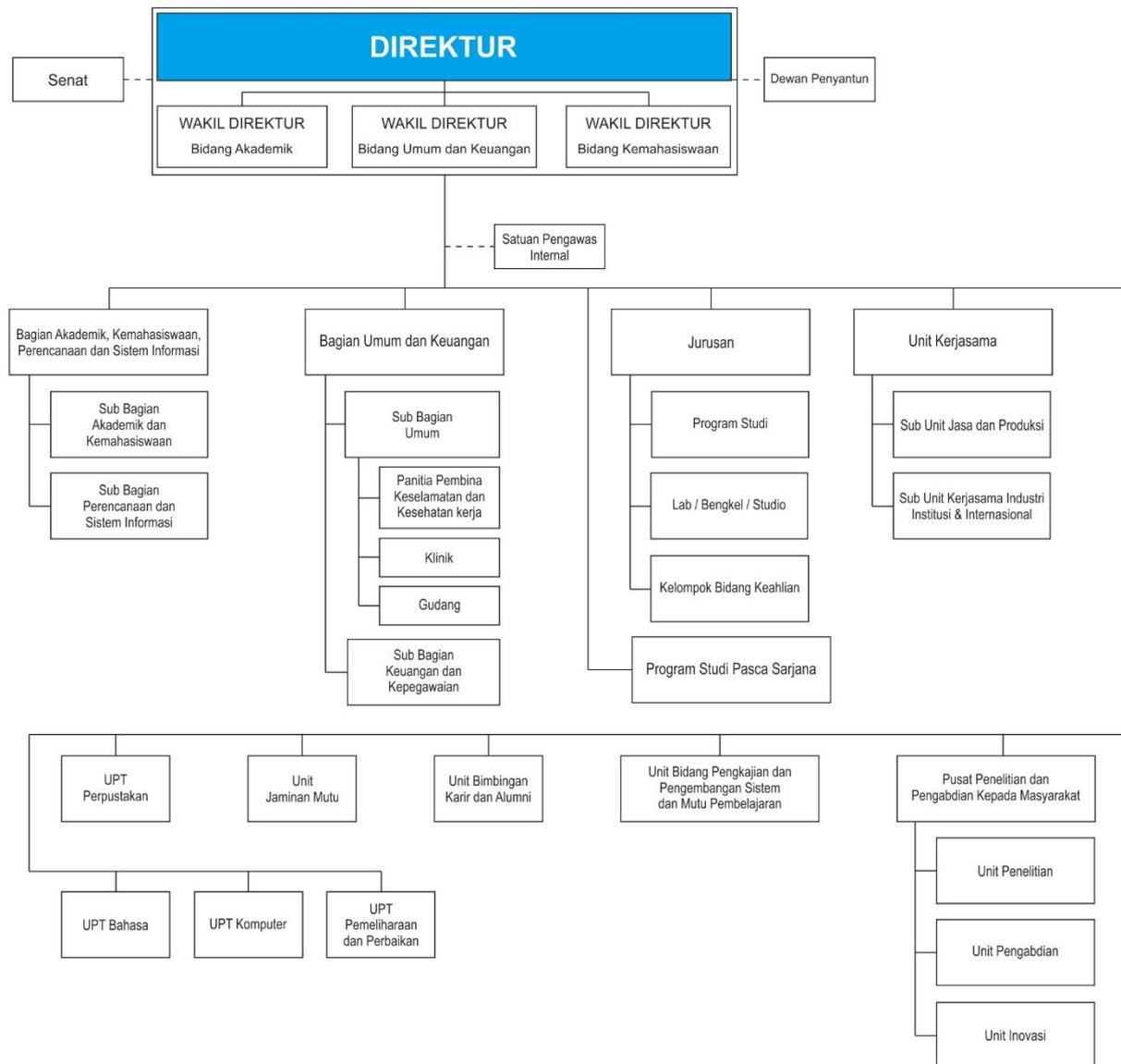
bengkel diharapkan menjadi basis profesi dosen sesuai dengan kelompok bidang keahlian yang dimiliki; khususnya berkaitan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang menjadi bagian tak terpisahkan bagi dosen dalam menjalankan tugas profesinya.

Pengelolaan administrasi lembaga di PPNS saat ini masih terdiri dari 2 Bagian (BAKPSI dan BUK) yang dibantu masing-masing 2 Sub-bagian. Sangat diyakini, perkembangan PPNS 4 tahun kedepan terjadi pertumbuhan jumlah *student body* melalui peningkatan kapasitas program studi yang sudah ada, penambahan jumlah program studi baik dalam jenjang Sarjana Terapan maupun Magister Terapan. Perkembangan jumlah *student body*, dosen, maupun karyawan membuka peluang bagi PPNS untuk menumbuhkan unit operasional administrasi lembaga; bermakna eselonisasi PPNS meningkat.

Saat ini, PPNS telah memiliki IAB (Industrial Advisory Board) yang merupakan domain komunitas industri yang memiliki kepedulian terhadap potensi dan peran serta PPNS dalam pendidikan anak bangsa. Komunitas ini berperan sebagai sumber informasi yang terkait dengan perkembangan dalam beberapa aspek khusus, antara lain tingkat kebutuhan kompetensi tenaga kerja, teknologi baik dalam bentuk *hardware* maupun *software* yang dibutuhkan dan digunakan dalam industri, berbagai isu yang terkait dengan peraturan/regulasi dalam proses produksi, kesempatan bagi mahasiswa dalam melakukan program magang (*On The Job Training*), kesempatan melakukan penelitian bersama baik untuk mahasiswa maupun dosen. Berbagai sumber informasi yang ada akan dibahas bersama dalam suatu pertemuan yang dilaksanakan minimal setahun sekali, yang akan digunakan untuk program pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi dosen serta peningkatan fasilitas praktek yang mendekati dengan kebutuhan industri.

Untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi kondisi internal PPNS sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu yang kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan (sarana/prasarana, pengelola, kepemimpinan, maupun proses kelebihan dan dampak) PPNS dilakukan melalui sistem penjaminan mutu yang dikelola oleh Unit Penjaminan Mutu, sedangkan untuk penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Sistem penjaminan mutu internal sesuai acuan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Ditjen Dikti baru sampai tahap sosialisasi. Mengingat fungsi dan tujuan penjaminan mutu sebagai suatu hal yang sangat menentukan kinerja, maka PPNS perlu memperkuat

unsur yang menangani penjaminan mutu diharapkan unit kerja yang melaksanakannya bisa dikembangkan menjadi Pusat. Adapun bagan organisasi yang menggambarkan pola tata kelola organisasi yang sedang berjalan saat ini dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.18. Struktur Organisasi di PPNS

1.2.1.6 Sarana dan Prasarana

PPNS menempati area kampus di lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS). Bangunan yang definitif dipergunakan mencakup gedung Direktorat; Kantor BAAK dan Perkuliahan; Laboratorium dan Bengkel; Theater; UPT Perawatan dan Perbaikan; Teleconference; Pusat Kegiatan Mahasiswa; Masjid; Guest House dan Music Studio. Beberapa gedung direncanakan sebagai upaya mengembangkan prasarana sesuai dengan standar yang dibutuhkan PPNS; namun sebagian belum terselesaikan dan/atau dimulai

pembangunannya; antara lain untuk kantor manajemen (dibutuhkan untuk membangun citra kelembagaan bagi publik eksternal), perkuliahan (dibutuhkan karena ada pengembangan program studi), GOR (kegiatan extra dan ko-kurikuler). Akses antar gedung belum seluruhnya terhubung; dimasa akan datang, PPNS perlu merencanakan koridor penghubung yang memudahkan akses dan menunjang kegiatan sivitas akademik. Tabel 1.9 dan 1.10 memperlihatkan data rinci prasarana yang dimiliki PPNS.

Tabel 1.9. Data bangunan gedung yang digunakan PPNS

No	Nama Gedung / Ruang	Luas (m ²)	Keterangan
1	Ruang administrasi / Perkantoran	1.912,63	Kantor manajemen, Direktur, Wadir dan Ka/Sek Jurusan
2	Ruang kuliah	3.434,48	Ruang kuliah (51 kelas)
3	Laboratorium	7.851,91	Praktikum & Riset (43 ruang)
4	Ruang Studio	80,00	Studio Musik
5	Ruang sekretariat kegiatan mahasiswa	743,00	Sekretaris Hima & UKM
6	Ruang serba guna	9.961,43	Ruang sidang & pertemuan
7	Masjid	724,50	Kapasitas 1000 orang
8	Ruang kerja Dosen	187,00	Dosen tetap (rata-rata 2,5 m ²)
9	Perpustakaan	232,50	Kapasitas 50 kursi baca dengan koleksi 11.362 eksemplar
10	Kantin	282,20	
11	Ruang percetakan	26,00	
12	Toilet	601,00	

Tabel 1.10. Data prasarana terbuka yang digunakan PPNS

No	Nama Prasarana	Luas (m ²)	Pemakaian
1	Lapangan Basket	500	Olah raga sivitas akademik
2	Lapangan Futsal	761	Olah raga sivitas akademik
3	Lapangan Volley Ball	166	Olah raga sivitas akademik
4	Parkiran	720	Parkir mobil & Motor
5	Kolam Uji Kapal	1600 (dalam 4 m)	Field Laboratory
6	Jalan internal kampus	625	Akses Internal
7	Plaza Terbuka	565	Open area * gathering
8	Wall Climbing	Tinggi 15 m	Mahasiswa pecinta alam

Untuk melaksanakan program, PPNS dilengkapi dengan sejumlah fasilitas laboratorium dan bengkel; selain ruang-ruang kelas dan aula/theater. Fasilitas ini dikelola jurusan-jurusan tertentu untuk melayani semua jurusan yang memerlukan sesuai tujuan kompetensi yang hendak dicapai. Saat ini, okupansi fasilitas tersebut telah mencapai 67% dari kapasitas waktu operasi untuk kegiatan belajar mengajar. Operasi lebih optimal masih memungkinkan dengan memperhatikan distribusi mata kuliah dari masing-masing kurikulum, metode belajar-mengajar, serta manajemen operasional lembaga. Tabel 1.11 memperlihatkan berbagai fasilitas laboratorium dan bengkel yang dimiliki PPNS.

Tabel 1.11. Data fasilitas lab/bengkel/studio masing masing prodi

No	Jurusan	Nama lab/bengkel/studio
1	Teknik Bangunan Kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium CAD 2. Studio Perencanaan 3. Bengkel Las & Sheet Metal 4. Bengkel Non Metal 5. Laboratorium Uji Bahan 6. Bengkel Konstruksi
2	Teknik Permesinan Kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bengkel Mesin Perkakas 2. Bengkel CNC 3. Laboratorium Reparasi Mesin & Motor Bakar 4. Laboratorium Fluida 5. Laboratorium Plumbing 6. Laboratorium Automatic Fire Extinguisher 7. Laboratorium Kimia 8. Laboratorium Ergonomi dan K3 9. Laboratorium Manajemen Bisnis 10. Galeri Investasi
3	Teknik Kelistrikan Kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laboratorium Mesin Listrik 2. Laboratorium Elektronika Daya dan Penggerak Listrik 3. Laboratorium Kontrol dan Mikroprosesor 4. laboratorium Reparasi Listrik 5. Laboratorium Fisika, Listrik Dasar dan Instrumentasi

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah menjalankan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai dasar penyusunan laporan aset Negara.

1.2.1.7 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas manajemen secara sektoral maupun integritis. Keberadaan sistem informasi manajemen ini juga menjadi bagian tak terpisahkan dengan perancangan sistem perencanaan program dan anggaran. Penyempurnaan sistem informasi diperlukan juga untuk pemberdayaan aset (fisik, SDM, finansial) secara optimal.

Sarana untuk menerapkan sistem informasi pada semua bidang didukung oleh LAN yang menjangkau 80% area kantor dan bengkel/laboratorium. Akan tetapi beberapa hal yang menjadi kelemahan masih ditemui: belum memiliki sistem back up data yang memadai untuk disaster recovery; belum memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan (DSS) dan sistem pelaporan untuk evaluasi diri; basis data antar unit masih belum standar; belum memiliki sistem keamanan jaringan yang memadai; belum memiliki SDM pengelola jaringan yang handal; belum semua dosen dan karyawan terbiasa dengan penggunaan sistem

informasi elektronik (email, dst); sementara sudah tersedia kapasitas bandwidth yang memadai.

1.2.2 Kondisi Eksternal

Globalisasi melahirkan iklim kompetisi yang sangat ketat. Perubahan berlangsung cepat menuntut penyesuaian yang sangat progresif. Kecermatan dalam mengantisipasi perubahan merupakan hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan bagi individu maupun NKRI mempertahankan diri sebagai bangsa yang mampu berperan aktif dalam kehidupan. Ditambah lagi, perkembangan teknologi juga berlangsung cepat mengimbangi perubahan yang menggelinding pesat disemua sektor kehidupan. Fenomena di atas merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan oleh anak bangsa serta Pemerintah NKRI. Kondisi geografis NKRI memberikan kekayaan alam yang berlimpah, dengan komposisi lautan yang mendominasi wilayahnya. Tidak dapat dipungkiri, masa depan bangsa ini sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia Indonesia mengelola potensi alamnya (termasuk kelautan) yang ada melalui orientasi pembangunan sektor maritim secara lebih proporsional. Namun, keberhasilan ini juga sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan SDM Indonesia menguasai teknologi yang terkait dengan berbagai kegiatan di sektor maritim.

Pemotretan terhadap kondisi eksternal yang dilakukan meliputi berbagai bidang yaitu Ekonomi; Transportasi; Sosial, Politik dan Pertahanan Keamanan; Ketenaga kerjaan; Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan.

- a) Ekonomi.
- b) Transportasi.
- c) Sosial, Politik dan Pertahanan Keamanan.
- d) Ketenaga Kerjaan.
- e) Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan.

1.2.2.1 Ekonomi

Memasuki lima tahun ke 3, era reformasi dihadapkan pada problem ekonomi-sosial yang makin kompetitif. Bergulirnya fase era global mendesak sektor ekonomi lebih selektif terhadap keterlibatan sumber daya manusia. Ketersediaan yang tinggi memberikan konsekuensi pemilihan yang tidak mudah; sehingga peningkatan standar secara alamiah terjadi. Masyarakat akhirnya dihadapkan pada pilihan pahit yang harus disikapi dengan

realistis. Inflasi bukan perih yang mengejutkan; termasuk bagi Indonesia yang mencoba bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, musibah-musibah alam telah menjadi tambahan beban ekonomi nasional untuk bertahan pada *quality of life* yang konstan; penurunan tidak dapat dihindari. Beberapa kantong wilayah miskin terus tumbuh, walaupun dalam pandangan positif, kondisi ini memberikan keuntungan yang signifikan terhadap masyarakat yang kreatif dan jujur. Secara ekonomi, kelompok ini mampu *survive*; dan melanjutkan bisnis secara pas-pasan. Peningkatan nilai investasi yang diperlukan sangat relevan dengan bidang yang digeluti; sehingga di berbagai lini pasar (di kota khususnya) menjadi lebih aktif dalam menjalankan roda ekonomi.

Pengelolaan potensi laut berupa kekayaan hayati, minyak dan gas dapat menjadi sumber devisa yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Potensi sungai, laut, dan danau di berbagai wilayah NKRI memungkinkan dikembangkan menjadi sentra kegiatan ekonomi; serta sarana transportasi air yang mudah dan murah. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah, ekonomi dapat tumbuh pesat dipacu oleh dinamika serta daya kreatifitas generasi bangsa. Pemberdayaan melalui intensifikasi industri kecil dan menengah di sektor kelautan (perikanan, budi daya rumput laut, hingga wisata bahari) perlu dicanangkan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

1.2.2.2 Transportasi

Buruknya sarana transportasi nasional mempersulit aktivitas ekonomi nasional, distribusi barang jadi terganggu akibatnya disparitas harga produk dan jasa sangat tinggi di berbagai wilayah NKRI. Kondisi tersebut belum diimbangi dengan peningkatan infrastruktur yang merata diseluruh bentangan Nusantara. Dibeberani dengan musibah alam, sektor transportasi potensial menjadi *handicap* dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Keterlibatan operator asing dalam operasi ekspedisi barang membuat biaya transport cukup mahal; walaupun keberadaan perusahaan asing memiliki nilai positif untuk bersaing secara rasional dalam mutu internasional.

Secara geografis, banyak daerah di Indonesia yang dapat dicapai lebih cepat dengan transportasi sungai, laut maupun danau dibandingkan melalui transportasi darat. Sebagai konsekuensi, infrastruktur dan moda perlu dipersiapkan secara matang dan jujur. Sehingga, pengendalian harga secara realistis dapat dilakukan karena didukung aliran komoditi yang lancar menggunakan jalur air (sungai, danau, maupun laut). Pengerahan dan pemberdayaan

Armada Semut yang terdiri dari kapal ikan kecil dan menengah dalam jumlah besar diharapkan mampu mengelola kekayaan alam laut sekaligus menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang sebagian besar berupa lautan.

1.2.2.3 Sosial, politik dan pertahanan keamanan

Intruksi budaya asing, konflik berbasis wilayah yang melibatkan kelompok pribumi dan pendatang menjadi pemicu terganggunya pengamanan Negara dan Bangsa. Perambahan serta eksplorasi tak terkendali terhadap sumberdaya alam bernuansa pengembangan ekonomi yang penuh muatan politis memicu kerawanan wilayah dan melemahkan pertahanan bangsa, khususnya masyarakat akar-rumput. Kesenjangan sosial-ekonomi melengkapi pemicu kerawanan di banyak wilayah yang sebelumnya sudah aman tenteram. *Job-less* atau pengangguran yang potensial meningkat karena pertahanan berbagai sektor industri yang lemah; sehingga PHK (Putus Hubungan Kerja) tumbuh pesat. Kondisi ini menuntut respon yang bijak dari pemerintah sebagai regulator yang memiliki otoritas manajemen Negara. Tatanan, komitmen, dan kejujuran selayaknya sesuai dengan pemikiran dan diikuti dengan tindakan yang konsisten dan sustain.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan masyarakat maritim jelas akan meningkatkan eksistensi, wibawa dan kedaulatan NKRI. Batas wilayah NKRI yang sebagian besar adalah lautan dapat secara aktif dimonitor melalui aktivitas kemaritiman nasional yang padat berkualitas. Dalam cakupan daerah yang sangat luas, situasi ini dapat membantu TNI Angkatan Laut mengamankan wilayah NKRI. Tuntutan yang faktual adalah percepatan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah NKRI merupakan modal utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bersatu, sejahtera, adil dan makmur.

Dalam kaitan dengan pendidikan tinggi vokasi hingga saat ini minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi vokasi belum bisa bergeser ke peringkat pertama. Kebutuhan akan pengakuan berupa gelar yang sebenarnya sudah diakomodasi dengan ketentuan gelar S.ST (Sarjana Sains Terapan) bagi lulusan D4 dan A.Md (Ahli Madya) bagi lulusan D3 belum juga mampu mengubah opini dan minat masyarakat. Sebagai konsekuensi, sosialisasi program pendidikan vokasi perlu didukung lebih nyata oleh pemerintah pusat maupun daerah.

1.2.2.4 Sumber daya manusia

Situasi tingkat *job-less* yang tinggi memicu peningkatan standar kebutuhan SDM. Sebagai konsekuensi, persaingan menjadi perih yang menakutkan bahkan mengerikan bagi generasi muda yang tidak pernah siap. Tidak dipungkiri, pengembangan pendidikan tinggi menuntut penjaminan kualitas lulusan; sekali lalai, memungkinkan 2-3 generasi berikutnya bisa hilang kualitas. Tantangan bagi Perguruan Tinggi (PT), termasuk institusi Politeknik harus mampu menghasilkan SDM berkualitas yang kompetitif secara global.

Ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia berkualitas (kompeten dan berbudiluhur) di bidang maritim masih sangat minim; terutama untuk mengisi berbagai posisi jabatan pada bidang manufaktur perkapalan dan struktur apung lainnya. PPNS (Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya), sebagai salah satu PT yang fokus pada teknologi perkapalan dan industri rantai pendukungnya sangat berupaya dan bekerja keras merealisasikan fungsi dan peran dalam penyediaan SDM serta penelitian aplikasi teknologi di bidang kemaritiman yang berkualitas. Partisipasi dan kebersamaan komunitas pendidikan tinggi, khususnya politeknik, menjadi tumpuan NKRI memberdayakan potensi kelautan serta penyediaan SDM bermutu sebagai generasi penerus bangsa.

1.2.2.5 Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa tahun belakangan ini, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan tinggi vokasi sangat menonjol. Hal ini bisa dilihat dengan bergulirnya hibah penguatan politeknik serta pendirian politeknik baru di beberapa daerah. Bagi PPNS, hal ini menjadi peluang yang luar biasa untuk melakukan percepatan dalam perjalanan menuju pencapaian visi lembaga. UU no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang dilengkapi dengan Peraturan Mendiknas No. 42 tahun 2007 tentang sertifikasi dosen merupakan perangkat hukum yang sangat signifikan dalam mendukung kualitas sumber daya manusia, khususnya dosen. Kriteria profesional seorang dosen yang dijabarkan pada uraian kompetensi dengan cakupan yang luas menjadi kekuatan lembaga dalam memotivasi dosen untuk meningkatkan kemampuan.

1.3 SWOT ANALYSIS

Berdasarkan hasil pemotretan yang telah diuraikan di atas terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, selanjutnya dilakukan SWOT Analysis untuk menentukan rencana strategi yang tepat dalam program pengembangan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dalam tahun 2020 – 2024.

Berdasarkan uraian pada bagian diatas maka analisa SWOT dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.3.1 Pendidikan

1.3.1.1 Kekuatan

- a) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya merupakan satu-satunya Politeknik negeri yang ada di Indonesia yang total memberikan layanan pendidikan dibidang perkapalan dan industri pendukungnya sehingga memberi peluang menjadi rujukan untuk pengembangan bidang perkapalan seluas-luasnya.
- b) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya termasuk salah satu dari 6 Politeknik yang mempunyai akreditasi Institusi A dari total sebanyak 40 Politeknik Negeri yang ada di Indonesia
- c) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang menjadi corporate member dari Royal Institute of Naval Architecture (RINA) yang terdiri dari 126 negara sebagai anggotanya.
- d) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang telah mendapatkan Academic Award dari World Safety Organization (WSO)
- e) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan industri yang bertindak sebagai anggota Dewan Penasehat dari Industri, dalam usaha pengembangan dan peningkatan kualitas PPNS.
- f) Kebijakan yang mewajibkan sertifikasi kompetensi untuk lulusan, dalam meningkatkan nilai jual lulusan pada dunia kerja
- g) Prosentase kehadiran Dosen dalam mengajar diatas rata-rata (>95%)
- h) Program teaching factory mendukung keberlanjutan peningkatan kualitas lulusan.
- i) Pelaksanaan On The Job Training di perusahaan satu semester sehingga mahasiswa memahami aplikasi ilmu dan perkembangan teknologi di Lapangan
- j) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki 14 program studi yang spesifik dan saling melengkapi semua aspek untuk pelaksanaan penelitian, pengabdian dan kerjasama di bidang perkapalan dan teknologi penunjangnya.
- k) Terbentuknya LSP P1 PPNS dengan 42 skema kompetensi yang memberikan sertifikat kompetensi BNSP bagi semua lulusan dan partner kerjasama PPNS.

1.3.1.2 Kelemahan

- a) Belum adanya kerjasama / keterlibatan dari industri / institusi luar negeri atau tenaga asing dalam penyusunan / evaluasi terhadap kurikulum dari semua program studi.
- b) Bentuk-bentuk kegiatan akademik lainnya seperti ekshibisi atau pameran hasil-hasil penelitian dan karya mahasiswa perlu lebih diperbanyak
- c) Terbatasnya waktu untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler akibat beban perkuliahan yang tinggi
- d) Program studi dengan akreditasi B masih lebih banyak di banding yang dapat A.

1.3.1.3 Peluang

- a) Adanya prioritas pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi
- b) Adanya prioritas pembangunan maritim yang di ikuti oleh prioritas penelitian, pengabdian dan kerjasama di bidang maritim
- c) Adanya kerjasama dengan institusi / perguruan tinggi luar negeri seperti JWES, RINA, Kunsan University, Taiwan, Malaysia dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sehingga membuka peluang kerjasama yang luas berkaitan dengan bidang perkapalan dan industri penunjangnya
- d) Pertemuan rutin minimal satu tahun sekali melalui Industrial Advisory Board dalam pengembangan dan peningkatan kualitas PPNS
- e) Tingkat kepercayaan dari masyarakat yang masih tinggi, terbukti dengan rasio peminat yang mengikuti seleksi dengan daya tampung rata-rata 1 : 10,7.

1.3.1.4 Ancaman

- a) Rencana beberapa perguruan tinggi lain yang ingin membuka program studi seperti yang ada di PPNS.
- b) Sikap masyarakat yang masih lebih mempercayai Pendidikan jalur akademik dibanding vokasi.
- c) Kemajuan teknologi yang pesat belum berimbang terhadap perubahan kurikulum
- d) Mahalnya biaya pendidikan vokasi dan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, menjadi ancaman untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas

1.3.2 Penelitian dan pengabdian pada masyarakat

1.3.2.1 Kekuatan

- a) Alokasi pendanaan untuk bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat semakin meningkat
- b) Terbentuknya LSP P1 PPNS dengan 60 skema kompetensi yang ada mampu memberikan sertifikasi kompetensi lulusan yang diakui oleh BNSP sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan dunia industri terhadap lulusan
- c) Program Pelatihan dan Sertifikasi yang rutin setiap tahun dalam skala nasional dan internasional seperti, Welding Engineer, Welding Inspector, Welder Certificate, Ahli K3 Umum, PLC, dan lain-lain bagi masyarakat umum
- d) Semua dosen mempunyai sertifikat kompetensi sesuai keahliannya sehingga mampu menyediakan berbagai jasa konsultasi, desain dan produksi bagi industri.

1.3.2.2 Kelemahan

- a) Jumlah aktivitas pengabdian masyarakat khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat industri maritim masih sangat kurang.

1.3.2.3 Peluang

- a) Besarnya potensi pengembangan industri perkapalan di Indonesia memberikan peluang pengembangan penelitian oleh dosen-dosen di lingkungan PPNS.
- b) Banyaknya program –program pendanaan penelitian membuka peluang untuk melakukan penelitian lebih luas
- c) Otonomi daerah turut meningkatkan peluang untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan sumber dana dari PEMDA
- d) Tingginya potensi pasar bagi produk-produk kapal kecil maupun komponen kapal yang dapat dimanfaatkan oleh PPNS sebagai sumber dana baru
- e) Tersedia dana penelitian kompetitif yang dapat digunakan penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa

1.3.2.4 Ancaman

- a) Banyaknya bermunculan lembaga penyedia pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi meningkatkan persaingan diantara penyedia jasa termasuk PPNS
- b) Produk impor yang murah dalam persaingan global mengancam inovasi penelitian, pengabdian, dan kerjasama yang baru tumbuh

1.3.3 Mahasiswa dan Alumni

1.3.3.1 Kekuatan

- a) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah menyediakan berbagai layanan mahasiswa meliputi bimbingan dan konseling, kegiatan ekstra kurikuler, pembinaan soft skill, beasiswa, kesehatan dan kerohanian
- b) Prosentase kehadiran perkuliahan dan kelulusan tepat waktu tinggi dengan prosentasi mahasiswa yang putus kuliah/mengundurkan diri cukup rendah, 3,6%
- c) Prestasi mahasiswa diajang kompetisi lokal, nasional sampai internasional dalam bidang teknologi pengelasan, otomasi, CNC, K3, PLC dan perkapalan
- d) Adanya keterlibatan alumni dalam proses pembelajaran sehingga adanya umpan balik permasalahan yang dibutuhkan oleh industri
- e) Sebaran mahasiswa berasal dari hampir seluruh propinsi di Indonesia

1.3.3.2 Kelemahan

- a) Kemampuan lulusan dalam berbahasa asing (Inggris, Korea, atau lainnya) masih relatif rendah

1.3.3.3 Peluang

- a) Terbukanya kesempatan luas bagi PPNS untuk berperan pada level nasional karena arah kebijakan pembangunan pemerintah pada bidang kemaritiman
- b) Tingginya kepercayaan masyarakat dan instansi pemerintah/swasta pada PPNS dalam pendaftaran mahasiswa baru dan permintaan pelatihan dan sertifikasi.
- c) Masih tingginya kebutuhan masyarakat dan industri dalam peningkatan kualifikasi individu baik dalam bentuk pelatihan maupun sertifikasi kompetensi.

1.3.3.4 Ancaman

- a) Adanya pemberlakuan kebebasan tenaga asing bekerja di Indonesia merupakan tantangan bagi PPNS dalam menghasilkan lulusan yang mampu bersaing.
- b) Globalisasi yang mengancam keberadaan industri asing di Indonesia, menuntut PPNS untuk dapat menyediakan lulusan yang siap bersaing secara global
- c) Keberadaan koneksi global pada sisi lain justru merupakan ancaman berupa masuknya informasi-informasi yang bersifat negatif dan merusak mahasiswa.

1.3.4 Sumber Daya Manusia

1.3.4.1 Kekuatan

- a) Kebijakan dosen wajib memiliki pengalaman industri sehingga materi perkuliahan sesuai dengan penerapan teknologi di industri.
- b) Sebagian besar dosen sebagai pengurus / anggota asosiasi profesi, baik nasional maupun internasional seperti API, Ahli K3 dan RINA.
- c) Beberapa dosen telah memiliki sertifikat kompetensi keahlian dalam skala nasional, regional dan internasional.
- d) Melalui program hibah TPSDP, PEDP dan Revitalisasi Politeknik sangat mendukung keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

1.3.4.2 Kelemahan

- a) Prosentase dosen yang berpendidikan S3 masih relatif kecil sekitar 7.5%

1.3.4.3 Ancaman

- a) Adanya pemberlakuan kebebasan tenaga asing bekerja di Indonesia merupakan tantangan bagi staf PPNS untuk dapat mengembangkan diri dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan tenaga asing.
- b) Rekrutmen SDM baik dosen maupun tendik masih tergantung dari jumlah formasi yang tersedia dari pusat.

1.3.5 Organisasi, Tata Kelola & Sistem Penjaminan Mutu

1.3.5.1 Kekuatan

- a) Setiap unit di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki sasaran mutu yang jelas sehingga kinerja unit bisa diukur dengan baik
- b) Pengambilan keputusan yang transparan dan efektif didahului dengan hasil evaluasi dan ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) yang melibatkan seluruh pihak terkait
- c) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki sistem pengelolaan keuangan melalui satu pintu, memungkinkan untuk pemanfaatan anggaran secara optimal
- d) Tersedianya mekanisme dan dokumen perencanaan, pengelolaan, dan monev dari penggunaan dana yang dilaksanakan secara rutin dan bertanggung jawab

-
- e) Setiap unit di PPNS hingga unit terkecil yaitu program studi dilibatkan dalam perencanaan penerimaan dan pengelolaan dana
 - f) Struktur organisasi dan tata kelola dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di PPNS terdefinisi dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik
 - g) Institusi memiliki komitmen yang kuat terhadap mutu yang dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Audit Mutu Eksternal (AME)
 - h) Adanya MoU dengan industri, PEMDA, alumni serta asosiasi
 - i) Adanya pedoman, instuksi kerja untuk aktivitas pada setiap unit
 - j) Memiliki unit penjaminan mutu (UPM) dan prosedur penjaminan mutu serta audit internal yang melakukan evaluasi program secara rutin melalui proses monitoring dan evaluasi
 - k) Memiliki auditor mutu akademik dan non akademik internal yang merupakan bagian dari unit penjaminan mutu
 - l) Tersedianya prosedur baku terkait kode etik untuk dosen dan tenaga kependidikan

1.3.5.2 Kelemahan

- a) Sumber dana masih tergantung pada dana dari pemerintah dan dana dari masyarakat / mahasiswa, sedangkan hasil usaha PPNS sendiri masih sangat kecil

1.3.5.3 Peluang

- a) Disahkannya Permen No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi politeknik ada di dalamnya
- b) Terdapat bimbingan teknis pelaksanaan penjaminan mutu oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- c) Perkembangan ICT mendukung pengelolaan manajemen institusi pendidikan tinggi yang makin efektif dan efisien

1.3.5.4 Ancaman

- a) Kebijakan pemerintah terhadap kemandirian Politeknik untuk mengurangi secara berkala tingkat ketergantungan dana dari pemerintah dan dana dari masyarakat / mahasiswa, sedangkan dana dari usaha PPNS sendiri masih sangat kecil

1.3.6 Sarana Dan Prasarana

1.3.6.1 Kekuatan

- a) PPNS memiliki fasilitas dan kapasitas untuk produksi layaknya industri serta pengalaman dalam jasa pelatihan, pengujian dan sertifikasi kompetensi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan sumber dana baru bagi PPNS
- b) PPNS sebagai Pusat Unggulan Teknologi dalam pembangunan kapal-kapal kecil
- c) Potensi skill dan peralatan bengkel dapat ditingkatkan untuk pemanfaatan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang disinergikan dengan pelaksanaan pendidikan berbasis produksi.
- d) Tempat kerja dosen sebagian besar berada di laboratorium dan bengkel sehingga lebih fokus dalam mengembangkan kompetensinya
- e) Telah tersedia sarana dan prasarana yang memadai dan terawat dengan baik untuk menunjang baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik
- f) Tersedianya Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang mengatur masalah perencanaan, pengadaan, penggunaan, perawatan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana di lingkungan PPNS
- g) RIP tahun 2015 – 2034 lengkap dengan aspek Sistem Informasi, Infrastruktur, Tata kelola dan Sistem Disaster Recovery
- h) Memiliki fasilitas lengkap yang mendukung kegiatan penelitian, pengabdian dan kerjasama
- i) Memiliki PUT kapal Kecil dan Menengah dengan SDM berkualifikasi doktor dari semua aspek di bidang perkapalan

1.3.6.2 Kelemahan

- a) Sebagian dari peralatan bengkel / laboratorium merupakan peralatan lama yang telah mengalami penurunan fungsi dan tingkat presisi
- b) Beberapa bengkel / laboratorium memiliki beban yang sangat tinggi sehingga memaksa perkuliahan dilakukan di malam hari

1.3.6.3 Ancaman

- a) Perkembangan teknologi perkapalan dan penunjangnya di dunia industri yang cepat menuntut adanya sarana dan prasarana yang representative.

1.3.7 Sistem Informasi

1.3.7.1 Kekuatan

- a) Tersedianya fasilitas internet bagi dosen, mahasiswa dan tendik dalam bentuk jaringan kabel dan nirkabel (wifi)
- b) Terdapat jaringan fiber 4 jalur utama dan 32 titik akses nirkabel menyebar di lingkungan PPNS
- c) Tersedia Bandwith yang relatif besar, 300 Mbps, dengan minimal tingkat ketersediaan layanan atau Service Level Agreement (LSA) sebesar 99%
- d) Disaster recovery system telah berupa co-location tahun 2017 sudah dapat direalisasi bekerjasama dengan Telkom dimana PPNS dapat meletakkan back up data pada data center milik Telkom
- e) Telah memiliki Decision Support System yang memungkinkan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat
- f) Seluruh civitas telah memanfaatkan sistem informasi dalam bentuk akses website atau android untuk memantau kehadiran, perkuliahan dan informasi-informasi lain.
- g) Tersedianya LAN pada beberapa laboratorium yang memungkinkan pemanfaatan software berlisensi yang hanya dapat di akses sesuai persyaratan lisensi.
- h) Sudah menggunakan aplikasi on-line di bidang perbendaharaan dan pelaporan keuangan yang diakui secara nasional

1.3.7.2 Kelemahan

- a) Sistem Informasi belum mengacu pada cyber security framework, sehingga resiko gangguan cybersecurity terhadap system dan data PPNS masih tinggi
- b) Belum semua proses terintegrasi, masih ada yang dilakukan dengan sistem terpisah

1.3.7.3 Peluang

- a) Pemanfaatan global connectivity devices (internet) memberikan kemudahan mahasiswa dan dosen untuk memperoleh informasi perkembangan teknologi terbaru sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar.
- b) Keberadaan koneksi global membuka peluang untuk memperkenalkan program studi pada level yang lebih luas terutama dalam memperkenalkan produk-produk dan penelitian yang dihasilkan baik oleh dosen maupun mahasiswa
- c) Teknologi Informasi dan IT literate civitas dan tendik semakin berkembang

-
- d) Tersedia dana-dana hibah yang dimungkinkan untuk digunakan meningkatkan infrastruktur dari Sistem Informasi PPNS

1.3.7.4 Ancaman

- a) Kebutuhan dana yang besar untuk perangkat Teknik informasi yang berkualitas.
- b) Cybersecurity yang semakin massif
- c) Maraknya cyber crime

Perubahan sistem pendidikan maupun kebijakan yang menuntut perubahan system informasi yang tidak mudah untuk segera direalisasi

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Sesuai dengan dokumen Statuta-OTK, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki visi:

“Menjadi Politeknik Unggul Bereputasi Global”

2.2 MISI

Dengan misi yang diemban antara lain :

1. Melaksanakan program pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (***professionalism - sustainability***);
2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (***good governance - professionalism***);
3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (***sustainability - professionalism***);
4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (***good governance - sustainability***); dan
5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (***moral value***).

2.3 TUJUAN

Tujuan dan misi PPNS merupakan keutuhan pernyataan yang mencerminkan fungsi dan peran institusi. Di jiwai dari UUD'45, PPNS meruntutkan tujuan institusi dalam 4 (empat) hal utama, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional yang sesuai dengan kebutuhan industri maritime dan industri penunjangnya;

2. Mengembangkan serta menyebarkan IPTEK kemaritiman dan penunjangnya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional;
3. Memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berdasarkan azas pemerataan dan keadilan;
4. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan industri, masyarakat dan instansi terkait.

Bagi PPNS, misi diperlukan untuk menjaga komitmen pencapaian visi lembaga dengan pasti, serta menjadi semangat dan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademik maupun tenaga kependidikan PPNS dalam berkreasi secara penuh tanggung jawab. Misi pertama merupakan pemberdayaan sivitas akademik untuk menghasilkan lulusan berkualitas; kedua mencerminkan komitmen profesi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang dikelola dengan transparan dan akuntabel. Misi ketiga memperlihatkan komitmen profesi sebagai jaminan kesejahteraan; dan keempat merefleksikan komitmen pengelolaan yang transparan dan akuntabel sebagai jaminan pendidikan berkualitas serta pencapaian kesejahteraan. Misi kelima merepresentasikan bahwa nilai moral merupakan hal yang melekat dalam setiap aspek yang dikembangkan di PPNS.

Realistis terhadap sejarah masa lalu serta situasi masa kini dan masa depan, PPNS memiliki komitmen mutu dalam kiprahnya. Sebagai lembaga PTN yang berorientasi pada pendidikan vokasi, komitmen tersebut dituangkan dalam slogan yang menjadi semangat dalam merealisasikan visi misi. Slogan tersebut disingkat menjadi SUCCESS, yaitu sebagai berikut:

- a) **S – Striving for Excelent** (berusaha menjadi yang terbaik) ;
Menetapkan target dan sungguh-sungguh berupaya mencapainya
- b) **U – Uncompromised Integrity** (integritas tanpa kompromi);
Mampu melaksanakan tugas dengan benar dan hasil yang terpercaya. Berpegang teguh dan selalu melaksanakan nilai-nilai institusi dalam segala aktivitas.
- c) **C – Conquering Problem with Innovation** (menyelesaikan masalah dengan inovasi); Memiliki semangat dan keingintahuan yang besar untuk belajar terus menerus dan selalu mencari beragam cara baru dalam menyelesaikan bermacam-macam masalah.

-
- d) **C – Consistently Discipline** (konsisten dalam berdisiplin);
Perilaku disiplin dapat menghindarkan karyawan untuk melakukan penyimpangan dari norma yang telah ditentukan oleh institusi.
- e) **E – Exceeding Costumer Expectation** (memberikan yang terbaik untuk kostumer); Membangun dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, mahasiswa, lulusan, dan mitra usaha serta berupaya untuk memahami kebutuhannya, dan menyediakan solusi yang dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan.
- f) **S – Synergistic Teamwork** (bekerjasama secara sinergi); dan
Mengembangkan kerjasama dan mampu menyampaikan informasi dengan jelas serta menyelesaikan perbedaan pendapat dengan komunikasi yang terbuka dengan kesadaran bahwa keberhasilan tim atau institusi tidak bergantung pada satu orang atau satu pihak saja.
- g) **S – Setting Down to Earth Result** (focus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan industry).
Lulusan diharapkan menguasai kompetensi kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berlaku di pasar kerja pada saat mahasiswa lulus.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang akan dicapai Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada kurun waktu 2020-2024 disesuaikan dengan Permendikbud RI No 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh PPNS selama periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Meningkatnya level akreditasi PPNS menjadi A (Unggul) di tingkat Nasional dan International
2. Meningkatnya ranking PPNS dalam pemeringkatan PT tingkat Nasional dan Internasional
3. Meningkatnya daya saing lulusan PPNS di era kompetisi global baik tingkat Nasional maupun Internasional
4. Meningkatkan peran serta langsung PPNS dalam mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya sektor kemaritiman dan industri pendukung kemaritiman.

-
5. Menciptakan iklim penelitian berbasis teknologi terapan, inovatif dan bersifat technopreneur
 6. Terwujudnya sistem organisasi yang berbasis *good governance Polytechnic*
 7. Meningkatnya kualitas kerjasama PPNS dengan stakeholder dalam kegiatan Tridharma

Sasaran yang akan dicapai oleh PPNS dijabarkan menjadi strategis pengembangan pada beberapa bidang yang relevan, mencakup: Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, Organisasi dan Tata Kelola, Sumberdaya Manusia, Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi, dan kerjasama.

2.4.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya level akreditasi PPNS menjadi A (Unggul) di tingkat Nasional dan Internasional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

1. Peningkatan kualitas mahasiswa baru
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana proses belajar mengajar
3. Pengembangan dan peningkatan kualitas metode belajar mengajar
4. Penjaminan mutu pendidikan
5. Penyelenggaraan Evaluasi proses belajar mengajar

2.4.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya ranking PPNS dalam pemeringkatan PT tingkat Nasional dan Internasional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

1. Pemutakhiran data pemeringkatan PT di tingkat Nasional dan Internasional

2.4.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya daya saing lulusan PPNS di era kompetisi global baik tingkat Nasional maupun Internasional. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

1. Peningkatan kualitas lulusan
2. Percepatan masa tunggu lulusan

2.4.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatkan peran serta langsung PPNS dalam mempercepat proses pembangunan Nasional, khususnya sektor kemaritiman dan industri pendukung kemaritiman. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat

2.4.5 Sasaran Strategis 5

Menciptakan iklim penelitian berbasis teknologi terapan, inovatif dan bersifat technopreneur. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

1. Peningkatan kualitas proses dan hasil penelitian
2. Publikasi karya ilmiah
3. Inisiasi Marine STP/Marine Edu Park Lamongan

2.4.6 Sasaran strategis 6

Terwujudnya system organisasi yang berbasis *good governance polytechnic* Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dalam rangka penguatan citra PPNS
2. Peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik
3. Pengembangan sistem informasi manajemen PPNS yang terpadu
4. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal berbasis manajemen resiko
5. Peningkatan kualitas manajemen kapasitas institusional
6. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial dan operasional relevan yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan
7. Pengembangan dan penerapan regulasi-regulasi yang mendorong keteraturan, ketertiban dan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada meningkatnya kualitas akuntabilitas dan layanan.

2.4.7 Sasaran strategis 7

Meningkatnya kualitas kerjasama PPNS dengan stakeholder dalam kegiatan Tridharma Untuk mencapai sasaran strategis tersebut direncanakan beberapa program antara lain:

-
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama pendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran
 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.5 PROGRAM UTAMA

Program Utama merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai strategis yang telah ditetapkan, yang indikator kinerja utama berupa outcome yang ditimbulkan dalam mendukung visi secara luas.

Capaian indikator kinerja utama outcome dapat diuraikan dengan penetapan selama kurun capaian tertentu yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Hal ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana strategis yang menyeluruh. Program utama dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Utama

No	MISI PPNS	TUJUAN PPNS	SASARAN PPNS	No	PROGRAM UTAMA	
1	M1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan & kesehatan kerja (professionalism-sustainability);	T3. Memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat berdasarkan azas pemerataan dan keadilan	S1. Meningkatnya level akreditasi PPNS menjadi A (Unggul) di tingkat nasional dan Internasional	P.1.1	Peningkatan kualitas mahasiswa baru	
				P.1.2	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Proses Belajar Mengajar	
				P.1.3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Metode Belajar Mengajar	
				P.1.4	Penjaminan mutu pendidikan	
				P.1.5	Penyelenggaraan Evaluasi Proses Belajar Mengajar	
2	M5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value).	T1. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang berstandar nasional dan/atau internasional yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim dan industri penunjangnya	S3. Meningkatnya daya saing lulusan PPNS di era kompetisi global baik tingkat nasional maupun internasional	P.2.1	Pemutakhiran data pemeringkatan PT di tingkat Nasional dan Internasional	
				P.3.1	Peningkatan Kualitas Lulusan	
3	M3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (<i>sustainability-professionalism</i>)	T2. Mengembangkan dan menyebarkan IPTEK kemaritiman dan penunjangnya melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.	S4. Meningkatkan peran serta langsung PPNS dalam mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya sektor kemaritiman dan industri pendukung kemaritiman	P.3.2	Percepatan Masa Tunggu lulusan	
				S5. Menciptakan iklim penelitian berbasis teknologi terapan, inovatif dan bersifat technopreneur	P.4.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat
					P.5.1	Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Penelitian
4	M2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, penunjang kemaritiman, serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (good governance-professionalism)	T4. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan industri, masyarakat dan instansi terkait.	S6. Terwujudnya sistem organisasi yang berbasis good governance polytechnic	P.5.2	Publikasi Karya Ilmiah	
				P.5.3	Inisiasi Marine STP/marine edu park lamongan	
				P.6.1	Peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik	
				P.6.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PPNS yang terpadu	
				P.6.3	Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis Manajemen Resiko	
				P.6.4	Peningkatan kualitas manajemen kapasitas institusional	
P.6.5	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Manajerial dan Operasional Relevan yang Menjamin Keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan					
P.6.6	Pelaksanaan kegiatan kehumasan dalam rangka penguatan citra PPNS					

				P.6.7	Pengembangan dan Penerapan Regulasi-regulasi yang Mendorong Keteraturan, Ketertiban dan Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang Mengarah pada Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas dan Layanan
5	M4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-sustainability).	T4. Mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan industri, masyarakat dan instansi terkait.	S7. Meningkatkan kualitas kerjasama PPNS dengan stakeholder dalam kegiatan tridharma	P.7.1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Pendukung Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran
				P.7.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tabel 2.2 Keterkaitan Sasaran, Program Utama, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program

No	SASARAN PPNS	No	PROGRAM UTAMA	KODE	KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	S1-PPNS.Meningkatnya level akreditasi PPNS menjadi A (Unggul) di tingkat nasional dan Internasional	P.1.1	Peningkatan kualitas mahasiswa baru	KP.1.1.2	Membangun sistem seleksi calon mahasiswa baru	IKP.1.1.2.1	Jumlah pendaftar
				KP.1.1.1	Melakukan promosi yang efektif, menarik dan tepat sasaran	IKP.1.1.1.2	Jumlah peminat
		P.1.2	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Proses Belajar Mengajar	KP.1.2.1	Meningkatkan dan memutakhirkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran	IKP.1.2.1.1	Jumlah peralatan
				KP.1.2.2	Meningkatkan koleksi perpustakaan (buku teks, jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding, majalah) spesifik penunjang keahlian/capaian pembelajaran program studi, e-library	IKP.1.2.2.1	Jumlah koleksi perpustakaan
				KP.1.2.3	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	IKP.1.2.3.1	Jumlah paket pengadaan
		P.1.3	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Metode Belajar Mengajar	KP.1.3.1	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK, dan metode blended learning	IKP.1.3.1.1	Jumlah media pembelajaran
				KP.1.3.2	Pengembangan kurikulum bertaraf internasional, dan respon terhadap revolusi industri 4.0	IKP.1.3.2.1	Jumlah Kurikulum & Silabus
						IKP.1.3.2.1.1	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.
				KP.1.3.3	Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum TEFA dan Dual System	IKP.1.3.3.1	Jumlah Kurikulum & Silabus TeFa
				KP.1.3.4	Membangun sistem pendidikan vokasi terintegrasi dan berjenjang	IKP.1.34.1	Jumlah Kurikulum Meme & RPL

				KP.1.3.5	Program Magister terapan	IKP.1.3.5.1	Jumlah Mahasiswa S2				
						IKPT.1.3.5.2	Persentase lulusan S2 Terapan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.				
						IKPT.1.3.5.3	Persentase lulusan S2 Terapan yang menghabiskan paling sedikit 10 (sepuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.				
						IKPT.1.3.5.4	Persentase program studi S2 Terapan yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. (asumsi: akan ada 2 prodi S2)				
						IKPT.1.3.5.5	Persentase mata kuliah S2 Terapan yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi				
				P.1.4	Penjaminan mutu pendidikan	KP.1.4.1	Pemenuhan Matriks Penilaian dokumen akreditasi BAN-PT	IKP.1.3.6	Penyelarasan pola pembelajaran TVET	IKP.1.3.6.1	Jumlah Kurikulum TVET
								IKP.1.3.7	Meningkatkan kualitas keahlian dosen dan tenaga laboran	IKP.1.3.7.1	Jumlah Dosen/laboran mengikuti pelatihan
								KP.1.4.2	Penyusunan dokumen akreditasi internasional	IKP.1.4.1.1	Jumlah Prodi Terakreditasi A
										IKP.1.4.1.1.1	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
										IKP.1.4.2.1	Jumlah Program Studi terakreditasi internasional
IKP.1.4.2.1.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.										
IKP.1.4.3	Penerimaan Mahasiswa asing dalam rangka pemenuhan international student ratio	IKP.1.4.3.1	Jumlah mahasiswa asing								
P.1.5	Penyelenggaraan Evaluasi Proses Belajar Mengajar	KP.1.5.1	Pelaksanaan UTS, UAS, Ujian Tugas Akhir	IKP.1.5.1.1	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PBM						
2	S2-PPNS. Meningkatnya ranking PPNS dalam pemeringkatan PT tingkat Nasional dan Internasional	P.2.1	Pemutakhiran data Untuk Peningkatan Tata Kelola Tridharma PTV di PPNS sesuai standar Nasional	KP.2.1.1	Meningkatkan konten dan aksesibilitas website PPNS	IKP.2.1.1.1	Jumlah artikel di website/bulan				
				KP.2.1.2	Intensifikasi pelaporan dan monitoring pada website/aplikasi terkait pemeringkatan PT	IKP.2.1.2.1	Nilai pemeringkatan PT				
3	S3-PPNS. Meningkatnya daya saing lulusan PPNS di	P.3.1	Peningkatan Kualitas Lulusan	KP.3.1.1	Membekali mahasiswa dengan uji kompetensi berstandar nasional/internasional	IKP.3.1.1.1	Persentase mahasiswa lulus uji kompetensi				

	era kompetisi global baik tingkat nasional maupun internasional			KP.3.1.2	Meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa (bahasa asing, komunikasi dan kepercayaan diri)	IKP.3.1.2.1	Persentase mahasiswa dengan Sertifikat TOIEC		
				KP.3.1.3	Peningkatan kemampuan lulusan dalam penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris	IKP.3.1.3.1	Persentase Mahasiswa menguasai Bahasa Asing selain Bhs Inggris		
				KP.3.1.4	Mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa	IKP.3.1.4.1	Jumlah kegiatan kemahasiswaan/th		
				KP.3.1.5	Memberikan reward/beasiswa kepada mahasiswa berprestasi (atau kurang mampu)	IKP.3.1.5.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa		
				KP.3.1.6	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa melalui Kuliah Tamu, Kunjungan Industri, dan Simulasi Pengembangan Ketrampilan dan Kepribadian	IKP.3.1.6.1	Jumlah kegiatan kunjungan industri dan kuliah tamu		
				KP.3.1.7	Pelaksanaan On the Job Training untuk membentuk lulusan yang siap kerja	IKP.3.1.7.1	Jumlah industri mitra OJT		
						IKP.3.1.7.1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.		
		P.3.2	Percepatan Masa Tunggu lulusan	KP.3.2.1	Melaksanakan kegiatan pelacakan alumni (tracer study)	IKP.3.2.1.1	Persentase hasil tracer study		
						IKP.3.2.1.1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.		
				KP.3.2.2	Pelaksanaan job fair dalam rangka meningkatkan keterserapan lulusan	IKP.3.2.2.1	Masa tunggu lulusan < dari 3 bulan		
				KP.3.2.3	Kerjasama penempatan dengan perusahaan dan penda	IKP.3.2.3.1	Jumlah mitra penempatan lulusan		
		4	S4. Meningkatkan peran serta langsung PPNS dalam mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya sektor kemaritiman dan industri pendukung kemaritiman	P.4.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat	KP.4.1.1	Meningkatkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat didanai DIPA	IKP.4.1.1.1	Jumlah Judul Pengabdian kepada masyarakat yang diterima
								IKP.4.1.1.1.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)
KP.4.1.2	Meningkatkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat didanai pihak luar					IKP.4.1.2.1	Jumlah judul pengmas didanai pihak luar		
KP.4.1.3	Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan masyarakat					IKP.4.1.3.1	Jumlah pelatihan		
KP.4.1.4	Mengadakan promosi kegiatan pelatihan					IKP.4.1.4.1	Jumlah peserta pelatihan		
KP.4.1.5	Peningkatan Jumlah Lab/Bengkel menjadi TUK					IKP.4.1.5.1	Jumlah TUK		

				KP.4.1.6	Sertifikasi Lab/Bengkel	IKP.4.1.6.1	Jumlah Lab/Bengkel tersertifikasi
				KP.4.1.7	Intensifikasi Pelaksanaan Jasa dan Produksi	IKP.4.1.7.1	Jumlah Mitra Jasa dan Produksi
5	S5-PPNS. Menciptakan iklim penelitian berbasis teknologi terapan, inovatif dan bersifat technopreneur	P.5.1	Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Penelitian	KP.5.1.1	Meningkatkan jumlah judul penelitian didanai dana dipa	IKP.5.1.1.1	Jumlah Judul Penelitian yang diterima
						IKP.5.1.1.1.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per Jumlah dosen.
				KP.5.1.2	Meningkatkan jumlah judul penelitian berorientasi HKI	IKP.5.1.2.1	Jumlah KI
				KP.5.1.3	Menyusun RENSTRA penelitian unggulan PPNS	IKP.5.1.3.1	Dokumen renstra
				KP.5.1.4	Penelitian kerjasama dengan industri	IKP.5.1.4.1	Jumlah industri mitra Penelitian
				KP.5.1.5	Pelaksanaan penelitian terapan berorientasi paten	IKP.5.1.5.1	Jumlah Paten
				KP.5.1.6	Inisiasi start up company melalui program CPPBT/PPBT	IKP.5.1.6.1	Jumlah start up
				P.5.2	Publikasi Karya Ilmiah	KP.5.2.1	Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dosen
		IKP.5.2.1.1.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per Jumlah dosen.				
		KP.5.2.2	Insentif jurnal nasional dan internasional			IKP.5.2.2.1	Jumlah judul penerima insentif
		KP.5.2.3	Pelaksanaan Seminar Ilmiah Nasional "Master"			IKP.5.2.3.1	Jumlah seminar
		KP.5.2.4	Penerbitan jurnal			IKP.5.2.4.1	Jumlah penerbitan jurnal/th
		P.5.3	Inisiasi Marine STP/marine edu park lamongan	KP.5.3.1	Penyusunan Perencanaan Marine STP Lamongan	IKP.5.3.1.1	Jumlah kegiatan inisiasi STP
				KP.5.3.2	Pembangunan	IKP.5.3.2.1	Jumlah STP
				KP.5.3.3	Penguatan tata kelola dalam rangka revenue Marine STP	IKP.5.3.3.1	Jumlah Revenue
6	S6-PPNS. Terwujudnya sistem organisasi yang berbasis good governance polytechnic	P.6.1	Peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik	KP.6.1.1	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan pendukung layanan akademik dan non akademik	IKP.6.1.1.1	Jumlah Pelatihan/Diklat Kompetensi
						IKP.6.1.1.1.1	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

		KP.6.1.2	Mengembangkan sistem layanan berbasis kepuasan pelanggan	IKP.6.1.2.1	hasil survei kepuasan layanan
		KP.6.1.3	Mengukur tingkat kepuasan layanan	IKP.6.1.3.1	Tingkat Kepuasan Layanan
		KP.6.1.4	Penguatan Unit Layanan Terpadu	IKP.6.1.4.1	Jumlah layanan/hari
		KP.6.1.5	Penguatan PPNS - Help Desk	IKP.6.1.5.1	paket kegiatan pemeliharaan
		KP.6.1.6	Pengembangan Kelengkapan Layanan dan Kerjasama Institusi	IKP.6.1.6.1	Jumlah Kegiatan Pengembangan Layanan
P.6.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PPNS yang terpadu	KP.6.2.1	Membangun SIM PPNS terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan	IKP.6.2.1.1	Jumlah aplikasi SIM
		KP.6.2.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang SIM PPNS	IKP.6.2.2.1	Jumlah peralatan
		KP.6.2.3	Pengembangan Database Institusi yang Terintegrasi	IKP.6.2.3.1	Pengembangan Database Institusi terintegrasi
P.6.3	Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis Manajemen Resiko	KP.6.3.1	Melakukan review dan update berkala SPMI dan perangkat SPMI terhadap perkembangan peraturan terkait penjaminan mutu	IKP.6.3.1.1	Laporan hasil review
		KP.6.3.2	Melakukan audit internal secara berkala	IKP.6.3.2.1	Laporan hasil audit
P.6.4	Peningkatan kualitas manajemen kapasitas institusional	KP.6.4.1	Menyusun program kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan berbasis evaluasi diri	IKP.6.4.1.1	Laporan hasil kegiatan
		KP.6.4.2	Menyusun rencana dan program kerja	IKP.6.4.2.1	Jumlah Kegiatan ED dan Penyusunan Renja
		KP.6.4.3	Melaksanakan audit mutu eksternal oleh lembaga independen secara rutin	IKP.6.4.3.1	Pelaksanaan akreditasi BAN-PT
		KP.6.4.4	Menyusun proposal BLU	IKP.6.4.4.1	Tersedianya Dok. BLU
		KP.6.4.5	Membudayakan safety, Health, and environment	IKP.6.4.5.1	Jumlah kegiatan
P.6.5	Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Manajerial dan Operasional Relevan yang Menjamin Keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan	KP.6.5.1	Rapat Kerja Penyusunan RBA, RKAK/L, dan Dokumen DIPA BLU	IKP.6.5.1.1	Jumlah kegiatan
		KP.6.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)	IKP.6.5.2.1	Tersedianya Dok. LAKIN
		KP.6.5.3	Penyusunan Laporan PDDIKTI	IKP.6.5.3.1	Pelaporan PDDIKTI
		KP.6.5.4	Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan yang Menjamin Terwujudnya Kegiatan Tridharma PT dan Operasional Kantor	IKP.6.5.4.1	Terwujudnya Kegiatan Tridharma PT & Operasional Perkantoran
		KP.6.5.5	Langganan Daya dan Jasa	IKP.6.5.5.1	Langganan Daya dan Jasa
		KP.6.5.6	Penyelenggaraan dan Peningkatan Layanan Poliklinik	IKP.6.5.6.1	Jumlah Paket Kegiatan Laayanan Poliklinik

				KP.6.5.7	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	IKP.6.5.7.1	Frekuensi Pembayaran Gaji (Bulan)		
				KP.6.5.8	Penyusunan Tarif	IKP.6.5.8.1	Tersedianya Tarif Standard Kegiatan		
				KP.6.5.9	Penyusunan Dokumen Remunerasi	IKP.6.5.9.1	Tersedianya Dok. Remunerasi		
				KP.6.5.10	Pengembangan Sistem Akuntansi	IKP.6.5.10.1	Jumlah Dok. Sistem Akuntansi		
				KP.6.5.11	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	IKP.6.5.11.1	Jumlah Dok. Hasil Pemeriksaan		
				KP.6.5.12	Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	IKP.6.5.12.1	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
				KP.6.5.13	Pengadaan Bandwidth Internet	IKP.6.5.13.1	Kapasitas Bandwidth Internet		
				KP.6.5.14	Pemberian reward dan punishment secara berkelanjutan	IKP.6.5.14.1	Pedoman pemberian reward & punishment		
				P.6.6	Pelaksanaan kegiatan kehumasan dalam rangka penguatan citra PPNS	KP.6.6.1	Pengembangan Media Publikasi dan Komunikasi Internal	IKP.6.6.1.1	Jumlah Media Publikasi dan Komunikasi Internal
						KP.6.6.2	Pengelolaan website & social media PPNS	IKP.6.6.2.1	Update konten/minggu
						KP.6.6.3	Intensifikasi Komunikasi dengan media eksternal baik cetak maupun online	IKP.6.6.3.1	Publikasi PPNS/triwulan
				P.6.7	Pengembangan dan Penerapan Regulasi-regulasi yang Mendorong Keteraturan, Ketertiban dan Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang Mengarah pada Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas dan Layanan	KP.6.7.1	Penyusunan Peraturan-peraturan Internal Bidang Akademik (Senat)	IKP.6.7.1.1	Jumlah Peraturan Internal
						KP.6.7.2	Penyelenggaraan Rapat-rapat Pleno Senat	IKP.6.7.2.1	Jumlah Kegiatan Rapat Pleno Senat
				7	S7-PPNS. Meningkatnya kualitas kerjasama PPNS dengan stakeholder dalam kegiatan tridharma	P.7.1	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Pendukung Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran	KP.7.1.1	Memperkuat kerjasama PPNS dengan industri terkait dengan penerapan Dual System (OJT)
KP.7.1.2	Meningkatkan peran serta industri dan alumni dalam proses pembelajaran	IKP.7.1.2.1	Jumlah anggota IAB						
KP.7.1.3	Pendidikan Jarak Jauh	IKP.7.1.3.1	Jumlah mahasiswa PJJ						
		IKP.7.1.3.1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.						
KP.7.1.4	Hasil Produksi TEFA	IKP.7.1.4.1	Jumlah produk						
KP.7.1.5	RPL bagi karyawan industri	IKP.7.1.5.1	Jumlah peserta RPL						

			KP.7.1.6	Peningkatan Bea siswa dari kerjasama baik institusi pemerintah maupun swasta	IKP.7.1.6.1	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari kerjasama baik institusi maupun swasta		
			KP.7.1.7	kerjasama bea siswa dengan pemerintah negara lain	IKP.7.1.7.1	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dengan pemerintah negar lain		
			KP.7.1.8	Kelas Kerjasama	IKP.7.1.8.1	Jumlah mahasiswa kelas kerjasama		
			KP.7.1.9	kelas internasional	IKP.7.1.9.1	Jumlah mahasiswa kelas internasional		
			KP.7.1.10	Peningkatan jumlah student body	IKP.7.1.10.1	Jumlah total mahasiswa		
			KP.7.1.11	Pengembangan program studi baru	IKP.7.1.11.1	Jumlah program Studi baru		
			P.7.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	KP.7.2.1	Meningkatkan jumlah layanan jasa dan produksi	IKP.7.2.1.1	Jumlah layanan jasa & produksi
							IKP.7.2.1.1.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
					KP.7.2.2	Jasa Konsultasi	IKP.7.2.2.1	Jumlah layanan jasa konsultasi
					KP.7.2.3	Jasa Inspeksi	IKP.7.2.3.1	Jumlah layanan jasa inspeksi
					KP.7.2.4	Pelatihan Industri	IKP.7.2.4.1	Jumlah pelatihan
KP.7.2.5	Sertifikasi BNSP	IKP.7.2.5.1			Jumlah peserta			
KP.7.2.6	Sertifikasi Badan Internasional (ATC, ATB)	IKP.7.2.6.1	Jumlah peserta sertifikasi internasional					

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN

Konsep Rencana Strategis PPNS periode 2020 – 2024 disusun dengan merujuk pada RPJMN 2020–2024 yang disusun berlandaskan Visi Indonesia tahun 2045, Visi dan Misi serta arahan Presiden Republik Indonesia, secara garis besar diilustrasikan dalam gambar 3.1.

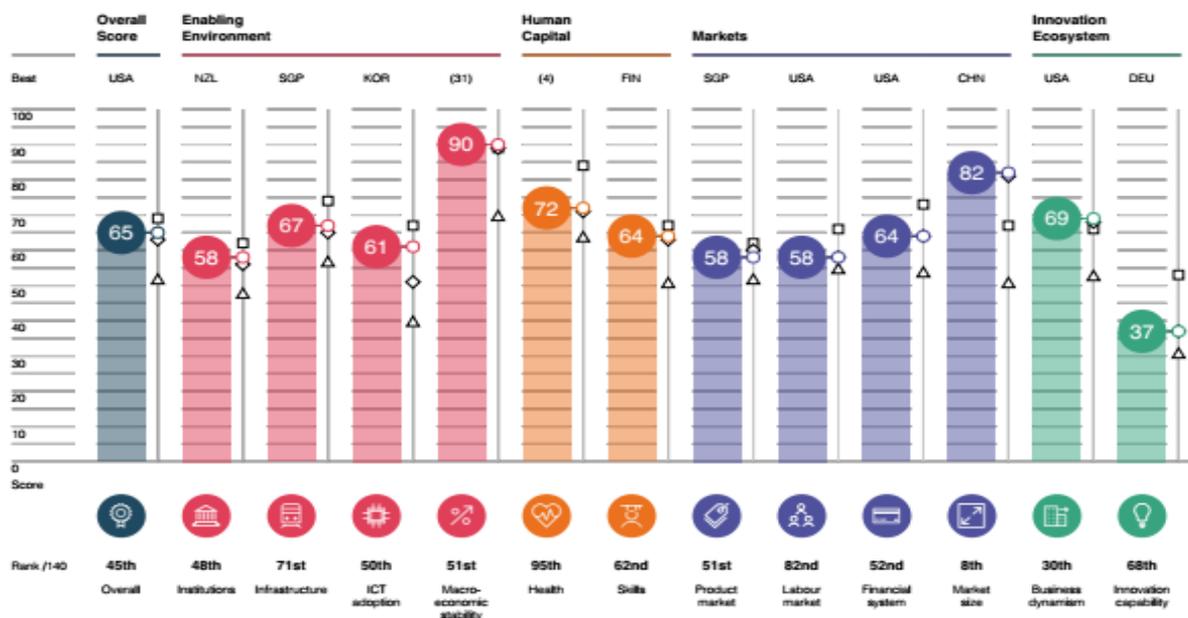


Gambar 3.1. Misi dan Arahan Presiden serta Agenda Pembangunan 2020 - 2024

Arah besar yang ingin dikembangkan oleh pemerintah di periode 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi

yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, dimana salah satu arah kebijakannya adalah Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan SDM yang berkualitas yang menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di periode 5 (lima) tahun ke depan menjadi sangat penting bukan tanpa sebab. Hal ini salah satunya disebabkan oleh faktor kemampuan daya saing Indonesia yang masih belum baik di era global saat ini. Sehingga menjadi sangat tepat bahwa kualitas SDM sangat mendesak perlu ditingkatkan untuk menaikkan daya saing tersebut. Jika melihat pada peringkat daya saing SDM Indonesia yang masih cukup rendah. World Economy Forum pada tahun 2018 merilis data peringkat daya saing seperti yang tersaji pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Peringkat Daya Saing Indonesia 2018

Pada Gambar 3.2. dapat dilihat bahwa secara keseluruhan peringkat daya saing Indonesia tahun 2018 ada di posisi 45 (dari 140 negara). Lebih khusus di bidang pendidikan, yang diwakili oleh kategori *skill*, bahwa Indonesia berada di peringkat 62.

Menyadari hal tersebut di atas, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020 – 2024 memuat 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana salah satunya adalah Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Ke-tujuh agenda pembangunan dapat dilihat pada Gambar 3.2. Hal yang mendasari mengapa peningkatan SDM menjadi salah satu agenda khusus disebabkan karena manusia merupakan modal utama dalam kegiatan pembangunan

nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Ukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan untuk meningkatkan SDM adalah manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Isu-isu strategis yang diangkat dalam peningkatan SDM adalah:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Jika melihat isu-isu yang digunakan dalam upaya pembangunan SDM di atas, maka isu ke-4 (empat), yaitu Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan isu ke-7 (tujuh), yaitu Produktivitas dan Daya Saing merupakan isu-isu yang sangat erat dengan kinerja perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), termasuk PPNS. Dari hasil analisa situasi yang telah dilakukan oleh Bappenas, maka isu-isu strategis yang spesifik terkait dengan pemerataan layanan pendidikan, produktivitas dan daya saing di perguruan tinggi khususnya PTV di PPNS adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - b) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
 - c) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,
 - d) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah,
 - e) Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan
2. Produktivitas dan Daya Saing
 - a) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industry
 - b) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas

-
- c) Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi
 - d) Penguatan pendamping pembangunan
 - e) Pengelolaan manajemen talenta nasional,
3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang terkait dengan PTV mencakup:
- a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;
 - b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;
 - c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;
 - d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;
 - e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online;
 - f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran,
 - g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan;
 - h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk kualitas pendidikan di pesantren;
 - i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan
4. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di PTV PPNS mencakup;
- a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP Kuliah;
 - b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk

-
- daerah 3T, seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama;
- c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi;
5. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata meliputi;
 - a) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja.
 6. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah mencakup;
 - a) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan
 - b) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi;
 - c) penguatan Standar Nasional Pendidikan;
 - d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan manajemen PTV dan pengawas, penerapan manajemen berbasis teknologi Informasi, serta pengembangan unit penjaminan mutu
 7. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan, mencakup:
 - a) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan;
 - b) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan;
 - c) peningkatan efektivitas pemanfaatan bantuan operasional satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan;
 - d) penguatan tata kelola pendidikan tinggi
 8. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mencakup:

-
- a) Peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi; peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya; dan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk penguatan informasi pasar kerja;
 - b) Reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, meliputi penguatan pembelajaran inovatif dengan penyelarasan program studi/bidang keahlian mendukung pengembangan sektor unggulan dan kebutuhan industri/swasta; penyelarasan kurikulum dan pola pembelajaran sesuai kebutuhan industri; penguatan pembelajaran untuk penguasaan karakter kerja, softskills dan bahasa asing; penguatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda (dual TVET system) yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbasis praktik dan magang di industri; perluasan penerapan teaching factory/teaching industry berkualitas sebagai salah satu sistem pembelajaran standar industri; revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai standar; peningkatan kerja sama pemanfaatan fasilitas praktik kerja di industri, termasuk unit produksi/teaching factory/teaching industry; penguatan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan di PTV; peningkatan fasilitasi dan kualitas pemagangan; dan penyusunan strategi penempatan lulusan;
 - c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi, terutama dengan peningkatan pelatihan pendidik/instruktur vokasi sesuai kompetensi; peningkatan keterlibatan instruktur/praktisi dari industri untuk mengajar di satuan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri;
 - d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, terutama dengan pengembangan standar kompetensi sesuai kebutuhan industri; penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi; dan sinkronisasi sistem sertifikasi yang ada di berbagai sektor; dan

Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama dengan pengendalian izin pendirian satuan pendidikan vokasi baru dan program studi yang tidak sesuai standar dan kebutuhan industri/pasar kerja; peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi program studi dan satuan pendidikan vokasi; pengaturan untuk fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/teaching factory/teaching industry; pengembangan skema pendanaan peningkatan keahlian; pembentukan lembaga single oversight di tingkat nasional yang mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi; dan peningkatan akses ke pelatihan vokasi melalui penerapan Kartu Pra-Kerja

9. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas mencakup:
 - a) Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen Iptek-inovasi dan pusat keunggulan (center of excellence) yang mencakup penguatan fokus bidang ilmu sesuai potensi daerah setempat dan peningkatan kerja sama konsorsium riset antarperguruan tinggi maupun antarperguruan tinggi dan lembaga penelitian di dalam dan luar negeri;
 - b) Pengembangan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antarperguruan tinggi dengan pihak industri;
 - c) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan penelitian dengan meningkatkan interaksi perguruan tinggi dan industri;
 - d) Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi melalui pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah, perluasan sertifikasi, program untuk percepatan masa tunggu bekerja, dan pelatihan kewirausahaan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan muda;
 - e) Pengembangan dana abadi (endowment fund) di perguruan tinggi yang bersumber dari dana masyarakat, termasuk sektor swasta dan filantropi untuk pengembangan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi;

-
- f) Perwujudan diferensiasi misi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university;
10. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi mencakup:
- a) Pemanfaatan Iptek dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup integrasi pelaksanaan riset dengan skema flagship Prioritas Riset Nasional untuk menghasilkan produk riset dan produk inovasi strategis, diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir skala industri, bahan bakar alternatif dari kelapa sawit, kendaraan listrik termasuk baterai lithium ion dan sistem fast charging, kereta cepat, pesawat amfibi, pesawat terbang tanpa awak, bahan baku obat, dan pabrik garam industri, pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah dengan pendekatan multidisiplin, inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (teknologi tepat guna bidang pertanian dan perikanan, serta riset dan inovasi sosial yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik), penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pascabencana, pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi, dan penguasaan Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidang strategis seperti kesehatan dan farmasi, teknologi digital dan cyber security, material maju, energi baru terbarukan, tenaga nuklir, pertahanan dan keamanan, serta keantariksaan;
 - b) Pengembangan Research Power-House yang mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan penguatan infrastruktur litbang strategis, penguatan Pusat Unggulan Iptek, pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
 - c) Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama triple-helix, perbaikan tata kelola paten/KI, penguatan Science Techno Park (STP) utama, perintisan fungsi Technology Commercialization Office dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan Technology

-
- Transfer Office di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT);
- d) Peningkatan kualitas belanja litbang melalui koordinasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi, penguatan pendataan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi
11. Penguatan pendamping pembangunan, mencakup:
- a) Pengembangan standar kompetensi dan jenjang kualifikasi nasional pendamping pembangunan;
 - b) Program pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi dan jenjang kualifikasi;
 - c) Sertifikasi kompetensi pendamping yang mengacu pada skema sertifikasi pendamping pembangunan;
 - d) Pengembangan komponen pendukung yaitu sistem insentif, rekognisi, regulasi, dan basis data pendamping yang terpadu.
12. Pengelolaan manajemen talenta nasional, mencakup:
- a) Pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi;
 - b) Pengelolaan database persediaan dan kebutuhan talenta (talent pool);
 - c) Peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja, serta pengembangan karir dan prestasi talenta;
 - d) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta;
 - e) Pembentukan Lembaga Manajemen Talenta Indonesia.

3.2 KEBIJAKAN KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

Beberapa produk hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai payung hukum Kampus Merdeka, sebagai berikut:

- a) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

- b) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
- c) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- d) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi. Beberapa kebijakan Kampus Merdeka di lingkup perguruan tinggi, yaitu:



Gambar 3.3 Kebijakan Kampus Merdeka

1. Pembukaan program studi baru

Program Kampus Merdeka memberikan otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C. Kerjasama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. *Tracer study* wajib

dilakukan setiap tahun.

Otonomi ini berdampak keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan program studi baru tanpa proses administrasi yang cukup panjang. Perguruan tinggi mempunyai kemudahan dalam membuka program studi yang sangat dibutuhkan oleh pasar

2. Sistem akreditasi perguruan tinggi

Dalam program Kampus Merdeka, program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.

Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan "Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Tentunya kebijakan ini berdampak besar bagi perguruan tinggi. Kegiatan-kegiatan administratif yang melibatkan sebagian dosen dalam rangka penyusunan instrumen dan persiapan akreditasi sangat menyita waktu dosen menjadi berkurang. Dengan adanya regulasi baru tersebut maka perguruan tinggi dapat optimal mencapai kinerja perguruan tinggi dan mengembangkan program-program utama yang mendorong mutu dan reputasi.

3. Kemudahan menjadi PTN-BH

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Kemudahan tersebut memacu perguruan tinggi untuk segera migrasi dari

PTN-Satker menjadi PTN-BLU. Dengan PTN-BLU maka penggunaan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan kelembagaan, unit-unit usaha sebagai sumber pendapatan, serta mengusulkan tarif kepada Kementerian Keuangan sesuai kemampuan institusi

4. Hak belajar tiga semester di luar prodi

Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Sehingga mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas diperbesar guna mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Selain itu, terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'.

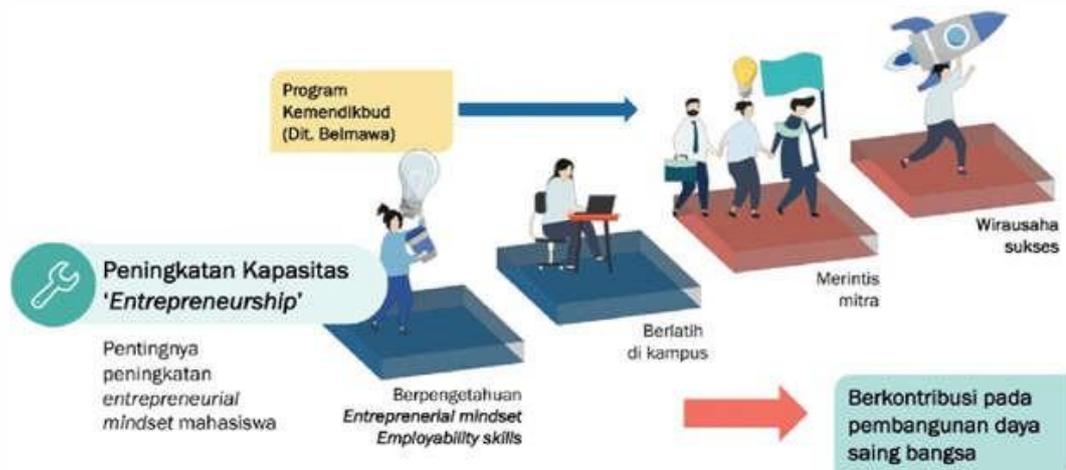
Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya.

Dengan adanya regulasi tersebut luaran pembelajaran yang dicapai oleh mahasiswa juga tidak bias dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk membaur dengan industri dan masyarakat lebih lama. Dengan demikian akan terwujud lulusan-lulusan yang unggul dan berdaya saing. Di sisi lain, perguruan tinggi juga lebih leluasa untuk merancang perangkat kurikulum, menambah jumlah mahasiswa, berkolaborasi dengan industri dengan menciptakan produk-produk inovasi yang berdaya guna bagi pasar industri maupun

masyarakat.

3.2.1 Peningkatan Kapasitas “Entrepreneurship”

Untuk menjawab tantang masa depan di Era Revolusi Industri 4.0, salah satu program utama Kemendikbud adalah peningkatan kapasitas “Entrepreneurship”. Program ini sinergi dengan Rencana Induk Pengembangan PPNS pada Fase II (2020 – 2024) fokus pada membangun budaya inovasi berbasis tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi.



Gambar 3. 13 Program Kemendikbud dalam Peningkatan Kapasitas “Entrepreneurship”

Pada fase ini akan dilakukan penguatan Program Pasca Sarjana sebagai mesin lokomotif untuk menghasilkan karya-karya inovasi baru. Akselerasi inovasi tersebut dapat terwujud jika roadmap dan luaran penelitian diarahkan pada penciptaan produk inovasi yang dibutuhkan pasar dan masyarakat. Selain itu penguatan dan pengembangan inkubator bisnis juga menjadi hal yang penting. Jumlah working space bagi para tenant/pengusaha muda harus menjadi perhatian setiap perguruan tinggi karena merupakan indikator jumlah karya inovasi dan persentase lulusan berwirausaha

3.2.2 Beberapa Isu Startegis Lainnya

1. Akses Pendidikan

Berdasarkan partisipasi pendidikan tahun 2018, mayoritas penduduk Indonesia berpendidikan SD dan SMP, yaitu sebanyak 64,9%. Yang berpendidikan SMA sebesar 26,4% dan yang berpendidikan tinggi hanya 8,8%.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4633 PT namun angka partisipasi kasar (APK) paling rendah, yaitu sebesar 33,4%. Berbeda dengan Malaysia, jumlah perguruan tinggi sebanyak 488 PT dengan APK 37,2%. Di Thailand ada 141 PT dengan APK 51,2%, Singapura ada 19 PT dengan APK 82,7%. Sedangkan Korea ada sebanyak 352 PT dengan APK 98,4% atau dapat dikatakan hampir semuanya studi lanjut ke perguruan tinggi.



Gambar 3. 14 Akses Pendidikan di Indonesia

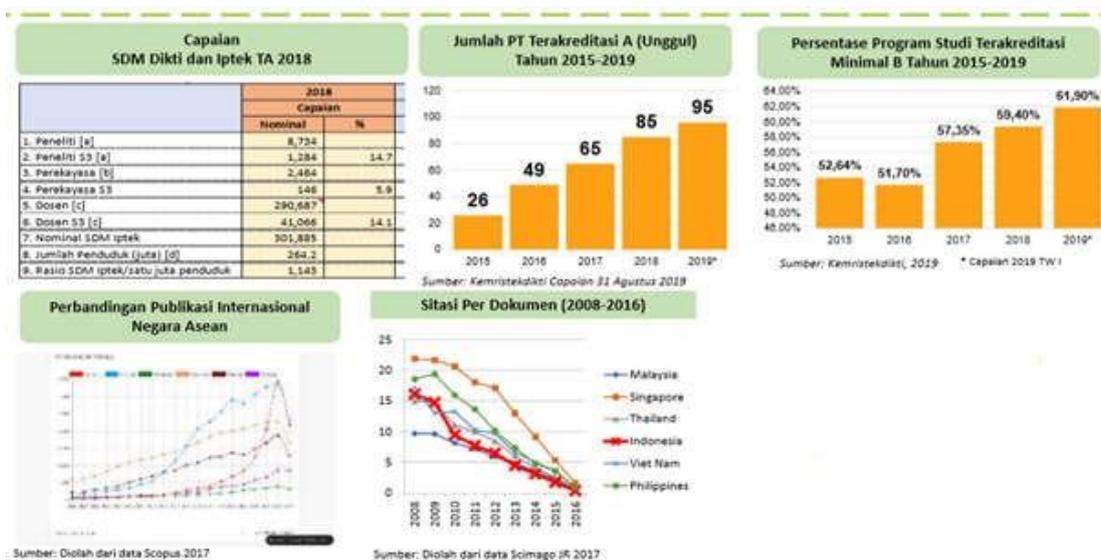
Proporsi penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi tergolong sangat rendah dapat disebabkan beberapa hal, antara lain: penduduk Indonesia sangat besar dan akses pendidikan tinggi masih belum merata.

2. Kualitas

Kualitas sumberdaya di Kemendikbud perlu ditingkatkan. Produktifitas penelitian dosen masih rendah. Luaran penelitian dosen juga belum semuanya fokus pada penyelesaian permasalahan bangsa dengan luaran produk inovasi sesuai tuntutan kebutuhan pasar.

Jumlah PT terakreditasi A (Unggul) juga masih sedikit. Akreditasi adalah tolok ukur gambaran pencapaian kinerja sebuah perguruan tinggi berdasarkan kinerja tridarma, kelembagaan dan tata kelola, prestasi mahasiswa, serta kerjasama dan inovasi. Dengan adanya beberapa kebijakan baru Kemendikbud diharapkan dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi, utamanya kebijakan

Kampus Merdeka yang diproyeksikan meningkatkan jumlah SDM unggul yang mampu mencari solusi permasalahan bangsa, yang menjadikan Indonesia



nenjadi bangsa yang berdaya saing.

Gambar 3. 15 Pentingnya Peningkatan Kualitas Sumberdaya

3. Relevansi dan Daya Saing

Relevansi pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah, dibuktikan serapan lulusan ke dunia kerja masih relatif rendah. Selain itu bidang pekerjaan yang didapatkan oleh lulusan perguruan tinggi sebagian belum sesuai level pendidikan. Dengan adanya kebijakan baru dari Kemendikbud diharapkan mampu menjawab permasalahan negara. Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul.

Selain itu luaran penelitian di Indonesia masih terpaku pada target publikasi. Dengan adanya kebijakan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan kapasitas “Enterpreneurship” ini merupakan terobosan yang sangat bagus dalam upaya menstimulus dosen dan para peneliti untuk berlomba-lomba menciptakan produk yang inovatif dan inovasi-inovasi penelitian yang berdaya guna.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPNS

Arah kebijakan dan strategi PPNS untuk periode 2020-2024 berfokus pada pengembangan untuk menjadi Pusat Riset Terapan Bidang Teknologi Perkapalan dan Kemaritiman, sebagaimana tertuang pada RIP PPNS 2015-2039 (SK Direktur PPNS No: 4790/PL19/PR/2015 (2020-2024). Arah kebijakan ini tentunya selaras

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024

3.3.1 Arah Kebijakan PPNS

1. Pemerataan Akses

PPNS mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan pemerataan asal daerah/provinsi, pemerataan kemampuan ekonomi pendaftar, dan juga pemerataan rasio angka partisipasi kasar (APK). Hal ini dilakukan dengan sosialisasi dan promosi PPNS baik melalui pameran pendidikan politeknik maupun promosi ke sekolah menengah atas (SMA dan SMK) sehingga masyarakat luas memperoleh informasi yang memadai mengenai PPNS.

2. Penguatan Kualitas Sumber Daya dan Kelembagaan

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di PPNS dikembangkan dengan meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3, dosen dengan kompetensi pada bidang keahlian khusus yang diperoleh melalui uji kompetensi, serta meningkatkan sitasi publikasi jurnal internasional yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap H-index dosen. Sedangkan peningkatan kualitas pada tenaga kependidikan diupayakan melalui pelatihan/training. PPNS melakukan upaya penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi kelembagaan dengan menjaga kesinambungan akreditasi A institusi, peningkatan jumlah program studi terakreditasi A (unggul), dan juga peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peningkatan jumlah riset terapan dosen terutama riset terapan yang bekerjasama dengan industri/*stakeholder*. Peningkatan kemampuan dosen dalam menulis karya ilmiah dikembangkan melalui workshop penulisan karya ilmiah dan juga pemberian insentif publikasi jurnal internasional bereputasi, dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi sekaligus jumlah sitasi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peringkat PPNS pada pemeringkatan perguruan tinggi melalui website (webometrics).

3. Relevansi Kegiatan dan Lulusan

Relevansi kegiatan dan lulusan dapat dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan industri baik dengan *on the job training* (OJT) mahasiswa maupun *feedback* dari industri melalui kegiatan *Industrial Advisory Board* (IAB) sebagai upaya untuk penyesuaian program studi/bidang keahlian dan pola pembelajaran inovatif. Hal ini digunakan untuk meningkatkan persentase serapan lulusan di industri, memperpendek masa tunggu kerja lulusan, peningkatan kesesuaian antara pekerjaan lulusan dengan bidang keahlian, serta kesesuaian tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang diterima lulusan. Penguatan kualitas satuan pendidikan, sistem penyelenggaraan dan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi, kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi dan sistem sertifikasi kompetensi vokasi. Pengembangan inovasi riset terapan diupayakan mengarah pada riset yang mampu menghasilkan produk/jasa (Penelitian dengan TKT 7-9) komersial yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerapan *production-based education* juga menjadi kekuatan untuk memacu relevansi.

4. Keunggulan Kelembagaan

Kelembagaan PPNS yang terakreditasi A, peningkatan jumlah program studi terakreditasi A (unggul), peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan pada hasil litbang perguruan tinggi, riset terapan dosen yang bekerjasama dengan industri/*stakeholder*, dan publikasi internasional serta peningkatan jumlah sitasi akan berpengaruh pada ranking PPNS pada pemeringkatan skala nasional maupun skala internasional yang akan meningkatkan daya saing dan keunggulan kelembagaan PPNS. Pengembangan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek terkait *Research Power House*, meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek dalam kaitannya dengan jumlah dan kualitas pembelanjaan untuk menciptakan ekosistem inovasi termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan dan jaringan akan meningkatkan relevansi pendidikan vokasi yang berbasis kerjasama industri. Sehingga iptek yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

5. Kemitraan PPNS dengan industri

Pendidikan vokasi mengedepankan lulusan yang siap ke dunia industri atau dunia kerja. Kesiapan lulusan memasuki dunia kerja terkait erat dengan relevansi sebagaimana tercantum pada kebijakan poin ke 3. Industri merupakan sumber inovasi karena dunia industri terjadi persaingan yang terus menerus. Industri dan perguruan tinggi merupakan mata rantai tak terpisahkan. Kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja juga memberikan keuntungan bagi industri selaku pengguna. PPNS telah melembagakan kemitraan dengan industri yang berkelanjutan melalui *Industrial Advisory Board (IAB)*. Walaupun demikian, kemitraan dengan industri masih menjadi arah kebijakan karena cakupan bidang dalam kemitraan dengan industri masih terus dikembangkan. Hal ini diharapkan dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

3.3.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis PPNS 2020-2024 meliputi 7 sasaran yaitu:

3.3.2.1 Meningkatnya level akreditasi PPNS menjadi A (Unggul) di tingkat nasional dan Internasional

1. Peningkatan kualitas mahasiswa baru

Sistem promosi dan seleksi calon mahasiswa yang baik diharapkan dapat menjaring mahasiswa baru yang berkualitas. Promosi yang efektif, menarik dan tepat sasaran akan meningkatkan jumlah pendaftar dan memperbaiki angka kompetisi pendaftar. Sistem seleksi mahasiswa baru perlu terus diperbaiki misalnya dari sisi kemudahan sistem informasi pendaftaran, metode penilaian yang tepat serta kebijakan untuk pemerataan akses atas pendidikan.

2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Proses Belajar Mengajar

Sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran perlu terus diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi dan aspek kecukupan. Memastikan seluruh peralatan pendukung proses pembelajaran berjalan

baik dan mutakhir, prasarana memadai, bahan habis pakai dan ATK tersedia akan menunjang kelancaran proses pembelajaran.

Koleksi perpustakaan, buku, majalah dan kemudahan akses atas jurnal nasional, jurnal internasional maupun proceeding akan sangat menunjang tidak hanya proses pembelajaran, namun juga penelitian serta peningkatan publikasi.

3. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Metode Belajar Mengajar

Metode blended learning dengan memanfaatkan berbagai *tools* pembelajaran telah mulai digalakkan di PPNS. Media pembelajaran berbasis daring dan penggunaan perangkat-perangkat berbasis TIK lain juga perlu diperkenalkan lebih banyak untuk memberikan alternatif metode. Sejak tahun 2019 implementasi kurikulum Teaching Factory telah mulai dilakukan dan terus dikembangkan dual system dengan bekerjasama dengan industri. Kurikulum bertaraf internasional perlu dikembangkan dengan merespon kondisi terkini revolusi industri 4.0. Selain itu arahan pemerintah atas pemberlakuan sistem *Multi Entry Multi Exit* dalam pendidikan vokasi mengharuskan PPNS memastikan kompetensi yang diraih mahasiswa dalam setiap semesternya memungkinkan program MEME ini berjalan.

4. Penjaminan mutu pendidikan

Monitoring dan evaluasi atas proses pembelajaran perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dapat dijadikan acuan dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Sebagai bagian dari pencapaian visi PPNS sebagai Politeknik bereputasi global, saat ini beberapa program studi dalam proses penyusunan akreditasi internasional dan penerimaan mahasiswa asing terus dilakukan.

5. Penyelenggaraan Evaluasi Proses Belajar Mengajar

Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dikoordinir terpusat oleh jurusan, melalui ahap verifikasi soal untuk memastikan kesesuaian dengan kompetensi yang dicapai telah dilakukan.

3.3.2.2 Meningkatnya ranking PPNS dalam pemeringkatan PT tingkat Nasional dan Internasional

Pemeringkatan perguruan tinggi tingkat nasional berdasarkan aspek-aspek:

1. Sumberdaya manusia
2. Kelembagaan
3. Kemahasiswaan
4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Inovasi

Semua aspek dalam kriteria tersebut telah tercakup dalam sasaran strategis yang lain. Aspek 1 sampai dengan 4 sama dengan standar dalam akreditasi institusi perguruan tinggi. Penilaian aspek-aspek tersebut dilakukan secara daring, sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu konten dan sistem informasi daring yang mudah diakses oleh penilai.

Terdapat banyak lembaga yang mememeringkatan perguruan tinggi secara internasional. Salah satu pemeringkat adalah Webometrics, yang mana menerapkan empat kriteria untuk menyusun ranking:

1. Presence, Presence, yaitu jumlah halaman website perguruan tinggi dan halaman dinamik yang tertangkap oleh mesin pencari Google.
2. Impact, yaitu jumlah eksternal link (backlink) yang diterima oleh domain web perguruan tinggi (inlinks) yang tertangkap oleh mesin pencari Google.
3. Openness, yaitu jumlah file dokumen yang online dalam domain website universitas yang tertangkap oleh mesin pencari Google.
4. Excellence, meliputi jumlah paper ilmiah yang dipublikasikan dan terindeks di Scimago Institution Ranking dan Google Scholar.

Kriteria dalam Webometrics menunjukkan bahwa peringkat perguruan tinggi sangat ditentukan oleh keandalan sistem informasi perguruan tinggi. Konten yang sesuai dengan kriteria pemeringkatan nasional dan internasional sudah menjadi cakupan sasaran strategis yang lain, sehingga fokus dalam hal ini adalah meningkatkan sistem informasi dan pemutakhiran data yang terkait. Program yang relevan dalam sasaran ini adalah meningkatkan konten dan aksesibilitas website PPNS serta intensifikasi pelaporan dan monitoring pada website/aplikasi terkait pemeringkatan PT.

3.3.2.3 Meningkatnya daya saing lulusan PPNS di era kompetisi global baik tingkat nasional maupun internasional

1. Peningkatan Kualitas Lulusan

Pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah akan berpengaruh terhadap persentase lulusan yang akan diterima. Hal ini tentu saja secara berkelanjutan juga berkorelasi terhadap peningkatan kualitas lulusan. Untuk mewujudkan program ini, PPNS dalam kurikulumnya menyertakan pelaksanaan *On The Job Training dual system teaching factory* selama 2 semester penuh di industri dan di kampus. PPNS juga berupaya melakukan perluasan sertifikasi dengan membekali mahasiswa uji kompetensi berstandar nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan beberapa program Kemendikbud dibawah dirjen Vokasi diantaranya Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi (P3TV) dan Program Program Kemitraan dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, DUDI. Selain melalui sertifikasi kompetensi, peningkatan kompetensi mahasiswa juga dilakukan melalui kuliah tamu, kunjungan industri, serta simulasi pengembangan ketrampilan dan kepribadian.

Kualitas softskill mahasiswa berupa kemampuan bahasa asing dan bahasa inggris, komunikasi, kepercayaan diri juga ditingkatkan melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan yang ada di PPNS. Khusus ilmu komunikasi dan bahasa Inggris masuk dalam kurikulum dan menjadi mata kuliah di semua prodi. Potensi minat dan bakat mahasiswa juga turut dikembangkan melalui lembaga minat dan bakat mahasiswa yang menaungi berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Peningkatan kualitas lulusan juga dipengaruhi oleh kesejahteraan mahasiswa selama berada di bangku perkuliahan. Peningkatan kesejahteraan dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu. Saat ini berbagai beasiswa yang ada di PPNS antara lain bidik misi, PPA, BBM, Imhere, Supersemar, Toyota Astra dan BNI.

2. Percepatan Masa Tunggu lulusan

Salah satu indikator keberhasilan Pendidikan Tinggi adalah dengan mengetahui jumlah mahasiswa lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dan siap berkiprah dalam pembangunan. Daya saing lulusan ini ditunjukkan melalui masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, keberhasilan lulusan berkompetisi dalam seleksi, dan gaji yang diperoleh. Relevansi pendidikan lulusan ini salah satunya ditunjukkan melalui profil pekerjaan (jenis dan tempat pekerjaan).

Program percepatan masa tunggu lulusan ini menunjang salah satu indikator kinerja kemendikbud dalam mengukur tingkat penyerapan dunia kerja terhadap lulusan perguruan tinggi. Untuk mewujudkan program ini, PPNS berupaya melaksanakan kegiatan pelacakan alumni (*tracer study*). *Tracer study* ini diperuntukkan bagi alumni dan pengguna lulusan. Upaya pelacakan melalui alumni dilakukan setiap tahun untuk mengetahui posisi alumni dan jumlah alumni yang terserap di dunia kerja. *Tracer study* juga diperuntukkan bagi pengguna lulusan untuk mengetahui jumlah alumni yang berada di perusahaan tersebut. Melalui kegiatan ini, pengguna lulusan diharapkan juga dapat memberikan masukan terkait kompetensi yang dimiliki alumni. Sehingga, kedepannya dapat memberikan input mengenai kurikulum yang dijalankan. PPNS juga melaksanakan kegiatan job fair yang dikenal dengan *professional expo* dalam rangka meningkatkan keserapan lulusan. *Professional expo* diperuntukkan bagi mahasiswa semester akhir yang sedang dan telah selesai melaksanakan sidang TA. Kegiatan berikutnya dalam rangka mempercepat masa tunggu lulusan dengan melaksanakan kerjasama antar perguruan tinggi, industri (perusahaan) dan pemerintah (pemda).

3.3.2.4 Meningkatkan peran serta langsung PPNS dalam mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya sektor kemaritiman dan industri pendukung kemaritiman

Dalam kegiatannya dosen melaksanakan tri dharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Kegiatan pengabdian merupakan wujud nyata kepedulian

dosen serta mengasah empati dosen terhadap permasalahan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu dosen diuntut untuk menjadi inisiator dan katalisator dalam proses pembangunan nasional. Karena itu sangat penting untuk meningkatkan kegiatan pengabdian. Hasilnya berupa banyaknya judul kegiatan pengabdian yang dapat didanai sehingga dapat terlaksana. Selain itu sangat perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak terkait agar mampu mendorong dalam meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian melalui dana instansi terkait.

Selain itu, PPNS juga harus mampu menjadi pioner dalam meningkatkan keahlian kompetensi masyarakat sehingga taraf kehidupan masyarakat meningkat. Karena itu perlu didorong dalam meningkatkan kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Agar masyarakat mengetahui kegiatan yang mampu dilakukan maka diperlukan kegiatan promosi terkait kegiatan pelatihan yang dimiliki PPNS. Untuk mendukung kegiatan pelatihan dan meningkatkan peran laboratorium/bengkel maka dilakukan peningkatan jumlah Lab/Bengkel menjadi TUK. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan lab/bengkel akan dilakukan proses sertifikasi lab/bengkel baik nasional maupun internasional. Semua kegiatan tersebut agar tercapai sasaran dengan tepat dan benar maka sangat perlu dilaksanakan proses *money* secara rutin dan berkelanjutan.

3.3.2.5 Menciptakan iklim penelitian berbasis teknologi terapan, inovatif dan bersifat technopreneur

1. Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Penelitian

Penilaian klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan 4 kriteria, yaitu Input, Proses, Output dan Outcome. Masing-masing indikator mempunyai prosentase berbeda dimana Input (15%), Proses (25%), Output (25%) dan Outcome (35%). Didalam kriteria tersebut terdapat beberapa indikator diantaranya adalah jumlah artikel ilmiah terindex per dosen, kinerja penelitian, kedua indikator tersebut merupakan bagian dari kriteria Output, sedangkan yang merupakan bagian kriteria Outcome adalah kinerja inovasi, jumlah sitasi per dosen. Jumlah patent per dosen. Untuk itu langkah-langkah yang akan dijalankan dalam rangka meningkatkan penilaian klasterisasi maka akan dijalankan beberapa kegiatan untuk

memberikan Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Penelitian yaitu diantaranya adalah bagaimana dosen mempunyai semangat dalam mengajukan judul-judul penelitian sehingga meningkatnya jumlah judul penelitian di danai dana dipa akan terpenuhi. Dan karena kriteria outcome juga menjadi penilaian dimana salah satu indikatornya adalah jumlah patent dan citasi per dosen. Maka Meningkatnya Jumlah penelitian yang berorientasi Kekayaan Intelektual perlu di dorong. Untuk itu akan di giatkan penelitian kerjasama baik dalam maupun luar, baik dengan instansi pendidikan maupun instansi pemerintah serta Mendorong dosen untuk melakukan penelitian dengan penekanan luaran berupa Paten. Selain itu akan di lakukan kegiatan Menginisiasi kegiatan start up melalui program CPPBT dan PPBT sebagai langkah awal dalam mencetak bibit technopreneur. Pendampingan kegiatan start up ini akan di lakukan dengan memperkuat peran inkubator dalam proses pendampingan bisnis.

2. Publikasi Karya Ilmiah

Kriteria lain yang menjadi penilaian adalah ouput. Salah satu indikatornya adalah jumlah artikel ilmiah terindex per dosen. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi dosen dalam menulis karya ilmiah. Untuk itu salah satu agendanya adalah bagaimana meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dosen. Semangat dan kemampuan dalam menulis artikel akan selalu di asah dengan melaksanakan workshop penulisan ilmiah dengan mengundang para praktisi dan pakar di bidang penulisan artikel ilmiah. Dengan workshop penguatan penulisan proposal Riset, akan meningkatkan kemampuan dosen dalam menulis proposal dan jurnal. Serta melalui workshop kiat-kiat menulis jurnal untuk menembus jurnal Q1, akan meningkatkan kualitas penulisan jurnal bagi dosen. Selain itu dosen harus di dorong untuk selalu melahirkan artikel ilmiah yang berbobot, maka pemberian insentif jurnal nasional dan jurnal internasional merupakan sebuah keharusan. Serta memberikan kesempatan di lingkungan PPNS dalam pelaksanaan seminar nasional MASTER dan seminar internasional ICOMTA. Untuk mempublikasikan penelitian dan pengabdian dosen di wadah dalam penerbitan jurnal maritim dan jurnal cakrawala maritim

3. Inisiasi Marine STP/Marine Edu Park Lamongan

Science Techno Park merupakan sebuah kawasan yang dikelola oleh manajemen profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penguasaan, pengembangan dan penerapan IPTEK yang relevan. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), merupakan institusi pendidikan yang memfokuskan diri pada pengembangan dibidang perkapalan dan industri maritim serta industri penunjangnya. Untuk itu PPNS akan mengembangkan inovasi yang akan menjadi science techno park bidang maritim dan penunjangnya. Oleh karena itu dalam kawasan Marine STP akan di susun perencanaan marine STP secara terintegrasi. Dimana di marine STP ini akan dibangun Sharing laboratory building dan fasilitasnya, sharing pilot plan docking dan fasilitasnya, pembangunan ruangan multi tenant, sarana edukasi maritime/marine dan galery inovasi bidang maritime. Marine STP ini diharapkan akan menjadi pusat pengembangan dan komersialisasi hasil inovasi produk dan jasa bidang maritime dan penunjangnya yang di dukung dengan fasilitas infrastruktu yang baik serta di kelola secara manajemen profesional. Oleh karena itu di perlukan penguatan tata kelola marine STP sehingga menghasilkan revenue dan benefit yang sesuai.

3.3.2.6 Terwujudnya sistem organisasi yang berbasis good governance polytechnic

1. Peningkatan kualitas layanan akademik dan non akademik

Dalam pembangunan PPNS sebagai good governance Polytechnic dibutuhkan SDM yang kompeten untuk mendukung layanan akademik dan non akademik yang berjalan di PPNS. Untuk meningkatkan kemudahan pelayanan, PPNS telah membentuk Unit Layanan Terpadu dan sistem aduan Helpdesk yang perlu terus ditingkatkan. Tingkat kepuasan layanan harus diukur sebagai dasar perbaikan layanan dengan terus mengembangkan sistem layanan yang berbasis pada hasil kepuasan pelanggan. Pengembangan sistem layanan dalam seluruh proses bisnis saat ini terus dikembangkan berbasis Sistem informasi.

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PPNS yang terpadu

Sistem Informasi Manajemen PPNS yang telah dibangun secara umum sudah terintegrasi dari berbagai bidang, akademik, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, pusat karir, kepegawaian, umum dan lain-lain. Selain melengkapi sistem yang masih berjalan manual seperti perwalian, surat menyurat penjadwalan Ujian dan beberapa proses lainnya, PPNS perlu melengkapi sistem pengambilan keputusan yang saat ini dapat diakses dalam laman dss.ppns.ac.id. Penggunaan sistem informasi yang masif dalam seluruh proses bisnis membutuhkan dukungan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang kuat untuk mendukung kecepatan, keamanan dan kehandalan sistem.

3. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis Manajemen Resiko

Review dan *update* berkala SPMI dan perangkat SPMI terhadap perkembangan peraturan terkait penjaminan mutu dan perkembangan kebijakan institusi yang seiring dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) PPNS dan Rencana Strategis PPNS lima tahunan. Audit internal pada setiap unit dilakukan untuk memastikan SPMI dan perangkat SPMI dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai upaya penjaminan mutu internal yang berbasis manajemen resiko.

4. Peningkatan kualitas manajemen kapasitas institusional

Program kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan disusun berbasis evaluasi diri dan hasil monitoring serta evaluasi program kerja yang telah dilakukan PPNS pada tahun sebelumnya pada masing-masing unit sebagai upaya tindak lanjut. Audit mutu eksternal oleh lembaga independen secara rutin sebagai upaya penguatan kapasitas dan akselerasi kualitas kelembagaan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peringkat PPNS pada pemeringkatan perguruan tinggi. Peningkatan budaya K3 pada lingkup institusi merupakan poin penting yang harus ditanamkan dalam rangka menuju status politeknik Badan Layanan Umum (BLU).

5. Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Manajerial dan Operasional Relevan yang Menjamin Keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan

Rapat Kerja Penyusunan RBA, RKAK/L, dan Dokumen DIPA BLU dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas institusi, termasuk penyusunan laporan PDDIKTI, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang menjamin terwujudnya kegiatan tridharma PT dan operasional kantor. Beberapa kegiatan dilakukan PPNS untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan antara lain dengan langganan daya dan jasa, penyelenggaraan dan peningkatan layanan poliklinik, pembayaran gaji dan tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan, pengadaan bandwidth internet. Pemberian reward dan punishment secara berkelanjutan dilakukan untuk menjamin kegiatan manajerial tetap berjalan dengan baik. Penyusunan dokumen remunerasi dilakukan PPNS sebagai upaya untuk mendukung PPNS menjelang status BLU. Hal ini didukung dengan pengembangan system akuntansi yang baik untuk menjamin akuntabilitas keuangan dan upaya-upaya penguatan peran dari pengawasan internal PPNS.

6. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dalam rangka penguatan citra PPNS

Kegiatan Kehumasan berperan penting dalam menguatkan citra organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi baik kepada pihak internal maupun eksternal. Pengembangan media publikasi dan komunikasi internal perlu dilakukan, termasuk pengelolaan website dan sosial media yang melibatkan seluruh unit di PPNS. Komunikasi dengan media eksternal baik cetak maupun online perlu dibangun lebih intensif untuk menginformasikan perkembangan PPNS kepada publik.

7. Pengembangan dan Penerapan Regulasi-regulasi yang Mendorong Keteraturan, Ketertiban dan Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang Mengarah pada Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas dan Layanan

Peraturan-peraturan akademik internal PPNS disusun untuk memenuhi standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan dituangkan dalam aturan tertulis yang mengarah pada peningkatan keteraturan, ketertiban dan standar pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada meningkatnya kualitas akuntabilitas dan layanan

3.3.2.7 Meningkatnya kualitas kerjasama PPNS dengan stakeholder dalam kegiatan tridharma

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kerjasama Pendukung Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran

Saat ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0. Di era ini, sangatlah berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan yang ada saat ini, dimana ketrampilan dan kompetensi menjadi hal penting yang sangat perlu di perhatikan. Penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta internet yang canggih dan masif sangat mempengaruhi perubahan perilaku dunia usaha industri, perilaku masyarakat dan konsumen. Karakteristik era revolusi industri 4.0 antara lain digitalisasi, optimasi, otomatisasi, adaptif, interaksi mesin dan manusia, komunikasi dan penggunaan teknologi informasi. Oleh sebab itu, dunia pendidikan dalam hal ini Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) harus mampu mengembangkan transformasi industri dengan mempertimbangkan sektor sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Tantangan revolusi industri 4.0 harus di respon secara cepat dan tepat oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya agar mampu meningkatkan daya saing lulusan PPNS. Dan salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah DOSEN.

Paradigma Tridharma pendidikan Tinggi harus di selaraskan dengan era revolusi industri 4.0, yaitu bagaimana 3 literasi baru sangat perlu di kedepankan yaitu **Digital, Teknologi dan Human**. Serta bagaimana menjalin konektivitas jejaring internasional dan nasional. PPNS harus mampu mempersiapkan mahasiswa mempunyai kemampuan adaptif terkait pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Terkait fenomena tersebut, maka sebagai institusi pendidikan yang mempersiapkan generasi masa depan beberapa kegiatan untuk peningkatan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, di laksanakan beberapa agenda antara lain:

1. Memperkuat kerjasama PPNS dengan industri.
2. Meningkatkan peran serta industri dan alumni dalam proses pembelajaran
3. Melaksanakan pendidikan jarak jauh
4. Menginisiasi hasil produk TEFA

-
5. Melaksanakan RPL bagi karyawan industri
 6. Meningkatkan Beasiswa dari kerjasama baik institusi pemerintah maupun swasta
 7. Membuka Kelas Kerjasama
 8. Membuka Kelas Internasional
 9. Meningkatkan jumlah student body
 10. Membuka program studi baru yang relevan seperti Renewable Energy, Bisnis Maritim Digital, Kecerdasan Buatan dan IOT

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Era revolusi industri 4.0, memunculkan budaya baru. Termasuk dalam dunia pendidikan. Saat ini dunia pendidikan meliputi pendidikan, riset dan entrepreneur. Oleh karena itu mahasiswa didorong untuk mampu melakukan riset dan mempunyai jiwa entrepreneur. Demikian pula dosen harus mempunyai kompetensi riset serta mampu mendorong mahasiswa agar mempunyai jiwa entrepreneur. Untuk itu capaian pembelajaran dan kompetensi kerja merujuk pada KKNI. Integrasi ketrampilan baru dapat ditambahkan dalam kurikulum tanpa harus menambah mata kuliah. Pembelajaran dapat dilakukan secara inovatif yang berkisambungan dengan penelitian dan inovasi. Pembelajaran daring perlu di galakkan. Penguatan kemitraan dengan industri sangat perlu di tingkatkan.

Beberapa tantangan di era industri 4.0 adalah 1) peningkatan keamanan teknologi informasi; 2) peningkatan keandalan dan stabilitas mesin produksi; 3) peningkatan keterampilan; dan 5) hilangnya banyak pekerjaan karena adanya otomatisasi. Oleh sebab itu, PPNS harus berubah. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa harus berubah. Semuanya harus berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri, terus belajar dan menyesuaikan dengan kebutuhan era ini. Karena itu beberapa langkah perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan jumlah layanan jasa dan produksi
2. Melaksanakan jasa Konsultasi
3. Melaksanakan jasa Inspeksi
4. Melaksanakan pelatihan Industri

-
5. Melaksanakan sertifikasi BNSP
 6. Melaksanakan sertifikasi Badan Internasional (ATC dan ATB)

Fasilitas pelatihan dan sertifikasi di upayakan dapat di laksanakan, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, dan sesuai dengan paparan bab sebelumnya, pada bab ini akan dirumuskan target dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan dengan indikator kementerian diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya level akreditasi PPNS menjadi A (Unggul) di tingkat Nasional dan International

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 1

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program			Target				
			Kode	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.1.1.2	Membangun sistem seleksi calon mahasiswa baru	IKP.1.1.2.1	Jumlah pendaftar	Orang	16000	17000	18000	19000	20000
2	KP.1.1.1	Melakukan promosi yang efektif, menarik dan tepat sasaran	IKP.1.1.1.2	Jumlah peminat	Calon mhs	16000	18000	20000	22000	24000
3	KP.1.2.1	Meningkatkan dan memutakhirkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran	IKP.1.2.1.1	Jumlah peralatan	Unit	10	10	10	10	10
4	KP.1.2.2	Meningkatkan koleksi perpustakaan (buku teks, jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding, majalah) spesifik penunjang keahlian/capaian pembelajaran program studi, e-library	IKP.1.2.2.1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	12.923	13.500	14.000	14.500	15.000
5	KP.1.2.3	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Alat Tulis Kantor (ATK) Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	IKP.1.2.3.1	Jumlah paket pengadaan	Paket	5	7	7	9	9
6	KP.1.3.1	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK, dan metode blended learning	IKP.1.3.1.1	Jumlah media pembelajaran	Judul	10	15	20	25	30
7	KP.1.3.2	Pengembangan kurikulum bertaraf internasional, dan respon terhadap revolusi industri 4.0	IKP.1.3.2.1	Jumlah Kurikulum & Silabus	Kurikulum & Silabus	1	2	3	4	5
			IKP.1.3.2.1.1	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50	55	60	65	70
8	KP.1.3.3	Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum TEFA dan Dual System	IKP.1.3.3.1	Jumlah Kurikulum & Silabus TeFa	Kurikulum & Silabus	1	1	1	1	1
9	KP.1.3.4	Membangun sistem pendidikan vokasi terintegrasi dan berjenjang	IKP.1.3.4.1	Jumlah Kurikulum Meme & RPL	Kurikulum & Silabus	1	1	1	1	1
10	KP.1.3.5	Program Magister terapan	IKP.1.3.5.1	Jumlah Mahasiswa S2	Mahasiswa	6	12	14	16	18
			IKPT.1.3.5.2	Persentase lulusan S2 Terapan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	0	0	50	65	80

			IKPT.1.3.5.3	Persentase lulusan S2 Terapan yang menghabiskan paling sedikit 10 (sepuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	10	12,5	15	17,5	20
			IKPT.1.3.5.4	Persentase program studi S2 Terapan yang melaksanakan kerja sama dengan mitra. (asumsi: akan ada 2 prodi S2)	%	0	50	50	100	100
			IKPT.1.3.5.5	Persentase mata kuliah S2 Terapan yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	10	20	20	40	50
11	KP.1.3.6	Penyelarasan pola pembelajaran TVET	IKP.1.3.6.1	Jumlah Kurikulum TVET	Dokumen	1	1	1	1	1
12	KP.1.3.7	Meningkatkan kualitas keahlian dosen dan tenaga laboran	IKP.1.3.7.1	Jumlah Dosen/laboran mengikuti pelatihan	Orang	5	10	15	20	25
13	KP.1.4.1	Pemenuhan Matriks Penilaian dokumen akreditasi BAN-PT	IKP.1.4.1.1	Jumlah Prodi Terakreditasi A	Dokumen	1	1	1	1	1
			IKP.1.4.1.1.1	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	45	50	55	60
14	KP.1.4.2	Penyusunan dokumen akreditasi internasional	IKP.1.4.2.1	Jumlah Program Studi terakreditasi internasional	Prodi	4	6	8	9	10
			IKP.1.4.2.1.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0	0	0	0	6
15	KP.1.4.3	Penerimaan Mahasiswa asing dalam rangka pemenuhan international student ratio	IKP.1.4.3.1	Jumlah mahasiswa asing	Orang	6	10	16	20	25
16	KP.1.5.1	Pelaksanaan UTS, UAS, Ujian Tugas Akhir	IKP.1.5.1.1	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PBM	Kegiatan	17	17	17	17	17

4.1.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya ranking PPNS dalam pemeringkatan PT tingkat Nasional dan Internasional

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 2

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program			Target				
			Kode	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.2.1.1	Meningkatkan konten dan aksesibilitas website PPNS	IKP.2.1.1.1	Jumlah artikel di website/bulan	Kegiatan	5	5	5	5	5
2	KP.2.1.2	Intensifikasi pelaporan dan monitoring pada website/aplikasi terkait pemeringkatan PT	IKP.2.1.2.1	Nilai pemeringkatan PT	Angka	13	10	5	5	5

4.1.3 Sasaran Strategis 3

Meningkatnya daya saing lulusan PPNS di era kompetisi global baik tingkat Nasional maupun Internasional

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 3

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program			Target				
			Kode	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.3.1.1	Membekali mahasiswa dengan uji kompetensi berstandar nasional/internasional	IKP.3.1.1.1	Persentase mahasiswa lulus uji kompetensi	%	100	100	100	100	100
2	KP.3.1.2	Meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa (bahasa asing, komunikasi dan kepercayaan diri)	IKP.3.1.2.1	Persentase mahasiswa dengan Sertifikat TOIEC	Sertifikat	100	100	100	100	100
3	KP.3.1.3	Peningkatan kemampuan lulusan dalam penguasaan bahasa asing selain bahasa inggris	IKP.3.1.3.1	Persentase Mahasiswa menguasai Bahasa Asing selain Bhs Inggris	%	2	3	4	5	5
4	KP.3.1.4	Mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa	IKP.3.1.4.1	Jumlah kegiatan kemahasiswaan/th	Judul	20	20	20	20	20
5	KP.3.1.5	Memberikan reward/beasiswa kepada mahasiswa berprestasi (atau kurang mampu)	IKP.3.1.5.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	Kegiatan	5%	5%	5%	5%	5%

6	KP.3.1.6	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa melalui Kuliah Tamu, Kunjungan Industri, dan Simulasi Pengembangan Ketrampilan dan Kepribadian	IKP.3.1.6.1	Jumlah kegiatan kunjungan industri dan kuliah tamu	Kegiatan	14	20	24	28	32
7	KP.3.1.7	Pelaksanaan On the Job Training untuk membentuk lulusan yang siap kerja	IKP.3.1.7.1	Jumlah industri mitra OJT	Perusahaan	200	210	220	230	240
			IKP.3.1.7.1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	15	20	25	30	35
8	KP.3.2.1	Melaksanakan kegiatan pelacakan alumni (tracer study)	IKP.3.2.1.1	Persentase hasil tracer study	%	40	45	45	50	50
			IKP.3.2.1.1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80	85	87	89	91
9	KP.3.2.2	Pelaksanaan job fair dalam rangka meningkatkan keterserapan lulusan	IKP.3.2.2.1	Masa tunggu lulusan < dari 3 bulan	%	54	60	60	60	60
10	KP.3.2.3	Kerjasama penempatan dengan perusahaan dan pemda	IKP.3.2.3.1	Jumlah mitra penempatan lulusan	Perusahaan	3	5	7	9	11

4.1.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatkan peran serta langsung PPNS dalam mempercepat proses pembangunan nasional, khususnya sektor kemaritiman dan industri pendukung kemaritiman.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 4

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			Kode	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.4.1.1	Meningkatkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat didanai DIPA	IKP.4.1.1.1	Jumlah Judul Pengabdian kepada masyarakat yang diterima	Judul	10	10	10	10	10
			IKP.4.1.1.1.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	%	20	25	30	35	40
2	KP.4.1.2	Meningkatkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat didanai pihak luar	IKP.4.1.2.1	Jumlah judul pengmas didanai pihak luar	Judul	3	5	7	9	11
3	KP.4.1.3	Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan masyarakat	IKP.4.1.3.1	Jumlah pelatihan	Kegiatan	20	20	25	25	30
4	KP.4.1.4	Mengadakan promosi kegiatan pelatihan	IKP.4.1.4.1	Jumlah peserta pelatihan	Kegiatan	600	800	900	1000	1100
5	KP.4.1.5	Peningkatan Jumlah Lab/Bengkel menjadi TUK	IKP.4.1.5.1	Jumlah TUK	TUK	10	10	10	10	10
6	KP.4.1.6	Sertifikasi Lab/Bengkel	IKP.4.1.6.1	Jumlah Lab/Bengkel tersertifikasi	Lab/bengkel	1	3	5	7	9
7	KP.4.1.7	Intensifikasi Pelaksanaan Jasa dan Produksi	IKP.4.1.7.1	Jumlah Mitra Jasa dan Produksi	Perusahaan	100	110	120	130	140

4.1.5 Sasaran Strategis 5

Menciptakan iklim penelitian berbasis teknologi terapan, inovatif dan bersifat technopreneur

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 5

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program			Target				
			Kode	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.5.1.1	Meningkatkan jumlah judul penelitian didanai dana dipa	IKP.5.1.1.1	Jumlah Judul Penelitian yang diterima	Judul	28	28	28	28	28
			IKP.5.1.1.1.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per Jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0.15	0.45	0.75	1.05	1.35
2	KP.5.1.2	Meningkatkan jumlah judul penelitian berorientasi HKI	IKP.5.1.2.1	Jumlah KI	Judul	10	12	14	16	18
3	KP.5.1.3	Menyusun RENSTRA penelitian unggulan PPNS	IKP.5.1.3.1	Dokumen renstra	Kegiatan	0	0	0	0	1
4	KP.5.1.4	Penelitian kerjasama dengan industri	IKP.5.1.4.1	Jumlah industri mitra Penelitian	perusahaan	10	10	10	10	10
5	KP.5.1.5	Pelaksanaan penelitian terapan berorientasi paten	IKP.5.1.5.1	Jumlah Paten	Kegiatan	3	3	3	3	3
6	KP.5.1.6	Inisiasi start up company melalui program CPPBT/PPBT	IKP.5.1.6.1	Jumlah start up	Kegiatan	2	2	2	2	2
7	KP.5.2.1	Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dosen	IKP.5.2.1.1	Jumlah publikasi internasional	Judul	30	30	30	30	30
			IKP.5.2.1.1.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per Jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	0.15	0.45	0.75	1.05	1.35
8	KP.5.2.2	Insentif jurnal nasional dan internasional	IKP.5.2.2.1	Jumlah judul penerima insentif	Judul	20	25	30	35	40
9	KP.5.2.3	Pelaksanaan Seminar Ilmiah Nasional "Master"	IKP.5.2.3.1	Jumlah seminar	Kegiatan	2	2	2	2	2
10	KP.5.2.4	Penerbitan jurnal	IKP.5.2.4.1	Jumlah penerbitan jurnal/th	Jurnal	2	2	2	2	2
11	KP.5.3.1	Penyusunan Perencanaan Marine STP Lamongan	IKP.5.3.1.1	Jumlah kegiatan inisiasi STP	Kegiatan	1	1	1	1	1
12	KP.5.3.2	Pembangunan	IKP.5.3.2.1	Jumlah STP	Kegiatan	1	1	1	1	1
13	KP.5.3.3	Penguatan tata kelola dalam rangka revenue Marine STP	IKP.5.3.3.1	Jumlah Revenue	Kegiatan	50	50	50	50	50

4.1.6 Sasaran Strategis 6

Terwujudnya sistem organisasi yang berbasis good governance Polytechnic

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 6

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			Kode	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.6.1.1	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan pendukung layanan akademik dan non akademik	IKP.6.1.1.1	Jumlah Pelatihan/Diklat Kompetensi	Diklat	18	20	22	25	28
			IKP.6.1.1.1.1	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	45	50	55	60
2	KP.6.1.2	Mengembangkan sistem layanan berbasis kepuasan pelanggan	IKP.6.1.2.1	Hasil survei kepuasan layanan	Dokumen	1	1	1	1	1
3	KP.6.1.3	Mengukur tingkat kepuasan layanan	IKP.6.1.3.1	Tingkat Kepuasan Layanan	%	70	75	80	82	85
4	KP.6.1.4	Penguatan Unit Layanan Terpadu	IKP.6.1.4.1	Jumlah layanan/hari	Layanan	25	30	35	40	45
5	KP.6.1.5	Penguatan PPNS - Help Desk	IKP.6.1.5.1	paket kegiatan pemeliharaan	Kegiatan	10	10	10	10	10
6	KP.6.1.6	Pengembangan Kelengkapan Layanan dan Kerjasama Institusi	IKP.6.1.6.1	Jumlah Kegiatan Pengembangan Layanan	Kegiatan	8	10	11	15	17
7	KP.6.2.1	Membangun SIM PPNS terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan	IKP.6.2.1.1	Jumlah aplikasi SIM	Kegiatan	1	1	1	1	1
8	KP.6.2.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang SIM PPNS	IKP.6.2.2.1	Jumlah peralatan	Paket	1	1	1	1	1
9	KP.6.2.3	Pengembangan Database Institusi yang Terintegrasi	IKP.6.2.3.1	Pengembangan Database Institusi terintegrasi	Kegiatan	2	2	2	2	2
10	KP.6.3.1	Melakukan review dan update berkala SPMI dan perangkat SPMI terhadap perkembangan peraturan terkait penjaminan mutu	IKP.6.3.1.1	Laporan hasil review	Dokumen	1	1	1	1	1
11	KP.6.3.2	Melakukan audit internal secara berkala	IKP.6.3.2.1	Laporan hasil audit	Dokumen	1	1	1	1	1
12	KP.6.4.1	Menyusun program kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan berbasis evaluasi diri	IKP.6.4.1.1	Laporan hasil kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1
13	KP.6.4.2	Menyusun rencana dan program kerja	IKP.6.4.2.1	Jumlah Kegiatan ED dan Penyusunan Renja	Kegiatan	33	33	33	33	33

14	KP.6.4.3	Melaksanakan audit mutu eksternal oleh lembaga independen secara rutin	IKP.6.4.3.1	Pelaksanaan akreditasi BAN-PT	Kegiatan	1	1	1	1	1
15	KP.6.4.4	Menyusun proposal BLU	IKP.6.4.4.1	Tersedianya Dok. BLU	Kegiatan	1	0	0	0	0
16	KP.6.4.5	Membudayakan safety, Health, and environment	IKP.6.4.5.1	Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1
17	KP.6.5.1	Rapat Kerja Penyusunan RBA, RKAK/L, dan Dokumen DIPA BLU	IKP.6.5.1.1	Jumlah kegiatan	kegiatan	3	3	3	3	3
18	KP.6.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)	IKP.6.5.2.1	Tersedianya Dokumen LAKIN	Dokumen	1	1	1	1	1
19	KP.6.5.3	Penyusunan Laporan PDDIKTI	IKP.6.5.3.1	Pelaporan PDDIKTI	Kegiatan	1	1	1	1	1
20	KP.6.5.4	Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan yang Menjamin Terwujudnya Kegiatan Tridharma PT dan Operasional Kantor	IKP.6.5.4.1	Terwujudnya Kegiatan Tridharma PT & Operasional Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12
21	KP.6.5.5	Langganan Daya dan Jasa	IKP.6.5.5.1	Langganan Daya dan Jasa	Bulan	12	12	12	12	12
22	KP.6.5.6	Penyelenggaraan dan Peningkatan Layanan Poliklinik	IKP.6.5.6.1	Jumlah Paket Kegiatan Laayanan Poliklinik	Paket	1	1	1	1	1
23	KP.6.5.7	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	IKP.6.5.7.1	Frekuensi Pembayaran Gaji (Bulan)	Bulan	14	14	14	14	14
24	KP.6.5.8	Penyusunan Tarif	IKP.6.5.8.1	Tersedianya Tarif Standard Kegiatan	Kegiatan	0	1	1	1	1
25	KP.6.5.9	Penyusunan Dokumen Remunerasi	IKP.6.5.9.1	Tersedianya Dok. Remunerasi	Kegiatan	0	1	0	0	0
26	KP.6.5.10	Pengembangan Sistem Akuntansi	IKP.6.5.10.1	Jumlah Dok. Sistem Akuntansi	Dokumen	0	1	1	0	0
27	KP.6.5.11	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	IKP.6.5.11.1	Jumlah Dok. Hasil Pemeriksaan	Kegiatan	0	1	1	1	1
28	KP.6.5.12	Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	IKP.6.5.12.1	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Orang	19	21	26	31	39
29	KP.6.5.13	Pengadaan Bandwidth Internet	IKP.6.5.13.1	Kapasitas Bandwidth Internet	MBPS	7	7	10	15	20
30	KP.6.5.14	Pemberian reward dan punishment secara berkelanjutan	IKP.6.5.14.1	Pedoman pemberian reward & punishment	Dokumen	1	1	1	1	1
31	KP.6.6.1	Pengembangan Media Publikasi dan Komunikasi Internal	IKP.6.6.1.1	Jumlah Media Publikasi dan Komunikasi Internal	Media Publikasi dan Komunikasi	2	2	2	2	2
32	KP.6.6.2	Pengelolaan website & social media PPNS	IKP.6.6.2.1	Update konten/minggu	Naskah/konten	2	3	5	7	10
33	KP.6.6.3	Intensifikasi Komunikasi dengan media eksternal baik cetak maupun online	IKP.6.6.3.1	Publikasi PPNS/triwulan	Publikasi	4	4	5	5	6
34	KP.6.7.1	Penyusunan Peraturan-peraturan Internal Bidang Akademik (Senat)	IKP.6.7.1.1	Jumlah Peraturan Internal	Peraturan	20	20	20	20	20
35	KP.6.7.2	Penyelenggaraan Rapat-rapat Pleno Senat	IKP.6.7.2.1	Jumlah Kegiatan Rapat Pleno Senat	Kegiatan	12	12	12	12	12

4.1.7 Sasaran Strategis 7

Meningkatnya kualitas kerjasama PPNS dengan stakeholder dalam kegiatan Tridharma

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Program dan Capaian per Tahun Sasaran Strategis 7

No	KODE	KEGIATAN	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			Kode	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	KP.7.1.1	Memperkuat kerjasama PPNS dengan industri terkait dengan penerapan Dual System (OJT)	IKP.7.1.1.1	Jumlah kerjasama	Kegiatan	10	10	10	10	10
2	KP.7.1.2	Meningkatkan peran serta industri dan alumni dalam proses pembelajaran	IKP.7.1.2.1	Jumlah anggota IAB	Kegiatan	30	30	30	30	30
3	KP.7.1.3	Pendidikan Jarak Jauh	IKP.7.1.3.1	Jumlah mahasiswa PJJ	Kegiatan	0	30	60	90	120
			IKP.7.1.3.1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	15	20	25	30	35
4	KP.7.1.4	Hasil Produksi TEFA	IKP.7.1.4.1	Jumlah produk	Kegiatan	5	7	9	11	12
5	KP.7.1.5	RPL bagi karyawan industri	IKP.7.1.5.1	Jumlah peserta RPL	Volume	25	25	25	25	25
6	KP.7.1.6	Peningkatan Bea siswa dari kerjasama baik institusi pemerintah maupun swasta	IKP.7.1.6.1	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa	1	1	1	1	1
7	KP.7.1.7	kerjasama bea siswa dengan pemerintah negara lain	IKP.7.1.7.1	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa	1	1	1	1	1
8	KP.7.1.8	Kelas Kerjasama	IKP.7.1.8.1	Jumlah mahasiswa kelas kerjasama	Mahasiswa	20	20	20	20	20
9	KP.7.1.9	kelas internasional	IKP.7.1.9.1	Jumlah mahasiswa kelas internasional	Mahasiswa	0	0	6	12	18
10	KP.7.1.10	Peningkatan jumlah student body	IKP.7.1.10.1	Jumlah total mahasiswa	Mahasiswa	2729	2819	2909	3100	3200
11	KP.7.1.11	Pengembangan program studi baru	IKP.7.1.11.1	Jumlah program Studi baru	Program Studi	0	2	4	4	6
12	KP.7.2.1	Meningkatkan jumlah layanan jasa dan produksi	IKP.7.2.1.1	Jumlah layanan jasa & produksi	Kegiatan	250	250	250	250	250
			IKP.7.2.1.1.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	55	60	65	70
13	KP.7.2.2	Jasa Konsultansi	IKP.7.2.2.1	Jumlah layanan jasa konsultansi	Kegiatan	2	2	4	4	6
14	KP.7.2.3	Jasa Inspeksi	IKP.7.2.3.1	Jumlah layanan jasa inspeksi	Kegiatan	2	2	4	4	6
15	KP.7.2.4	Pelatihan Industri	IKP.7.2.4.1	Jumlah pelatihan	Judul	20	20	20	20	20
16	KP.7.2.5	Sertifikasi BNSP	IKP.7.2.5.1	Jumlah peserta	Kegiatan	600	800	900	1000	1100
17	KP.7.2.6	Sertifikasi Badan Internasional (ATC, ATB)	IKP.7.2.6.1	Jumlah peserta sertifikasi internasional	Kegiatan	60	80	90	100	110

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, setiap tahunnya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) mendapatkan pendanaan Rupiah Murni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) dan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Total anggaran tahun 2020-2024 yang dibutuhkan PPNS secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.8 Anggaran Indikatif Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 - 2024

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Keluaran					Anggaran				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengembangan kurikulum bertaraf internasional	Jumlah Kurikulum & Silabus	Dokumen	1	2	3	4	5	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
2	Melakukan promosi yang efektif, menarik dan tepat sasaran	Jumlah peminat	Calon mhs	16	18000	20000	22000	24000	263,855,000	300,000,000	320,000,000	340,000,000	360,000,000
3	Meningkatkan kualitas keahlian dosen dan tenaga laboran	Jumlah Dosen/laboran mengikuti pelatihan	Orang	5	10	15	20	25	344,132,000	400,000,000	400,000,000	450,000,000	450,000,000
4	Meningkatkan dan memutakhirkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran	Jumlah peralatan	Unit	10	10	10	10	10	9,061,606,000	9,967,766,600	10,873,927,200	10,873,927,200	12,686,248,400
5	Penyusunan dokumen akreditasi Internasional	Jumlah Program Studi terakreditasi internasional	Program Studi	4	6	8	9	10	895,961,000	-	-	-	1,000,000,000
6	Penerimaan mahasiswa asing dalam rangka pemenuhan International Student Ratio	Jumlah mahasiswa asing	Orang	6	10	16	20	25	268,390,000	300,000,000	350,000,000	400,000,000	400,000,000
7	Meningkatkan konten dan aksesibilitas website PPNS	Jumlah artikel di website/bulan	Kegiatan	5	5	5	5	5	15,000,000	17,000,000	20,000,000	22,000,000	25,000,000

8	Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum TEFA dan Dual System	Jumlah Kurikulum & Silabus TeFa	Kurikulum & Silabus	1	1	1	1	1	2,690,470,000	2,989,870,000	3,259,870,000	3,529,870,000	3,799,870,000
9	Membangun sistem pendidikan vokasi terintegrasi dan berjenjang	Jumlah Kurikulum Meme & RPL	Dokumen	1	1	1	1	1	160,286,000	160,286,000	160,286,000	160,286,000	160,286,000
10	Program Magister terapan	Jumlah Mahasiswa S2	Mahasiswa	6	12	14	16	18	25,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	50,000,000
11	Penyelarasan pola pembelajaran TVET	Jumlah Kurikulum TVET	Dokumen	1	1	1	1	1	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
12	Membekali mahasiswa dengan uji kompetensi berstandar nasional/internasional	% mahasiswa lulus uji kompetensi	%	100	100	100	100	100	190,000,000	190,000,000	190,000,000	200,000,000	200,000,000
13	Meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa (bahasa asing, komunikasi dan kepercayaan diri)	% Mahasiswa dg Sertifikat TOIEC	Sertifikat	100	100	100	100	100	150,000,000	150,000,000	150,000,000	180,000,000	180,000,000
14	Peningkatan kemampuan lulusan dalam penguasaan bahasa asing selain bahasa inggris	% Mahasiswa menguasai Bahasa Asing selain Bhs Inggris	%	2	3	4	5	5	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
15	Melaksanakan kegiatan pelacakan alumni (tracer study)	% Hasil tracer study	%	40	45	45	50	50	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
16	Pelaksanaan Job Fair dalam rangka meningkatkan keterserapan lulusan di dunia industri	Masa tunggu lulusan < dari 3 bulan	%	54	60	60	60	60	43,352,000	50,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000
17	Mengembangkan potensi minat dan bakat mahasiswa	Jumlah kegiatan kemahasiswaan/th	Judul	20	20	20	20	20	1,226,592,000	1,226,592,000	1,226,592,000	1,226,592,000	1,226,592,000
18	Memberikan reward/beasiswa kepada mahasiswa berprestasi (atau kurang mampu)	% Mahasiswa penerima beasiswa	Kegiatan	5%	5%	5%	5%	5%	4,509,000,000	4,509,000,000	4,509,000,000	4,509,000,000	4,509,000,000
19	Meningkatkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat didanai DIPA	Jumlah Judul Pengabdian kepada masyarakat yang diterima	Judul	10	10	10	10	10	220,000,000	220,000,000	250,000,000	250,000,000	300,000,000

20	Meningkatkan koleksi perpustakaan (buku teks, jurnal nasional, jurnal internasional, prosiding, majalah) spesifik penunjang keahlian/capaian pembelajaran program studi, e-library	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	12,923	13,5	14	14,5	15	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
21	Meningkatkan jumlah kegiatan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan	Kegiatan	20	20	25	25	30	2,514,918,000	2,514,918,000	2,750,000,000	2,750,000,000	3,000,000,000
22	Mengadakan promosi kegiatan pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	Kegiatan	600	800	900	1000	1100	50,298,360	50,298,360	55,000,000	55,000,000	60,000,000
23	Peningkatan Jumlah Lab/Bengkel menjadi TUK	Jumlah TUK	TUK	10	10	10	10	10	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
24	Meningkatkan jumlah judul penelitian didanai dana dipa	Jumlah Judul Penelitian yang diterima	Judul	28	28	28	28	28	444,000,000	500,000,000	500,000,000	550,000,000	550,000,000
25	Meningkatkan jumlah judul penelitian berorientasi KI (Kekayaan Intelektual)	Jumlah KI	Judul	10	12	14	16	18					
26	Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian dosen	Jumlah publikasi internasional	Judul	30	30	30	30	30	756,000,000	1,010,700,000	1,211,000,000	1,566,960,000	1,676,156,000
27	Pelaksanaan Seminar Ilmiah Nasional "Master"	Jumlah seminar	Kegiatan	2	2	2	2	2	370,511,000	370,511,000	450,000,000	500,000,000	500,000,000
28	Inisiasi STP	Jumlah kegiatan inisiasi STP	Kegiatan	1	1	1	1	1	5,000,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
29	Menyusun RENSTRA penelitian unggulan PPNS	Dokumen renstra	Kegiatan	0	0	0	0	1	8,880,000	10,000,000	10,000,000	11,000,000	11,000,000
30	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	% tendik bersertifikat kompetensi	Paket	100	100	100	100	100	344,132,000	344,132,000	344,132,000	344,132,000	344,132,000
31	Mengembangkan sistem layanan berbasis kepuasan pelanggan	Hasil survei kepuasan layanan	Dokumen	1	1	1	1	1	29,148,000	29,148,000	29,148,000	29,148,000	29,148,000
32	Penguatan PPNS - Help Desk	Paket kegiatan pemeliharaan	Kegiatan	10	10	10	10	10	3,369,051,000	3,369,051,000	3,369,051,000	3,369,051,000	3,369,051,000

33	Membangun SIM PPNS terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan	Jumlah aplikasi SIM	Kegiatan	1	1	1	1	1	200,000,000	200,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
34	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang SIM PPNS	Jumlah peralatan	Paket	1	1	1	1	1	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
35	Melakukan review dan update berkala SPMI dan perangkat SPMI terhadap perkembangan peraturan terkait penjaminan mutu	Laporan hasil review	Dokumen	1	1	1	1	1	12,588,000	15,640,000	15,640,000	15,640,000	17,204,000
36	Melakukan audit internal secara berkala	Laporan hasil audit	Dokumen	1	1	1	1	1	129,542,000	129,542,000	129,542,000	129,542,000	129,542,000
37	Memberikan reward & punishment secara berkelanjutan	Pedoman pemberian reward & punishment	Dokumen	1	1	1	1	1	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000
38	Menyusun program kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan berbasis evaluasi diri	Laporan hasil kegiatan	Dokumen	1	1	1	1	1	100,000,000	-	-	-	150,000,000
39	Melaksanakan audit mutu eksternal oleh lembaga independen secara rutin	Pelaksanaan akreditasi BAN-PT	Kegiatan	1	1	1	1	1	104,039,000	104,039,000	104,039,000	104,039,000	104,039,000
40	Membudayakan safety, Health, and environment	Jumlah kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	200,000,000	-	-	-	200,000,000
41	Memperkuat kerjasama PPNS dengan industri terkait dengan penerapan Dual System (OJT)	Jumlah kerjasama	Kegiatan	10	10	10	10	10	29,400,000	29,400,000	29,400,000	29,400,000	29,400,000
42	Meningkatkan peran serta industri dan alumni dalam proses pembelajaran	Jumlah anggota IAB	Kegiatan	30	30	30	30	30	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
43	Meningkatkan jumlah layanan jasa dan produksi	Jumlah layanan jasa & produksi	Kegiatan	250	250	250	250	250	175,000,000	175,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000
44	Pendidikan Jarak Jauh	jumlah mahasiswa PJJ	Kegiatan	0	30	60	90	120	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
45	Hasil Produksi TEFA	Jumlah produk	Kegiatan	5	7	9	11	12	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
46	RPL bagi karyawan industri	Jumlah peserta RPL	Volume	25	25	25	25	25	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000

47	Peningkatan Bea siswa dari kerjasama baik institusi pemerintah maupun swasta	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa	1	1	1	1	1	192,800,000	192,800,000	192,800,000	192,800,000	192,800,000
48	Kerjasama bea siswa dengan pemerintah negara lain	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Mahasiswa	1	1	1	1	1	-	100,000,000	150,000,000	200,000,000	200,000,000
49	Kelas Kerjasama	Jumlah mahasiswa kelas kerjasama	Mahasiswa	20	20	20	20	20	32,500,000	30,123,000	30,123,000	30,123,000	33,135,300
50	Peningkatan jumlah student body	Jumlah total mahasiswa	Kegiatan	2729	2819	2909	3100	3200	3,801,200,000	3,801,200,000	3,801,200,000	3,801,200,000	3,801,200,000
51	Jasa Konsultansi	Jumlah layanan jasa konsultansi	Kegiatan	2	2	4	4	6	100,000,000	150,000,000	150,000,000	200,000,000	200,000,000
52	Jasa Inspeksi	Jumlah layanan jasa inspeksi	Kegiatan	2	2	4	4	6					
53	Pelatihan Industri	Jumlah pelatihan	Judul	20	20	20	20	20					
54	Sertifikasi BNSP	Jumlah peserta	Kegiatan	600	800	900	1000	1100					
55	Sertifikasi Badan Internasional (ATC, ATB)	jumlah peserta sertifikasi internasional	Kegiatan	60	80	90	100	110	80,000,000	-	-	-	-
56	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)	Tersedianya Dokumen LAKIN	Dokumen	1	1	1	1	1					
57	Penyusunan PDDIKTI	Pelaporan PDDIKTI	Kegiatan	1	1	1	1	1					
58	Penyelenggaraan Kegiatan-kegiatan yang Menjamin Terwujudnya Kegiatan Tridharma PT dan Operasional Perkantoran	Terwujudnya Kegiatan Tridharma PT & Operasional Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	3,484,147,000	3,484,147,000	3,484,147,000	3,484,147,000	3,484,147,000
59	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar	Jml. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan PBM	Kegiatan	17	17	17	17	17	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
60	Langganan Daya dan Jasa	Langganan Daya dan Jasa	Bulan	12	12	12	12	12	1,661,400,000	1,661,400,000	1,661,400,000	1,661,400,000	1,661,400,000
61	Penyelenggaraan dan Peningkatan Layanan Poliklinik	Jumlah Paket Kegiatan Laayanan Poliklinik	Paket	1	1	1	1	1	100,000,000	100,000,000	125,000,000	150,000,000	150,000,000

62	Pembayaran gaji dan tunjangan	Frekuensi Pembayaran Gaji (Bulan)	Bulan	14	14	14	14	14	22,580,993,000	23,710,042,650	24,839,092,300	25,968,141,950	27,097,191,600
63	Penyusunan Evaluasi Diri, Rencana Pengembangan, dan Renja Tahunan Unit Kerja	Jumlah Kegiatan ED dan Penyusunan Renja	Kegiatan	33	33	33	33	33	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
64	Penyusunan Dokumen BLU	Tersedianya Dokumen BLU	Kegiatan	1	0	0	0	0	220,000,000	-	-	-	-
65	Penyusunan Tarif	Tersedianya Tarif Standard Kegiatan	Kegiatan	0	1	1	1	1	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
66	Penyusunan Dokumen Remunerasi	Tersedianya Dokumen Remunerasi	Kegiatan	0	1	0	0	0	-	100,000,000	100,000,000	-	-
67	Pengembangan Sistem Akuntansi	Jumlah Dok. Sistem Akuntansi	Dokumen	0	1	1	0	0	-	100,000,000	50,000,000	-	-
68	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dok. Hasil Pemeriksaan	Kegiatan	0	1	1	1	1	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
69	Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Orang	19	21	26	31	39	1,014,000,000	1,014,000,000	1,014,000,000	1,014,000,000	1,014,000,000
70	Pengadaan Bandwidth Internet	Kapasitas Bandwidth Internet	MBPS	7	7	10	15	20	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
71	Pengembangan Media Publikasi dan Komunikasi Internal	Jumlah Media Publikasi dan Komunikasi Internal	Media Publikasi dan Komunikasi	2	2	2	2	2	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
72	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan pendukung layanan akademik dan non akademik	Jumlah Pelatihan/Diklat Kompetensi	Diklat	18	20	22	25	28	144,000,000	160,000,000	176,000,000	200,000,000	224,000,000
73	Penyusunan Peraturan-peraturan Internal Bidang Akademik, Keuangan, Kerjasama, dan Kemahasiswaan (Senat)	Jumlah Peraturan Internal	Peraturan	20	20	20	20	20	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000

74	Penyelenggaraan Rapat-rapat Pleno Senat	Jumlah Kegiatan Rapat Pleno Senat	Kegiatan	12	12	12	12	12	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
75	Pengembangan Kelengkapan Layanan dan Kerjasama Institusi	Jumlah Kegiatan Pengembangan Layanan	Kegiatan	8	10	11	15	17	268,390,000	300,000,000	330,000,000	363,000,000	399,300,000
76	Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Jumlah TUK	Kegiatan	1	1	1	1	1	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
77	Kelas Internasional	Jumlah mahasiswa kelas internasional	Mahasiswa	0	0	6	12	18					
78	Pengembangan Program Studi Baru	Jumlah program Studi baru	Program Studi	0	2	4	4	6					
79	Penerbitan jurnal	Jumlah penerbitan jurnal/th	Jurnal	2	2	2	2	2	93,060,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
80	Membangun sistem seleksi calon mahasiswa baru	Jumlah pendaftar	Orang	16000	17000	18000	19000	20000	1,285,450,000	1,285,450,000	1,285,450,000	1,285,450,000	1,285,450,000
81	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) dan Alat Tulis Kantor (ATK) pelaksanaan proses belajar mengajar	Jumlah paket pengadaan	Paket	5	7	7	9	9	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000
82	Pengembangan media pembelajaran berbasis TIK dan metode blended learning	Jumlah media pembelajaran	Judul	10	15	20	25	30	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
83	Pemenuhan matriks penilaian dokumen akreditasi BAN-PT	Jumlah Prodi Terakreditasi A	Prodi	5	8	10	12	14					
84	Intensifikasi pelaporan dan monitoring pada website/aplikasi terkait pemeringkatan PT	Nilai pemeringkatan PT	Angka	13	10	5	5	5					
85	Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui kuliah tamu, kunjungan industri, dan simulasi pengembangan ketrampilan	Jumlah kegiatan kunjungan industri dan kuliah tamu	Kegiatan	14	20	24	28	32	72,701,000	72,701,000	72,701,000	72,701,000	72,701,000
86	Pelaksanaan On the Job Training untuk membentuk lulusan siap kerja	Jumlah industri mitra OJT	Perusahaan	200	210	220	230	240	29,400,000	29,400,000	29,400,000	29,400,000	29,400,000

87	Kerjasama penempatan lulusan dengan perusahaan dan pemda	Jumlah mitra penempatan lulusan	Perusahaan	3	5	7	9	11	192,800,000	192,800,000	192,800,000	192,800,000	192,800,000
88	Meningkatkan jumlah judul pengabdian kepada masyarakat didanai pihak luar	Jumlah judul pengmas didanai pihak luar	Judul	3	5	7	9	11	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
89	Sertifikasi Lab/Bengkel	Jumlah Lab/Bengkel tersertifikasi	Lab/bengkel	1	3	5	7	9	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
90	Insentif jurnal nasional dan internasional	Jumlah judul penerima insentif	Judul	20	25	30	35	40	245,000,000	269,500,000	294,000,000	318,500,000	343,000,000
91	Penguatan Unit Layanan Terpadu	Jumlah layanan/hari	Layanan	25	30	35	40	45	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000
92	Rapat kerja penyusunan RBA, RKA K/L dan Dokumen DIPA BLU	Jumlah kegiatan	Kegiatan	3	3	3	3	3	564,161,000	564,161,000	564,161,000	564,161,000	564,161,000
93	Pengelolaan website dan social media PPNS	Update konten/minggu	Naskah/konten	2	3	5	7	10	15,000,000	17,000,000	20,000,000	22,000,000	25,000,000
94	Intensifikasi komunikasi dengan media eksternal baik media cetak maupun media online	Publikasi PPNS/triwulan	Publikasi	4	4	5	5	6	15,000,000	17,000,000	20,000,000	22,000,000	25,000,000
Jumlah									74,743,353,360	72,109,818,610	75,394,101,500	77,772,611,150	82,871,554,300

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kondisi umum, pemetaan potensi dan permasalahan, visi, misi, nilai dan tujuan PPNS, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi PPNS, target kinerja dan pendanaan. Penyusunan dokumen tersebut didasarkan pada landasan hukum PP No. 4 Tahun 2014 Pasal 5 dan mengacu pada kebijakan umum RPJMN. Renstra PPNS 2020 – 2024 disusun secara partisipatif dengan melibatkan unit kerja yang ada di lingkungan PPNS, *stakeholders* dan anggota senat.

Rencana Strategis disusun dengan mengakomodasi kondisi internal, tantangan dan perubahan eksternal, serta semangat kemandirian PPNS. Rencana pengembangan dituangkan dalam visi, misi, sasaran strategis dilengkapi indikator dan target capaian. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pimpinan dalam penyusunan program kerja dan anggaran tahunan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit dan manajemen PPNS. Rencana strategis yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun ini memberikan arahan yang jelas atas harapan dan cita-cita PPNS. Komunikasi dan koordinasi yang efektif melalui sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh.

Terima kasih kepada semua pihak termasuk tim penyusun dan senat PPNS selaku penasehat dalam proses penyusunan ini. Semoga Renstra PPNS Tahun 2020-2024 dapat menjadi guidelines dalam pengelolaan dan pengembangan PPNS lima tahun ke depan, agar PPNS dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan nasional.



Lampiran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Telepon (031) 5947186, 5942887 Fax (031) 5942887

Laman www.ppns.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 6697/PL19/OT/2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2020-2024**

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tridharma di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu dibuat Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya tahun 2020-2024.
 - b. Agar implementasi Rencana Strategis PPNS tahun 2020-2024 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
- Mengingat**
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Tahun 2020-2024 sebagai Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUA** : Segala pengeluaran yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau dana lain yang relevan;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Desember 2019





**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 4277/PL19/PR/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2020**

DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 68375/A5/HK/2020 tentang salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan Indikator Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 2020- 2024 dengan Indikator Kinerja Utama yang dimuat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 754/P/2020;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Perubahan Indikator Rencana Strategis Tahun 2020- 2024.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 DI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
- PERTAMA : Memberlakukan Perubahan Indikator Rencana Strategis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 2020-2024 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk penerbitan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2020.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Telepon (031) 5947186, 5942887 Fax (031) 5942887

Laman www.ppns.ac.id

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 08 September 2020

DIREKTUR,



EKO JULIANTO

NIP 196501231991031002

AI/MD/AM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA



Alamat : Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo - Surabaya
Telp. 031-5947186 ; Fax. 031 5942887
Web : www.ppns.ac.id | Email : humas@ppns.ac.id